

SUPRAPTO

# PRAKARSA PERDAMAIAN PEMUDA LINTAS IMAN

*Konflik, Kekerasan Sosial,  
dan Peacebuilding*



# **PRAKARSA PERDAMAIAN PEMUDA LINTAS IMAN**

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 113**

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SUPRAPTO

# PRAKARSA PERDAMAIAN PEMUDA LINTAS IMAN

*Konflik, Kekerasan Sosial, dan Peacebuilding*



## **PRAKARSA PERDAMAIAN PEMUDA LINTAS IMAN**

Konflik, Kekerasan Sosial, dan *Peacebuilding*

**SUPRAPTO**

Editor & *Proofreader*: Moh. Asyiq Amrulloh  
Desain Sampul & Isi: Dian Makruf  
Ilustrasi Simbol: Freepik

Cetakan Pertama, Februari 2017  
@Suprpto, 2017  
(xiv+ 98 halaman; 23x15,5 cm)  
ISBN: 978-602-61121-0-1

Diterbitkan atas Kerja Sama:  
**Mataram Mediation Center IAIN Mataram**  
Kampus I IAIN Mataram  
Jl. Pendidikan 35, Mataram,  
Tlp. (0370) 621298; Fax. (0370) 625337  
dan

**Onglam Books**

Jl. Puri Intan IV Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan  
Surel.: [onglambooks@gmail.com](mailto:onglambooks@gmail.com)

Perpustakaan Nasional RI.  
Data Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Prakarsa Perdamaian Pemuda Lintas Iman: Konflik,  
Kekerasan Sosial, dan *Peacebuilding* / Penyusun,  
Suprpto, --Tangsel: Onglam Books, 2017  
xiv, 98 hlm.; 23x15.5 cm.  
ISBN 978-602-61121-0-1

*Onglam Books menerbitkan buku-buku filsafat, pendidikan, sosial-keagamaan, budaya, seni, dan sastra. Dalam prosesnya, Onglam Books percaya bahwa setiap karya yang dihasilkan memiliki peran dalam peningkatan tradisi baca dan tulis, serta memperkaya khasanah intelektual bangsa.*

# PENGANTAR PENERBIT

SEBAGAI sebuah bangsa yang multikultur dengan keragaman latar sosial, etnis, budaya, agama, aspirasi politik, dan geografis, Indonesia berada pada posisi yang berbeda dan seksi di mata bangsa lain. Namun demikian, keragaman tersebut seperti pisau bermata dua. Ia menjadi sumber dinamika kemajuan masyarakat, jika warganya mampu mengubah perbedaan-perbedaan menjadi kekuatan bersama yang produktif. Sebaliknya, dalam kasus yang ekstrem, ia dapat menjadi sumber kehancuran bila selalu berbuah konflik yang lestari, tak terkecuali Kota Mataram yang diangkat dalam dalam buku ini. Di sini pula letak urgen peran para pemuda yang juga bak pisau bermata dua: berpotensi mengguncang dunia dengan sesuatu yang produktif, konstruktif, dan transformatif; namun pada saat bersamaan juga berpotensi destruktif dan memecah belah.

Peran legendaris pemuda, misalnya, ditahbiskan dalam momen historis Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadi batu penanda penting perjalanan perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia. Begitu pun pada periode selanjutnya, Benedict Anderson membaca revolusi kemerdekaan Indonesia sebagai “revolusi pemuda” lantaran peran kunci kelompok-kelompok pemuda. Peran kunci para pemuda dan mahasiswa pada periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada 1966 serta peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada babak baru yang acap disebut sebagai “era Reformasi” juga

tak terbantahkan—meski, tentu saja, dengan pertalian rumit dengan berbagai aktor lain.

Pada lain sisi, muncul fenomena memprihatinkan yang mana gerakan radikalisme sudah merambah kalangan muda dan ruang-ruang pendidikan. Posisi strategis mahasiswa dan siswa dengan jangkauan pergaulan yang luas dan relatif otonom, dianggap oleh pegiat gerakan radikal sebagai sarana paling pas dan mudah untuk memproliferasi paham-paham yang mereka perjuangkan. Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (2011), Maarif Institute (2011), serta International NGO Forum on Indonesian Development (2016) menunjukkan adanya tren peningkatan radikalisasi di kalangan anak muda antara umur 15-30 tahun. Indikasinya berupa menyetujui dan membenarkan serangkaian aksi kekerasan ekstremisme dan terorisme untuk menegakkan negara Islam. Di samping itu, agama, ekonomi, juga media seperti televisi, situs daring, dan media sosial, tidak kalah penting dalam memengaruhi radikalisasi di kalangan anak muda.

Mengukur besarnya potensi yang dapat diperankan pemuda dalam mewujudkan bina damai bangsa, sekaligus besarnya potensi mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyebarkan paham destruktif, maka pembinaan dan pendidikan perlu menjadi fokus bersama. Kemudian yang tak kalah utama, pelibatan mereka dalam menumbuhkan sekaligus merawat nilai-nilai damai di tengah masyarakat, mesti disadari betul sebagai manifestasi sosial jangka panjang.

Buku yang kini tengah di tangan pembaca yang budiman, merupakan bagian dari upaya pendokumentasian keterlibatan pemuda dalam inisiasi bina damai dengan titik fokus Kota Mataram dan sekitarnya yang notabene kota multikulutur dan sangat dinamis. Perspektif dan *angle* kajian buku ini sekaligus dapat menjadi alternatif atas berbagai kajian sebelumnya yang lebih melihat pemuda sebagai “korban”, baik dari aksi radikalisme yang dilakukan oleh orang dewasa, maupun dari keadaan ekonomi dan politik yang tidak menentu.

Atas dasar pemikiran tersebut, Onglam Books sangat antusias menerbitkan hasil riset mendalam Dr. Suprpto ini. Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi di isu-isu konflik, kekerasan, dan *peacebuilding*, Dr. Suprpto berhasil membaca secara holistik sembari mengungkap hal-hal detil di lapangan. Ide dan temuan penting

dalam buku ini sejalan dengan semangat Onglam Books yang percaya, bahwa setiap karya yang dihasilkan memiliki peran dalam memperkaya khasanah intelektual bangsa, sekaligus amunisi dalam melakukan transformasi masyarakat ke arah yang lebih berkeadaban dan berkeadilan.

Kami meyakini setiap kebaikan dan kebermanfaatannya buku ini, khususnya bagi pelibatan anak muda dalam proses bina damai nirkekerasan, sekaligus proses belajar kita semua. Selamat mengeksplorasi.[]

Salam hangat,  
**Tim Redaksi Onglam Books**





# PENGANTAR PENULIS

PROGRAM bina damai nirkekerasan merupakan program penting bagi upaya mengembangkan integrasi sosial dan harmoni di masyarakat. Sebagai bagian dari upaya resolusi konflik, kerja bina damai (*peacebuilding*) mutlak diperlukan agar penanganan konflik tidak berhenti pada tahap *peacekeeping* dan *peacemaking* saja. Program penanganan konflik yang hanya berakhir pada dua tahap ini terbukti tidak menjamin bahwa konflik yang sama tidak terulang di kemudian hari.

Program bina damai bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan semua elemen masyarakat termasuk kelompok remaja atau generasi muda. Sayangnya, program bina damai yang selama ini berlangsung belum sepenuhnya melibatkan kalangan generasi muda. Padahal, dari data statistik, kuantitas kelompok muda merupakan kelompok usia yang paling banyak dimiliki oleh hampir semua negara di dunia. Data yang dirilis oleh PBB terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terkategori muda (usia 10-25 tahun) mencapai lebih dari 20%. Di Indonesia, sesuai data BPS tahun 2014, dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia, 24,53%nya (61,83 juta jiwa) adalah penduduk usia muda.

Pelibatan pemuda dalam program resolusi konflik dan bina damai mungkin ada, tetapi belum maksimal. Itu pun sebagian masih menempatkan remaja atau pemuda sebagai sasaran kegiatan bukan

pelaku atau subyek program. Akibatnya partisipasi dari kelompok produktif ini masih belum maksimal. “*Decisions are often made for them, but not with them, losing their valuable perspectives and insights*”, demikian salah satu kritikan mengenai kurang dilibatkannya segmen generasi muda dalam program bina damai. Penelitian mengenai keterlibatan pemuda dalam program bina damai juga terbilang masih jarang. Para pengkaji dan pengambil kebijakan lebih tertarik memandangi kelompok remaja sebagai korban konflik dan belum banyak yang menyertakan pemuda dalam menyusun program bina damai.

Buku ini merupakan revisi hasil penelitian tahun 2016 mengenai peran pemuda dalam bina damai. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Mataram. Penerbitan hasil penelitian dalam bentuk buku merupakan inisiatif untuk menyebarkan informasi sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah kepada publik secara lebih luas.

Buku ini dihajatkan untuk mencoba mendokumentasikan sebagian kecil suara anak muda mengenai pandangan mereka tentang konflik, kekerasan, dan integrasi sosial. Berbagai inisiasi bina damai yang telah mereka rintis juga menjadi data menarik mengenai mulai banyaknya keterlibatan komunitas pemuda dalam mempromosikan perdamaian. Penelitian dilakukan di kota Mataram dan wilayah lain di Pulau Lombok. Kota Mataram Lombok merupakan kota multikultur yang penuh dinamika. Dinamika konflik dan integrasi antarwarga yang majemuk. Realitas yang sama sangat mungkin ditemukan di berbagai kota lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai temuan dalam buku ini dapat pula dijadikan bahan pembandingan untuk membaca kondisi daerah-daerah lain di Indonesia.

Sebagian besar narasumber dalam buku ini adalah para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang agama yang berbeda, sehingga judul buku ini adalah Prakarsa Perdamaian Pemuda Lintas Iman. Ada remaja masjid, pemuda Hindu, Budha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Meskipun berkaitan dengan pemuda lintas iman, perbincangan seputar konflik tidak hanya sebatas konflik bernuansa agama. Penulis berdiskusi dengan para pemuda mengenai berbagai konflik yang pernah terjadi. Catatan menarik dari penelitian yang kemudian terbit dalam buku ini adalah bahwa remaja atau generasi muda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sosial di

sekitar mereka. Sebagai bagian dari elemen masyarakat, komunitas pemuda merasa perlu menyumbangkan pikiran dan kreativitasnya untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

Terbitnya buku ini tentu saja atas partisipasi dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan, para pemuda pegiat bina damai yang berkenan berbagi pikiran dan pengalaman. Informasi yang kalian berikan sungguh sangat berharga bagi saya pribadi bukan hanya untuk kepentingan penelitian dan kegiatan akademis semata, tetapi juga melalui kalian saya banyak belajar mengenai upaya merawat harmoni antarsesama. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram yang ikut membantu mengumpulkan data dan terlibat aktif dalam *focus group discussion* untuk kepentingan penelitian dan penerbitan buku ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Mataram yang telah memilih proposal penelitian saya sekaligus memberi bantuan dana penelitian di tahun 2016.

Penghargaan dan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada kawan-kawan mediator di lembaga Mataram Mediation Center (MMC) IAIN Mataram. Saran, komentar, dan masukan kalian telah memberi kontribusi sangat berarti bagi rampungnya buku ini. Khusus kepada divisi publikasi MMC IAIN Mataram yang telah berkenan mengalokasikan dana untuk penerbitan buku ini, saya menghaturkan beribu terima kasih.

Kepada para mahasiswa saya baik di program S1 (di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan Prodi Sosiologi Agama) maupun mahasiswa Program S2, saya juga mengucapkan terima kasih. Pertanyaan kritis kalian dalam diskusi di perkuliahan telah mendorong saya untuk terus membaca dan meneliti. Mendialogkan teori-teori tentang resolusi konflik dan bina damai dengan data-data riil di lapangan.

Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada editor sekaligus *proofreader* buku ini, Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M. Ag

yang dengan telaten membaca naskah awal buku dan memberi catatan untuk perbaikan. Terima kasih yang sama juga teruntuk Dr. Zulfan Taufik, Direktur Onglam Books, beserta seluruh tim kreatifnya yang telah memilih karya saya untuk diterbitkan di awal tahun 2017 ini.

Karya sederhana ini, saya persembahkan untuk istriku tercinta, Alkhuriyah Qosyatrie, S.Ag (Atrix). Maafkan aku yang telah mengambil sebagian *space* ruang dapur kita untuk *finishing* buku ini. Meskipun ruang kerja telah tersedia, terkadang suara penggorenganmu memberi tambahan inspirasi untuk menulis. Untuk kedua buah hatiku yang kini beranjak remaja, Gifford Adjie Akbar Millennio (Nio) dan Safira Audi Perennia (Nia), buku ini juga untuk kalian. Silakan dibaca, siapa tahu menjadi inspirasi bagi kalian berdua untuk menjadi duta-duta perdamaian.

Terakhir, terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu memperlancar seluruh tahapan proses penelitian dan penerbitan buku ini.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini, tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.[]

Mataram, Awal 2017

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<i>Pengantar Penerbit</i>	v
<i>Pengantar Penulis</i>	ix
<i>Daftar Isi</i>	xiii
<b>1. Pendahuluan</b>	1
<b>2. Konflik, Kekerasan Sosial, dan <i>Peacebuilding</i></b>	21
A. Konflik dan Kekerasan Sosial	21
B. Bina Damai ( <i>Peacebuilding</i> )	24
C. Generasi Muda dan Gerakan Bina Damai	28
D. Tantangan Program <i>Peacebuilding</i> di Indonesia	34
<b>3. Konflik dan Resolusi Konflik pada Masyarakat Plural di Kota Mataram</b>	37
A. Konflik dan Potensi Konflik di Mataram dan Wilayah Lombok	37
1. Konflik Antarkampung	38
2. Konflik Ekonomi dan Politik	38
3. Konflik Bernuansa Agama	39
B. Respon Masyarakat terhadap Konflik dan Potensi Konflik	46
C. Pola-pola Resolusi Konflik	52
<b>4. Suara Perdamaian Anak-anak Muda</b>	67
A. Peran Pemuda dalam Program Bina Damai	68
B. Ragam dan Inisiasi Program Bina Damai	72
C. Kendala Program Bina Damai	78
<b>5. Penutup</b>	83
<i>Bibliografi</i>	87
<i>Indeks</i>	93
<i>Biodata Penulis</i>	97



# I. PENDAHULUAN

BERAGAM upaya untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan di masyarakat merupakan hal penting yang tak boleh berhenti. Keharmonisan dan kedamaian adalah prasyarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan dan pengembangan masyarakat, terutama pada masyarakat multikultur. Pada komunitas multikultur, multi-etnis, dan multi-agama seperti di Lombok, pengelolaan kedamaian masyarakat merupakan tantangan tersendiri. Diperlukan langkah-langkah strategis berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak dalam mewujudkan kondisi damai di suatu wilayah.

Sejumlah langkah pengembangan integrasi dan penciptaan harmoni antarkelompok memang telah banyak dilakukan pemerintah daerah, misalnya program pembauran antar-etnis, program dialog antar-agama, dan program siaga dini melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan lain-lain. Hanya saja, program pengembangan integrasi sosial dan penciptaan perdamaian yang dikembangkan pemerintah daerah selama ini masih terbilang parsial. Kegiatan pengembangan kedamaian yang diinisiasi pemerintah dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpol/daagri) sebagai *leading sector*-nya kurang memberikan hasil yang memuaskan. Salah satu indikatornya adalah masih adanya beragam konflik yang berujung kekerasan di masyarakat, termasuk di Kota Mataram dan wilayah lain di Indonesia.



Salah satu contoh konflik komunal bernuansa kekerasan yang mencederai ketenangan dan keharmonisan masyarakat Kota Mataram antara lain adalah bentrok antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang. Peristiwa ini terjadi di penghujung tahun lalu tepatnya tanggal 23 Nopember 2015.<sup>1</sup> Peristiwa bentrok ini terjadi akibat persoalan pembuangan sampah warga. Sebelumnya ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim juga terjadi di kawasan yang tak jauh dari Karang Taliwang yakni antara Kampung Tohpati yang mayoritas Hindu dengan kampung Karang Mas-mas yang mayoritas beragama Islam.<sup>2</sup> Konflik kekerasan yang melibatkan dua kampung yang saling berdekatan ini telah memakan korban jiwa. Korban jiwa berasal dari kedua belah pihak.

Konflik komunal tersebut sebetulnya dapat diantisipasi secara baik bila pemerintah mampu mengembangkan manajemen konflik dan upaya bina damai yang terprogram, menyeluruh, dan melibatkan banyak pihak. Sejauh ini, pola-pola penanganan konflik yang dikembangkan pemerintah daerah masih terbatas pada penghentian konflik (*peace keeping*), dan belum mengarah pada penciptaan bina damai (*peace building*) secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan serius yang luput dari perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam upaya penciptaan kedamaian di masyarakat adalah belum dilibatkannya generasi muda. Padahal, pemuda merupakan segmen masyarakat yang potensial dalam mengawal dan memelihara kedamaian serta harmoni sosial. *Alih-alih* melibatkan generasi muda, sebagian pihak malah kerap menuduh pemuda sebagai biang kerusuhan.

Secara kuantitatif, kelompok remaja atau generasi muda merupakan kelompok masyarakat dengan jumlah yang luar biasa banyak, baik secara internasional maupun nasional. Data yang dirilis PBB menunjukkan bahwa usia remaja merupakan kelompok usia paling banyak dimiliki oleh hampir semua negara.

---

<sup>1</sup>Berita selengkapnya silakan kunjungi <http://www.radarlombok.co.id/warga-monjok-dan-karang-taliwang-bentrok.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2016

<sup>2</sup>Tentang penyebab dan kronologi bentrok antarwarga ini selengkapnya silahkan baca Suprpto, *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013).

*“According to the State of the World report released in 2003, one-fifth of the world’s population is between the ages of 10 and 19. Country specific data is also vital to understand recent demographics trends. For example, in Kosovo, one-half of the population is aged under 20; in Northern Ireland, 40% of the population is under 24; 37% in South Africa is under 15 and 19.3% is aged 15-24). In Gaza and the West Bank, over 50% of the population is under 15. And in the Middle East generally, more than 40% of the population is under 15. In Guatemala 20.3% of the population is aged 15-24 and in Sierra Leone 19% is aged 15-25, and the percentage is on the rise.”<sup>3</sup>*

Di Indonesia, sesuai data BPS tahun 2014, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 61,83 juta jiwa atau sekitar 24,53% dari 252,04 juta jiwa penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pemuda telah mengakses pendidikan. Sebesar 23,52% pemuda berstatus masih bersekolah dan sisanya (75,43%) tidak bersekolah lagi dan yang belum mengakses pendidikan sama sekali hanya 1,05%). Perkembangan partisipasi pendidikan pemuda cenderung membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 persentase pemuda yang masih bersekolah sebesar 19,05%, dan pada tahun 2013 naik menjadi 21,16%, dan di tahun 2014 menjadi 23,52%.<sup>4</sup>

Ironisnya, meskipun jumlah penduduk dunia sebagian besar didominasi usia remaja, jarang sekali perhatian diarahkan kepada kelompok ini. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang sejatinya juga merupakan kekerasan struktural. Para sarjana secara kritis mengingatkan *“The lack of children and youth participation in decision-making processes at all levels is also a form of structural violence. Decisions are often made for them, but not with them, losing their valuable perspectives and insights”<sup>5</sup>.*

Generasi muda acap dituding sebagai penyebab munculnya konflik bernuansa kekerasan yang terjadi di Lombok termasuk di Kota

---

<sup>3</sup>Siobhán, McEvoy-Levy, *Youth as Social and Political Agents: Issues in Post-settlement Peace Building*. Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame (2001), 7-8.

<sup>4</sup>Data diambil dari Statistik Pemuda Indonesia 2014, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), ii.

<sup>5</sup>Celina Del Felice and Andria Wisler, “The Unexplored Power and Potential of Youth as Peace-builders” *Journal of Peace Conflict & Development* Issue 11, November (2007).

Mataram. Ketika konflik kekerasan berlangsung di suatu komunitas, tudingan langsung mengarah pada kelompok pemuda. Tawuran antarpemuda, pemuda yang mabuk-mabukan dan berbagai tindak kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) lainnya adalah sebagian contoh perilaku yang selalu dialamatkan kepada pemuda. Pemuda dicap sebagai penyebab, pelaku utama berbagai kerusakan sosial. Karena sering ditempatkan sebagai penyebab konflik dan kerusakan sosial, dampaknya program penyelesaian konflik jarang melibatkan kelompok generasi muda.

Secara umum, pola yang dilakukan pemerintah dalam mengakhiri konflik kekerasan adalah dengan mengundang para tokoh masyarakat untuk duduk bersama berdialog dan melakukan mediasi. Para tokoh masyarakat dan tokoh agama ini sebagian besar adalah orang-orang tua. Jarang sekali (untuk tidak mengatakan kurang) pelibatan tokoh-tokoh pemuda dalam mengelola atau menangani konflik.

Padahal berkaitan dengan relasi sosial di masyarakat, keberadaan generasi muda menempati posisi strategis. Salah satunya terlihat dari keaktifan kalangan muda dalam banyak organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Dalam struktur organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kelompok ini terhimpun dalam lembaga-lembaga kepemudaan. Kelompok kepemudaan ini aktif berkembang di organisasi kemasyarakatan baik yang berbasis agama maupun sekuler. Di kalangan umat Islam, misalnya, terdapat organisasi Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Putra-Putri Nahdlatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pemuda Nahdlatul Wathan (IP NW). Di tingkat mahasiswa terdapat organisasi Himpunan Mahasiswa NW (Himmah NW), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan lain sebagainya. Di kalangan umat Hindu dikenal Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Di kalangan umat Budha terdapat Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia (Hikma Budhi). Di internal umat Kristen ada Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia, dan seterusnya.

Dari berbagai elemen kepemudaan ini, sebagian aktif mengembangkan kegiatan yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk menambah dan menyalurkan potensi anggotanya, tetapi juga menjadi semacam pengikat menguatnya solidaritas antaranggota. Selain

aktif mengembangkan kegiatan kepemudaan di kalangan internal, sebagian pemuda juga membentuk forum atau aliansi antarpemuda yang anggotanya berasal dari berbagai agama. Organisasi kepemudaan lintas agama tersebut telah berperan nyata dalam mengembangkan ikatan antarpemuda yang berasal dari berbagai agama. Untuk wilayah Mataram terdapat sejumlah organisasi kepemudaan lintas agama misalnya Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (AKAPELA), Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA NTB), dan Forum Remaja Lintas Iman (FORELI) NTB.

Dalam perspektif sosiologis, kehadiran kelompok-kelompok atau asosiasi kepemudaan ini merupakan hal positif. Kehadiran asosiasi ini, meskipun masih jauh dari konsepsi ideal, menyumbang integrasi sosial khususnya di kalangan remaja. Di tingkat internal kelompok keberadaan asosiasi ini dapat menjadi pengikat (*bonding*) semua anggota yang berlatar belakang sama. Sedangkan keberadaan asosiasi lintas pemuda dapat menjembatani (*bridging*) atau menghubungkan anggota-anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Berbagai asosiasi lintas agama di atas dalam tiga tahun terakhir telah banyak melakukan dialog lintas agama dan bersemangat menyerukan pentingnya perdamaian di Lombok. Hanya saja keberadaan asosiasi kepemudaan lintas agama ini kurang terekspos secara massif. Akibatnya, suara perdamaian dari kalangan muda kurang terdengar di masyarakat.

Berangkat dari kenyataan ini, penting untuk ditelaah secara lebih mendalam mengenai berbagai hal, di antaranya: (1) Bagaimana peran asosiasi pemuda lintas agama dalam memprakarsai perdamaian?; (2) Apa saja program-program yang dilakukan asosiasi pemuda lintas agama dalam mengembangkan perdamaian di masyarakat?; (3) Apa kendala yang dihadapi asosiasi pemuda lintas agama dalam pengembangan program bina damai?

---

<sup>6</sup>Putnam menyebut adanya dua jenis ikatan kewargaan (*civic ties*); *bonding* (mengikat) dan *bridging* (menjembatani). Atau menurut Varshney ikatan intrakomunal dan ikatan interkomunal. Penjelasan lebih lanjut tentang *bonding dan bridging* lihat Roger V. Patulny dan Gunnar Lind Haase Swendsen, "Exploring the Social Capital Grid: Bonding, Bridging, Qualitative, Quantitative", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol.27. No.1/2 (2007): 32-57; Deepa Narayan, "Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty." dalam Sunder Ramaswamy, ed., *Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2002).

Melalui telaah mendalam mengenai tiga persoalan penting di atas, buku ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran asosiasi pemuda lintas agama dalam memprakarsai perdamaian, (2) mengelaborasi program-program yang dilakukan asosiasi pemuda lintas agama dalam mengembangkan perdamaian di masyarakat, dan (3) mengenali kendala yang dihadapi asosiasi pemuda lintas agama dalam program bina damai.

Kajian dalam buku ini memiliki urgensi dan signifikansi tinggi baik dari sisi akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, kajian yang mendalam mengenai peran asosiasi pemuda lintas agama dalam mengembangkan perdamaian akan menambah khazanah baru pengetahuan di bidang manajemen konflik, kerukunan antaragama, dan bina damai (*peacebuilding*). Selama ini, seperti akan dibahas dalam bab-bab berikutnya, kajian mengenai peran pemuda dalam pengembangan bina kurang terelaborasi.

Adapun manfaat praktisnya adalah tersedianya data yang memadai mengenai prakarsa perdamaian, bentuk-bentuk kegiatan serta kendala yang dihadapi asosiasi lintas agama dalam memprakarsai perdamaian. Data-data baru ini sangat penting bagi pemerintah, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan serangkaian program manajemen konflik sekaligus sebagai upaya pelibatan generasi muda dalam program bina damai (*peacebuilding*).

Program bina damai (*peacebuilding*) dan berbagai hal terkait studi perdamaian (*peace studies*) merupakan kajian sosial yang menarik. Studi tentang perdamaian biasanya disandingkan dengan kajian mengenai konflik. Hanya saja, dibanding tema yang disebut kedua, kajian perdamaian masih terbilang kurang. Sebagian besar peneliti lebih mengkaji persoalan konflik, manajemen konflik atau resolusi konflik. Banyaknya studi mengenai konflik adalah kenyataan yang tak bisa dipungkiri, mengingat fenomena konflik masih merupakan fakta sosial yang kerap terjadi termasuk di negeri ini.

Dalam dua dasawarsa terakhir, seiring meningkatkan eskalasi dan frekuensi konflik di negeri ini,<sup>7</sup> kajian tentang konflik menarik

---

<sup>7</sup>Estimasi jumlah korban dari setiap konflik, lihat Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004), 1. Tingginya Komunal konflik juga dapat dilihat dalam Ashutosh Varshney dkk., "Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", dalam *United Nation Support Facility for Indonesian Recovery Report* (Jakarta: Report UNSFIR, 2004; 25-

minat banyak peneliti. Penelitian yang mengungkap penyebab mendasar konflik di Indonesia dilakukan oleh Jacques Bertrand. Dalam penelitiannya, Bertrand menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia sangat terkait dengan konstruksi kebangsaan.<sup>8</sup> Problem separatisme, konflik antarsuku, konflik antara penduduk asli dengan pendatang, dan konflik komunal di berbagai daerah sesungguhnya terkait dengan belum tuntasnya konstruksi kebangsaan Indonesia.

Menyangkut konflik bernuansa agama, sebuah penelitian yang dilakukan tim peneliti dari *The Wahid Institute* (WI) memaparkan banyak kekerasan dan konflik komunal akibat politisasi agama.<sup>9</sup> Penelitian yang merupakan bagian dari program *Pluralism Watch* ini mencatat sejumlah kekerasan bernuansa agama yang terjadi di berbagai daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta, dan Sulawesi Selatan selama tahun 2005-2006. Bentuk-bentuk kekerasan yang dianggap mengancam pluralitas agama di antaranya penyesatan dan kekerasan terhadap aliran keagamaan tertentu, penutupan dan regulasi tempat ibadah, isu *kristenisasi*, dan regulasi bernuansa agama.<sup>10</sup>

Masih menurut tim peneliti WI, ada dua hal penting yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan konflik bernuansa agama, yaitu *pertama*, adanya kekuatan kelompok-kelompok yang “dangkal dalam beragama” yang mampu menggerakkan massa pendukung untuk menolak keberadaan kelompok lain yang dianggap sesat. *Kedua*, adanya kecenderungan aparat negara yang sering mengikuti tekanan kelompok-kelompok pemaksa ini.<sup>11</sup> Negara sering kali kalah oleh kelompok penekan dan kurang memberi pengayoman terhadap korban yang biasanya merupakan kelompok minoritas.

---

27. Tentang persentase jenis konflik di berbagai daerah lihat Karrie McLaughlin dan Ari Perdana, “Conflict and Dispute Resolution in Indonesia Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey,” *Indonesian Social Development Paper* No. 16 (2010) edisi online dapat dilihat di [www.conflictanddevelopment.org](http://www.conflictanddevelopment.org).

<sup>8</sup>Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004), 3.

<sup>9</sup>Lihat Ahmad Suaedy, dkk., ed., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

<sup>10</sup>Lihat Rumadi, “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara” dalam Ahmad Suaedy, dkk., ed., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 2-26.

<sup>11</sup>Ahmad Suaedy, dkk., ed., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal...*, 357.

Untuk konteks Lombok, sejumlah peneliti juga tertarik pada isu konflik, di antaranya penelitian oleh Saipul Hamdi (2014). Hamdi meneliti konflik-konflik yang melibatkan organisasi keagamaan terbesar di Nusa Tenggara Barat yakni Nahdlatul Wathan (NW). Melalui penelitian mendalam yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi” ini, Hamdi dengan ekstensif menguraikan faktor-faktor penyebab konflik di tubuh NW. Menurutnya, faktor penyebab konflik di NW sangat banyak yang mencakup faktor internal dan eksternal. Beberapa faktor internal yang dituding sebagai penyebab konflik organisasi keagamaan terbesar di NHTB ini antara lain poligami, kekuasaan, kepentingan ekonomi dan perebutan legitimasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi politik lokal dan nasional.<sup>12</sup> Selain itu, Hamdi juga menyebutkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan NW. Temuan Hamdi menyebutkan bahwa konflik NW merupakan salah satu konflik lokal produk reformasi 1998 yang mengalami kegagalan dalam rekonsiliasi.<sup>13</sup>

Masih terkait dengan konflik tubuh NW, sebelumnya Fathurrahman Mukhtar (2010) meneliti tentang konflik pengelolaan lembaga pendidikan yang ada di NW. Penelitian untuk kepentingan disertasi ini berjudul “Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat”. Dalam penelitian ini terungkap bahwa konflik kepengurusan di tubuh NW berakibat pada lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini dikembangkan oleh NW. Perpecahan pada organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat ini<sup>14</sup> berimplikasi pada adanya perpecahan lembaga-lembaga

---

<sup>12</sup>Selengkapnya silahkan lihat Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 199.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Konflik terjadi karena adanya perpecahan di tubuh NW yang kemudian menghasilkan dua kepengurusan di tubuh NW, yakni NW Anjani (para pengurus berpusat di desa Anjani) yang dipimpin oleh Hj. Raehanun dan NW Pancor (berpusat di Pancor) yang dipimpin oleh Rahun. Kedua tokoh ini adalah putri TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan. Konflik kedua kubu ini berlangsung cukup lama dan di tingkat *grass root* konflik ini sampai memakan korban jiwa. Beberapa pihak terus mengupayakan *islah* (perdamaian). Selengkapnya silahkan baca Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan: Agama*

pendidikan yang dinaunginya.<sup>15</sup>

Konflik yang terjadi di tingkat elit keagamaan memang potensial merambat kepada dunia pendidikan dan gesekan di akar rumput. Hal ini juga terungkap melalui penelitian Mayadi (2014) mengenai peran Tuan Guru Munajib dalam Manajemen Konflik. Melalui penelitian yang dilakukan untuk kepentingan tesis ini, Mayadi mengelaborasi sumber-sumber konflik di pondok pesantren al-Halimi Sesela. Selain menyelidiki sumber dan penyebab konflik, Mayadi juga menemukan bahwa musyawarah merupakan pola umum yang digunakan Tuan Guru Munajib dalam menghadapi dan mengelola konflik.

Jeremy Kingsley (2010) melalui penelitian yang berjudul *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, mengkaji peran pemimpin informal, Tuan Guru, dalam menghadapi konflik di masyarakat dan upaya-upaya kreatif yang dilakukannya untuk menenangkan massa. Melalui studi *ethnography*, Jeremy menemukan fakta bahwa peran Tuan Guru di Lombok sangat penting dalam menyelesaikan konflik terutama di saat pemimpin formal kurang mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.<sup>16</sup>

Konflik di tingkat internal umat beragama juga tak luput dari kajian peneliti. Lalu Zaenuri (2009) melakukan penelitian berjudul “Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)”. Dalam penelitian untuk kepentingan disertasi ini, Lalu Zaenuri melihat bahwa kegagalan komunikasi yang dibangun oleh para elit agama menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik kekerasan antara kelompok Islam *mainstream* dengan kelompok yang dianggap “sempalan”, Ahmadiyah.<sup>17</sup> Penanganan dan penyelesaian secara tuntas mengenai konflik yang melibatkan pengikut Mirza Ghulam

---

*Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 199; Suprpto, *Semerbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013), 149.

<sup>15</sup>Fathurrahman Mukhtar, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

<sup>16</sup>Jeremy J. Kingsley, *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Ph.D thesis, (Melbourn: The University of Melbourn, 2010).

<sup>17</sup>Lihat L. Ahmad Zaenuri, “Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)” Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.



Ahmad ini hingga kini belum tuntas. Sejumlah warga Ahmadiyah masih berada di pengungsian pascaperusakan rumah tinggal mereka. Sebagian besar umat Islam belum bisa menerima kehadiran kelompok yang dianggap melakukan banyak penyimpangan agama.

Kekerasan tidak hanya menimpa mereka yang dianggap menyimpang atau *bid'ah* (*heterodoks*), seperti Ahmadiyah, sebagian anggota masyarakat juga menyerang anggota kelompok Salafi. Sebagaimana terungkap dalam penelitian Faizah (2010), bahwa kelompok Salafi, kelompok keagamaan yang menekankan pada kegiatan purifikasi agama ini, telah beberapa kali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Tercatat kekerasan terjadi beberapa kali di sejumlah tempat, seperti di Gelogor kecamatan Sekotong Tengah, di dusun Beroro desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar, desa Sesela kecamatan Gunung Sari dan di dusun Mesanggok desa Gapuk kecamatan Gerung, semuanya di wilayah Kabupaten Lombok Barat.<sup>18</sup> Selain itu, sebelumnya, kekerasan juga terjadi terhadap pengikut aliran Wahabi di kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Beberapa penelitian di atas sebagian besar lebih banyak menyorot persoalan tentang konflik dan kurang mengkaji fakta-fakta penting berkaitan dengan integrasi sosial dan perdamaian. Khusus mengenai perdamaian, terdapat sejumlah penelitian, di antaranya penelitian berjudul “Keberagaman dan Problem Integrasi Pemuda (Studi Kasus pada *Peace Generation* di Yogyakarta)”.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya, Denis Setyo Ningrum menemukan empat pilar nilai-nilai penting sebagai perekat antarpemuda. Nilai-nilai tersebut meliputi pluralisme, nirkekerasan pemuda, partisipasi, dan persahabatan. Melalui *Peace Generation (Pisgen)*, para pemuda dari berbagai latar belakang kultur yang berbeda belajar saling memahami, menghargai, dan aktif mempromosikan perdamaian. Hanya saja, tampaknya komunitas perekat antargenerasi muda ini menghadapi sejumlah kendala dalam mengembangkan program-program mulianya. Menurut penelitian ini, masa depan *Pisgen* kurang bisa bertahan lama. Di antara problem yang dihadapi oleh asosiasi ini

---

<sup>18</sup>Faizah, *Dakwah Salafiyah di Lombok (Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya)*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010; 185.

<sup>19</sup>Denis Setyo Ningrum, *Keberagaman dan Problem Integrasi Pemuda (Studi Kasus di Komunitas Peace Generation Yogyakarta)* Diss. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

antara lain kurang bisa mengakomodasi kebutuhan para anggota dan rendahnya jaringan dengan asosiasi sejenis di daerah lain.

Masih berkaitan dengan *Peace Generation*, sebuah tesis yang ditulis oleh Hendra Lesmana juga meneliti subjek yang sama. Dalam penelitian bertajuk *Active Non-Violence Movement* (Studi Gerakan Wacana *Peace Generation* Yogyakarta Terhadap Kekerasan di Indonesia),<sup>20</sup> Hendra menemukan beberapa temuan di antaranya Pisgen mampu memberi ruang optimistik bagi terbentuknya nilai-nilai bina damai di kalangan para pemuda dan masyarakat. Memperkuat perspektif Gramscian, Hendra juga menyebut peran intelektual dalam menciptakan energi perubahan yang dimainkan oleh para aktivis *Peace Generation*. Catatan atas dua penelitian di atas keduanya hanya terfokus pada satu kelompok asosiasi dengan cakupan yang bersifat lokal dan terbatas pada satu komunitas.

Penelitian perdamaian dengan objek lebih luas dilakukan oleh tim Lakpesdam NU. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Prakarsa Perdamaian Pengalaman dari berbagai Konflik Sosial”.<sup>21</sup> Buku terbitan PP Lakpesdam NU bekerja sama dengan European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) komisi Eropa ini, mengelaborasi prakarsa perdamaian di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan di Jawa Barat. Dimulai dengan eksplorasi hal-hal yang bersinggungan dengan konflik dan kekerasan, selanjutnya buku ini mendeskripsikan *setting* geografis dan sosiologis masing-masing daerah. Temuan utama buku ini adalah soal sikap dan respons tokoh agama dan adat terhadap konflik kekerasan dan sikap mereka terhadap pluralitas. Sesuai judulnya, buku ini lebih banyak menyoroti aspek peran tokoh agama dan adat dalam upaya menciptakan prakarsa perdamaian.

Catatan menarik yang bisa diberikan atas beberapa penelitian di atas adalah bahwa sebagian besar penelitian belum memfokuskan kajian pada studi perdamaian yang dilakukan oleh segmen tertentu dalam masyarakat. Padahal, segmen tersebut memiliki andil dan

---

<sup>20</sup>Hendra Lesmana, *Active Non-Violence Movement* (Studi Gerakan Wacana *Peace Generation* Yogyakarta Terhadap Kekerasan di Indonesia), Tesis Prodi Agama dan Filsafat UIN Yogyakarta, 2015.

<sup>21</sup>Khmami Zada, *Prakarsa Perdamaian Pengalaman dari berbagai Konflik Sosial* (Jakarta: PP Lakpesdam NU & European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR), 2008).

sangat potensial mengembangkan prakarsa perdamaian di masyarakat. Segmen tersebut adalah generasi muda, terutama generasi muda lintas agama atau lintas iman.<sup>22</sup> Generasi atau kawula muda merupakan generasi potensial yang memiliki kreativitas tanpa batas dalam merawat kedamaian termasuk dalam aktivitas perdamaian sehari-hari (*everyday peace-building*).<sup>23</sup>

Bertolak dari penelusuran riset-riset sebelumnya, buku ini mencoba menggali secara lebih mendalam mengenai keterlibatan aktor lokal terutama kalangan pemuda dalam program bina damai. Program bina damai yang dimaksud adalah berbagai aktivitas yang digagas dan diselenggarakan para pemuda yang tergabung dalam berbagai asosiasi kepemudaan di tingkat lokal. Asosiasi-asosiasi tersebut ada yang bersifat keagamaan dan nonkeagamaan. Asosiasi pemuda berbasis keagamaan berlangsung di kalangan intra maupun antaragama atau lintas iman. Sedangkan contoh asosiasi kepemudaan yang tidak berbasis keagamaan antara lain forum kerukunan antaretnis, karang taruna, dan KNPI. Sebelum paparan lebih jauh mengenai hal ini, penting juga untuk ditelaah secara sekilas sejumlah teori yang berkaitan dengan konflik dan bina damai.

Bahasan tentang tema perdamaian kerap disandingkan dengan tema konflik. Mengkaji konsep perdamaian dan bina damai tidak bisa dilepaskan dengan kajian mengenai konflik dan resolusi konflik. Sejumlah pakar menyatakan bahwa penyandingan kajian mengenai konflik dengan perdamaian sama seperti kajian mengenai pengobatan dan penyakit. Artinya, untuk memperoleh resep yang jitu mengenai pengobatan seorang sarjana kedokteran terlebih dahulu harus mengenal ragam dan jenis penyakit. Demikian halnya dengan kajian tentang konflik diperlukan untuk dalam studi perdamaian.

Konflik merupakan kenyataan hidup yang bersifat *in bern omni present*, selalu hadir mengiringi relasi antarmanusia. Konflik merupakan

---

<sup>22</sup>Pelibatan agama dalam mengembangkan perdamaian dan resolusi konflik sangat penting karena agama memiliki nilai-nilai adiluhung yang mendorong umat manusia untuk senantiasa hidup damai dan aktif mengembangkan harmoni. Selengkapnya lihat Williem Vendley, "Kekuatan Agama-agama untuk Perdamaian" dalam Elza Peldi Taher, ed., *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), 698.

<sup>23</sup>T Helents Berents & Siobhan McEvoy-Levy (2015), *Theorising youth and everyday peace(building)*, *Peacebuilding*, 3:2, 115-125 diakses tanggal 05 Maret 2016.

sesuatu yang bersifat natural dan tidak perlu dihindari. Oleh karenanya yang diperlukan bukan menghindari konflik, melainkan kemampuan untuk menangani atau mengelola konflik menjadi energi positif bagi kemajuan masyarakat.

Untuk menangani konflik, Johan Galtung menawarkan tiga model yang saling terkait, yaitu; *peace keeping*, *peace building*, dan *peace making*. *Peace keeping* dilakukan ketika konflik benar-benar tak bisa dihentikan secara halus. Pelibatan aparat keamanan atau militer terpaksa ditempuh guna menghentikan konflik. *Peace making* adalah upaya negosiasi antara kelompok yang memiliki perbedaan pandangan dan kepentingan. *Peace building* merupakan strategi yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat konflik dengan jalan membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat.<sup>24</sup>

Untuk menangani konflik diperlukan upaya yang salah satunya dinamakan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik.<sup>25</sup> Ada empat tahapan dalam resolusi konflik yaitu (1) tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan. Militer atau aparat keamanan biasanya akan melakukan pekerjaan ini. (2) Tahap negosiasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai. (3) Tahap *problem solving approach* yang lebih bernuansa sosial. (4) Tahap *peace building*, yakni tahap yang bersifat kultural dan struktural. Memerlukan waktu yang panjang dan konsistensi untuk mewujudkan perdamaian yang permanen. Rothman menjabarkan ada empat komponen utama pada tahap *problem solving approach*<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse and Hugh Mial, *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2006), 10.

<sup>25</sup>Syafuan Rozi dkk., *Kekerasan Komunal: Anantomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 21 – 22. Dengan pengertian yang agak berbeda Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, penyebab, dan alternatif strategi penyelesaian. Lihat Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict* (New Haven: Yale University Press, 1973), 420.

<sup>26</sup>J. Rothman, *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992), 30.

*Pertama*, masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. *Kedua*, masing-masing pihak memberi informasi yang benar tentang konflik yang sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. *Ketiga*, kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya *signal-signal* menuju perdamaian. *Keempat*, *problem solving workshop* yakni kesediaan pihak-pihak untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik. Tujuan akhir (*ultimate goal*) dari semua tahapan ini tentu saja adanya kondisi damai di masyarakat.

Kondisi damai sering dimaknai secara beragam oleh banyak kalangan. Damai kerap diartikan sebagai kondisi yang jauh dari ketegangan, konflik dan perang. Sebagian yang lain menganggap kondisi damai bukan semata-mata bebas dari ketegangan dan perang, tetapi kondisi saling mengerti dan memahami serta memberi kesempatan yang lain mengaktualisasikan diri mereka masing-masing, dan yang terpenting adalah terjaminnya keadilan.<sup>27</sup> Perbedaan pendapat seperti di atas memunculkan dua istilah, yakni damai sejati atau damai positif dan damai palsu alias damai negatif.<sup>28</sup> Deskripsi selengkapnya tentang kedua istilah ini sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Konsep Damai<sup>29</sup>**

Keterangan	Damai Positif	Damai Negatif
Ciri-ciri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damai berlangsung jangka panjang</li> <li>• Bukan sekadar ketiadaan perang</li> <li>• Mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan empati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Damai sementara</li> <li>• Sekadar Ketiadaan perang</li> <li>• Menyimpan bibit permusuhan dan saling curiga</li> </ul>
Penekanan	Kerja sama dan dialog	

<sup>27</sup>David Cortright, *Peace: A History of Movements and Ideas* (New York: Cambridge University Press, 2008), 6-7.

<sup>28</sup>Lihat Irfan Abubakar, "Menuju Paradigma Peace Building Pascakonflik Kekerasan", *Jurnal Tashwirul Afkar*, No 22 (2007): 26-40.

<sup>29</sup>*Ibid*, 28.

Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan hubungan antarkelompok (asosiasi)</li> <li>• Dimulai dari bawah ke atas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memutus hubungan antarkelompok (disosiatif)</li> <li>• Dimulai dari atas ke bawah</li> </ul>
Organisasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit kecil</li> <li>• Otonom</li> <li>• Berorientasi pada keragaman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit besar</li> <li>• Pemusatan</li> <li>• Berorientasi penyeragaman</li> </ul>
Orientasi Kebijakan	Mengelola sebab-sebab kekerasan dan struktur	Menghapus kekerasan yang bersifat langsung
Implikasi	Menjamin damai dalam jangka panjang	Potensial terjadi kekerasan di masa depan

Konsep perdamaian yang hendak dilihat dalam buku ini adalah konsep perdamaian positif. Termasuk dalam kategori ini adalah semua aktivitas nirkekerasan yang ditujukan untuk menciptakan tertib dan harmoni sosial. Mahatma Gandhi adalah salah seorang tokoh dunia yang menyerukan pentingnya gerakan *nonviolent* dalam menuntut hak-hak sipil.<sup>30</sup> Seperti banyak diketahui, dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak sipil warga India, ia menolak melakukan cara-cara kekerasan. Model pendekatan *nonviolent* Gandhi tersebut kini telah banyak dikembangkan.<sup>31</sup> Tantangan terberat bagi para pegiat perdamaian adalah pentingnya mendorong masyarakat bersedia memahami perbedaan dan menyelesaikan berbagai pertentangan tanpa kekerasan fisik.<sup>32</sup> Konsepsi perdamaian (*peace*) mestilah dipahami sebagai sebuah proses yang terus-menerus yang tidak mengenal kata henti. David Cortright dalam bukunya tentang “*Peace*” secara eksplisit menyatakan “*The goal of peacemakers is to develop more effective ways of resolving disputes without violent conflict, to identify and transform the conditions that cause war*”.<sup>33</sup> Dengan demikian, tugas utama para pegiat perdamaian adalah mengembangkan secara lebih

<sup>30</sup>David Cortright, *Peace: A History of Movements and Ideas* (New York: Cambridge University Press, 2008), 9.

<sup>31</sup>Paparan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dibaca di Robert J. Burrowes, *The Strategy of Nonviolent Defense: A Gandhian Approach*. SUNY Press, 1996.

<sup>32</sup>Cortright, *Peace: A History of Movements...*, 9.

<sup>33</sup>*Ibid*, 8.

efektif langkah-langkah penyelesaian sengketa tanpa menggunakan kekerasan.

Dapat pula dipahami bahwa kerja bina damai merupakan kerja kemanusiaan yang terus-menerus tanpa bergantung pada ada atau ketiadaan perang. Kalau pun telah berlangsung pertentangan, sengketa, konflik, dan bahkan perang, aktivis bina damai hendaknya mampu mengidentifikasi berbagai kondisi dan mentransformasikannya melalui cara-cara damai. Intinya program bina damai ini mengandaikan adanya kesediaan semua pihak untuk mentransformasikan konflik menjadi sesuatu yang konstruktif.

Mekanisme menjadikan konflik konstruktif antara lain sebagaimana direkomendasikan oleh Louis Kriesberg mencakup tiga hal. Louis Kriesberg dalam karyanya *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution*, sebagaimana dikutip oleh Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi menyatakan bahwa konflik dapat berlangsung dan berakhir secara destruktif maupun konstruktif. Konflik dapat berkembang ke arah konflik kekerasan yang susah dicarikan solusinya, dapat pula berkembang menjadi sesuatu yang positif dan konstruktif. Agar konflik dapat berlangsung dan berakhir secara konstruktif, Kriesberg merekomendasikan tiga mekanisme: mekanisme internal kelompok, mekanisme antarkelompok, dan mekanisme di luarnya (mekanisme ekstra).<sup>34</sup> Penjelasan lebih detail mengenai ketiga mekanisme tersebut beserta ilustrasi contoh kegiatan seperti tampak pada tabel berikut:

---

<sup>34</sup>Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, "Dari Riset Perang ke Riset Bina Damai" dalam Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011), 190.

**Tabel 1.2**  
**Mekanisme Resolusi Konflik dan Prakarsa Perdamaian**

Mekanisme Internal	Mekanisme Eksternal	Mekanisme Ekstra
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menenangkan umat masing-masing</li> <li>• Membendung isu untuk meredam kepanikan massa</li> <li>• Mengingatkan anggota keluarga atau komunitas untuk menahan diri</li> <li>• Menyosialisasikan ajaran agama tentang perlunya menjalin kerukunan</li> <li>• Membuat sanksi sosial terhadap yang melanggar</li> <li>• Meningkatkan efektivitas <i>awik-awik</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyawarah untuk menghentikan konflik</li> <li>• Mengkaji penyebab konflik</li> <li>• Melakukan negosiasi penyelesaian konflik</li> <li>• Mengadakan dialog dan kerja sama dengan perwakilan agama lain</li> <li>• Membuat kesepakatan agar tidak terjadi kerusuhan susulan</li> <li>• Melakukan komunikasi antartokoh pemuda</li> <li>• Menyusun kesepakatan atau peraturan yang belum diatur hukum positif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah mengambil sikap tegas berupa penghentian konflik</li> <li>• Memanggil pihak-pihak yang bersengketa (yang diwakili tuan guru dan tokoh Hindu)</li> <li>• Melakukan mediasi</li> <li>• Menangkap provokator, tetapi biasanya sulit dilakukan karena akan muncul perlawanan dari massa pendukung</li> </ul>

*\*Sumber:* hasil analisis penulis dengan menggunakan kerangka Louis Kriesberg

Para pemuda lintas agama dapat mengembangkan mekanisme internal dan eksternal. Pada mekanisme internal, komunikasi antaranggota asosiasi pemuda internal agama akan memungkinkan terbentuknya harmoni di antara mereka. Sedangkan pada mekanisme eksternal, para pemuda lintas agama atau lintas iman dapat saling berdialog dan mengembangkan saling pengertian. Berbagai rumor atau isu yang dihembuskan provokator dengan sendirinya akan tereliminasi melalui mekanisme eksternal ini.

Di tangan generasi muda prakarsa perdamaian sejatinya bisa lebih kreatif dan variatif. Berbagai program kemanusiaan untuk saling memahami dapat berlangsung secara baik karena menggunakan suara dan bahasa anak muda. Kreativitas prakarsa perdamaian dengan



demikian akan menjadi lebih dinamis dan mampu merangsang tumbuhnya partisipasi dari pemuda lainnya. Inilah asa baru bagi terbangunnya masyarakat yang mampu mengembangkan perdamaian sejati.

Buku tentang prakarsa perdamaian dari pemuda lintas agama ini merupakan penelitian yang menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>35</sup> Kedua jenis pendekatan ini secara sengaja akan dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang keterlibatan pemuda dalam bina damai. Beberapa data yang tidak dapat digali melalui teknik kuantitatif akan dilakukan melalui penelusuran kualitatif sehingga tidak hanya tabel persentase yang akan diperoleh, tetapi juga deskripsi mendalam atau lazim dikenal sebagai *thick description*.

*Setting* atau lokus yang menjadi kajian buku ini adalah Kota Mataram. Salah satu kota multikultur di wilayah Nusa Tenggara Barat. Adapun subjek penting yang akan menjadi informan kunci adalah para aktivis pemuda lintas agama di Mataram. Para aktivis ini tergabung dalam sejumlah organisasi kepemudaan lintas agama misalnya Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (AKAPELA), Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA NTB), Forum Remaja Lintas Iman (Foreli) NTB dan lain-lain. Selain para pemuda yang tergabung dalam asosiasi lintas agama, peneliti juga akan melibatkan informan dari aktivis pemuda internal umat beragama seperti yang diuraikan di bagian awal tulisan ini. Melalui kota kecil seperti ini, diharapkan dapat terungkap secara lebih mendalam mengenai relasi antarkomunitas berbeda etnis dan agama terutama kalangan muda dalam merespons lingkungan sosialnya.

Data-data dalam buku ini diambil melalui penyebaran angket, observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Angket terutama digunakan untuk data yang berasal dari representasi umat beragama. Hal-hal penting yang akan digali melalui teknik ini adalah informasi yang berkaitan dengan pandangan pemuda tentang konflik, perdamaian, dan program atau upaya-upaya bina damai (*peace building*) yang telah, sedang, dan akan mereka lakukan.

---

<sup>35</sup>Lihat selengkapnya R. Murray Thomas, *Blending Qualitatif and Quantitatif Research Methods in Theses and Dissertation* (California: Corwin Press, Inc A Sage Publications Company, 2003). Juga Julia Brannen, ed. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Vermont: Asghate Publishing Company, 1992).

Adapun teknik observasi merupakan strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan informan, partisipasi, dan observasi langsung serta introspeksi. Melalui teknik ini, penulis secara *emik* (ikut terlibat bersama informan) mengamati, mengikuti, beberapa aktivitas penting yang dilakukan para pemuda lintas agama dalam menyelesaikan dan mengelola konflik. Teknik ini sengaja dipilih untuk melengkapi informasi yang belum dapat terungkap melalui teknik penggalan data yang pertama, yakni penyebaran angket.

Teknik berikutnya adalah wawancara mendalam (*In-depth interview*). Banyak hal yang dapat diperoleh dari informan lewat cara ini (wawancara mendalam)<sup>36</sup>. Teknik wawancara takterstruktur merupakan teknik wawancara yang dipilih dalam buku ini. Teknik pengumpulan data dengan wawancara takterstruktur menurut Dedy Mulyana<sup>37</sup> relevan dengan digunakan karena memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan diri dan lingkungannya atau untuk menggunakan istilah-istilahnya sendiri berdasarkan kultur dan tradisi yang mereka anut. Sebagian besar wawancara menggunakan *tape recorder* atas seizin informan. Cara ini diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam mengutip setiap pernyataan yang disampaikan informan. Wawancara akan dilakukan terhadap aktivis pemuda Muslim, Kristen, Hindu, dan Budha di Kota Mataram.

Selain, penyebaran angket, observasi, juga digunakan studi dokumentasi. Menurut Schazman dan Strauss sebagaimana dikutip Mulyana,<sup>38</sup> dokumen merupakan bahan yang penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen diperlukan terutama untuk memperkaya landasan-landasan teoretis yang berkaitan dengan tema utama yang diusung buku ini. Oleh karena itu, lewat studi dokumentasi, dikumpulkan dan dianalisis sejumlah buku, jurnal, surat kabar terutama koran lokal seperti Lombok Post dan NTB Post atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan

---

<sup>36</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145-6 dan 231-2

<sup>37</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 183.

<sup>38</sup>Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 195.

keberadaan dan perkembangan prakarsa perdamaian oleh generasi muda lintas agama.

Adapun teknik analisis data yang digunakan mengikuti tiga tahap analisis data, yaitu reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berikut ini sedikit penjelasan operasionalnya. *Pertama*, reduksi data, yakni data atau informasi yang ada dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dilakukan pengelompokan data menjadi dua kategori data, yaitu data yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemuda lintas agama dalam mempromosikan perdamaian dan data yang berkaitan dengan pandangan dan testimoni umat mengenai konflik, kekerasan dan perdamaian.

*Kedua*, penyajian (*display*) data. Setelah data direduksi, tersusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan jenis dan polanya, selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi-narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian.

*Ketiga*, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Setelah melewati tahap pertama dan kedua, selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Setelah mendapatkan kesimpulan, langkah selanjutnya adalah verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara mencari data baru yang lebih mendalam untuk mendukung kesimpulan yang sudah didapatkannya. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian ini.<sup>39</sup>]

---

<sup>39</sup>Penjelasan secara lebih rinci atas metode ini silahkan baca Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 172 -182.

## 2. KONFLIK, KEKERASAN SOSIAL, DAN *PEACEBUILDING*

MELENGKAPI kajian teoretik yang ada pada bagian sebelumnya, bab ini berisi penjelasan tentang konsep konflik, kekerasan sosial, dan bina damai (*peacebuilding*). Beberapa istilah kunci ini penting dielaborasi secara lebih dalam untuk mempertajam analisis mengenai upaya-upaya resolusi konflik dan bina damai yang dilakukan generasi muda. Keterlibatan generasi muda dalam program bina damai juga ditelaah secara lebih kritis, mengingat selama ini aktivitas mereka kurang banyak diperhatikan. Bagian ini juga dilengkapi dengan telaah mengenai masih banyaknya konflik kekerasan, sekalipun lembaga peduli perdamaian telah banyak bermunculan di negeri ini.

### **A. Konflik dan Kekerasan Sosial**

Sebagian orang kerap menyamakan istilah konflik dengan kekerasan. Padahal, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Konflik merupakan fakta sosial yang selalu ada mengiringi relasi antarindividu yang wujudnya tidak selalu dalam bentuk kekerasan. Kekerasan hanyalah salah satu bentuk konflik yang bertransformasi menjadi sebuah kondisi yang bersifat destruktif. Johan Galtung (2005) secara jelas mendeskripsikan sebagai berikut.

*“Conflict is a complex human phenomenon and should by no means be confused with violence”. Violence is to harm and hurt the body, mind and/or spirit of someone, including Self;*

*by verbal and/or physical means (including body language). Violence leaves behind trauma, those traces, very difficult to remove, often indelible of the violence, on body, mind and spirit. Violence as an expression of contempt and hatred, "lack of respect" to put it mildly, and to be violated is an experience of humiliation. The harm and hurt on the mind and the spirit may leave the most important trauma."*

Jadi, menurut Galtung, konflik merupakan fenomena manusia yang kompleks. Konflik tidak harus diidentikkan dengan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan membahayakan dan menyakiti tubuh, pikiran, dan atau kejiwaan seseorang, termasuk pada diri sendiri, baik secara verbal maupun psikis (termasuk melalui bahasa tubuh). Dampaknya, kekerasan meninggalkan trauma yang tak mudah untuk dihilangkan, dan sering memunculkan kekerasan berikutnya bagi tubuh, pikiran dan jiwa. Kekerasan sebagai sebuah ekspresi penghinaan dan kebencian, kurangnya rasa hormat merupakan sebuah pengalaman yang merendahkan. Tindakan menyakiti pikiran dan kejiwaan sangat mungkin meninggalkan trauma psikis yang mendalam.

Kekerasan bisa dilakukan oleh institusi resmi negara, kelompok masyarakat, maupun individu atau perorangan. Dari kekerasan antarindividu dapat berkembang menjadi kekerasan komunal apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Di masyarakat dengan tingkat komunalisme yang masih tinggi seperti di negeri ini, kekerasan antarpersonal tidak jarang berkembang menjadi kekerasan sosial yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Korban dan pelaku kekerasan takmemandang jenis kelamin, latar belakang sosial, politik, ekonomi, agama, budaya, dan usia termasuk usia remaja atau kawula muda.

Berkaitan dengan topik utama buku ini, kelompok usia remaja atau pemuda merupakan kelompok rentan terlibat dalam kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban kekerasan. Dalam satu dekade terakhir, misalnya, banyak terekspos berbagai tindak kekerasan di kalangan remaja. Daftar kekerasan sangat panjang, membentang dari persoalan kekerasan di jalan hingga di dalam institusi pendidikan. Dari kasus *bullying* hingga tawuran antarpelajar. Beberapa kasus kekerasan yang melibatkan pemuda yang terekspos media massa antara lain tragedi Monas (Juni 2008), kekerasan Genk Nero dan Genk Motor (2008), tragedi Ternanggung (Februari 2011), tragedi Koja (April 2010), tragedi Ampera (September, 2010), tawuran

pelajar di Yogyakarta (April 2011), bentrokan dua kelompok pemuda di Bandung (Juni 2011), dan tragedi Uaga, Papua (Agustus 2011), dan tragedi kekerasan laten yang tersulut kembali di kota Ambon (September 2011).<sup>1</sup>

Data di atas masih terus bertambah dengan berbagai aksi kekerasan lain seperti perkelahian antarremaja, tawuran antarpelajar, dan perkelahian di kalangan mahasiswa. Termasuk sejumlah kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa di perguruan tinggi seperti di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau yang kini berubah nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)<sup>2</sup> dan yang terbaru adalah kasus meninggalnya 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) setelah mengikuti Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Mahasiswa Pecinta Alam.<sup>3</sup>

Data-data kekerasan tersebut hanya sebagian data di kota-kota besar yang terpublikasi melalui media massa. Data ini belum termasuk berbagai konflik kekerasan yang mengiringi proses-proses politik seperti pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan calon kepala daerah. Berbagai cerita kelam kekerasan tersebut juga belum termasuk kekerasan yang sering muncul di kampung-kampung atau di desa-desa seperti perkelahian antarpemuda saat ada pertunjukan musik, pertandingan olah raga, dan aneka aktivitas lain yang melibatkan kerumunan massa.

Muncul pertanyaan, mengapa kekerasan seolah menjadi menu rutin di kalangan remaja atau generasi pemuda? Apakah ini semua akibat proses psikologis mereka yang masih labil atau ada faktor lain? Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk dibaca tulisan Mohammad Zoelfan Tadjoeddin, yang dikutip oleh Dian Yanuardy berikut ini.

*“... routine violence may be a consequence of growth and globalization... it tends to occur spontaneously and sporadically without being led by any organized gang. It also does not lead to capture of any one’s possession... In general, routine violence can*

<sup>1</sup>B. J. Sujibto, “Spirit Peacebuilding Melalui Komunitas Pemuda di Yogyakarta.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10.1 (2016).

<sup>2</sup>Selengkapnya lihat “10 Kasus Kematian Akibat Plonco Ospek Maut “ di <http://news.okezone.com/read/2015/08/04/65/> (diakses tanggal 25 Januari 2017).

<sup>3</sup><https://m.tempo.co/read/news/2017/01/25/078839608/mahasiswa-iii-tewas-lpsk-kekerasan-harus-diproses-hukum> (diakses tanggal 27 Januari 2017).

*be a manifestation of frustration by the lower socio-economic segment of society rather than the greed of those involved”<sup>4</sup>*

Tadjoeddin melihat kekerasan rutin yang umumnya dilakukan kalangan remaja ini merupakan konsekuensi dari pertumbuhan dan globalisasi. Secara umum kekerasan rutin tersebut dapat dipandang sebagai manifestasi rasa frustrasi dari sekelompok masyarakat yang secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kekerasan rutin juga merefleksikan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, penyebab lain timbulnya kekerasan rutin antara lain karena keterbatasan penyediaan sumber-sumber ekonomi akibat masih adanya berbagai ketimpangan dan ketidakadilan sosial.<sup>6</sup> Semua faktor ini berkelindan sehingga kelompok sosial yang merasa kurang beruntung memerlukan kanalisasi. Sayangnya, salah satu bentuk kanalisasinya adalah dengan kekerasan.

Dari penjelasan di atas, apa pun motif, ragam maupun bentuk kekerasan, yang jelas perhatian terhadap perlunya mengembangkan konsep pembangunan yang menghilangkan kekerasan merupakan hal mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bila hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan negeri ini akan kehilangan generasi potensialnya dalam beberapa tahun yang akan datang. Namun, sebelum kajian mendalam mengenai konsep pembangunan berbasis perdamaian, kita perlu menelaah secara sekilas kajian tentang bina damai (*peacebuilding*).

## **B. Bina Damai (*Peacebuilding*)**

Seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, bina damai (*peacebuilding*) merupakan rangkaian program resolusi konflik setelah program *peacekeeping* dan *peacemaking* dijalankan. Untuk menyegarkan bacaan kita, berikut ulasan singkat mengenai hal ini.

---

<sup>4</sup>Dian Yanuardy, *How “Routine” is Routine Violence? Memahami Proses-proses yang Kompleks dari Kekerasan Rutin* dalam Amien Tohari dkk., *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), 61-62.

<sup>5</sup>Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, (2008). “Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia”. Microcon Research Working Paper 7, July 2008.

<sup>6</sup>Dian Yanuardy, “Kompleksitas dari Kekerasan Rutin Antar Pemuda di Ternate, Maluku Utara”, *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 2, No. 2, (2013): 129-142.

*Peacekeeping* merupakan upaya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya dari aparat keamanan atau militer. Tujuannya adalah untuk menghentikan konflik kekerasan agar tidak berlarut-larut dan mengurangi seminimal mungkin korban jiwa. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan memisahkan pihak-pihak yang bertikai, menolong korban dan memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk berdamai. Gencatan senjata adalah salah satu kegiatan dari *peacekeeping*. Selain melalui cara-cara militeristik dan keamanan, *peacekeeping* juga dilakukan dengan cara-cara lain yang memungkinkan pertikaian atau perang terhenti. Dalam kasus hubungan internasional, Indonesia sering terlibat aktif mengirimkan pasukan militer untuk bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di negara-negara yang terlibat konflik dan peperangan.

*Peacemaking* merupakan upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan mengajak pihak-pihak yang bersengketa atau bertikai bersedia melakukan dialog. Aktivitas diplomatik ini dilakukan tanpa kekerasan untuk mengurai berbagai persoalan penyebab sengketa dan apabila dimungkinkan didorong mencapai kesepakatan damai. Di dalam aktivitas *peacekeeping* ini, proses mediasi merupakan strategi yang dilakukan agar para pihak bersedia berunding mencari solusi pemecahan masalah.

Adapun *peacebuilding* merupakan tahap berikutnya apabila tahap pertama dan kedua telah membuahkan hasil. Artinya, program bina damai ini dilakukan apabila konflik kekerasan telah terhenti. Setelah konflik kekerasan terhenti dan semua pihak telah menyepakati perdamaian, selanjutnya semua komponen didorong mengembangkan integrasi dan harmoni sosial secara lebih luas.

Aktor *peacebuilding* tidak hanya lembaga resmi negara, melainkan seluruh agen *civil society* seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang bergerak di bidang HAM dan pemberdayaan masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, kelompok komunitas pemuda dan sebagainya.

*“Common definitions associate peacebuilding with efforts that follow peacekeeping and peacemaking to strengthen the relations and positive patterns of engagement between individuals and groups. As such, peacebuilding might be described as encompassing efforts at unity-building, reconciliation, rela-*



*tionship-building and establishing greater social cohesion. Such efforts typically engage all forms of social institutions and networks, and have ramifications for the political, social, cultural, religious, economic, and legal spheres, as well as for change at the level of individual mindsets and worldviews. Given the grand scope of peacebuilding, it should not be conceived as a mechanistic or short process. In order to be successful, peacebuilding must be viewed as a long and complex process that times time and draws on a wide range of human capacities”.*<sup>7</sup>

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa *peacebuilding* (bina damai) menyangkut kegiatan penguatan relasi antarwarga, antarindividu, antarkelompok sehingga tercapai hubungan dan ikatan antarwarga secara positif. Tujuannya, selain kedamaian dan harmoni, diharapkan semua pihak dapat mengantisipasi agar konflik kekerasan tidak berulang kembali. Seperti dimafhumi, ketika konflik berakhir bukan berarti tidak ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh. Sebagian kelompok yang dalam kajian resolusi konflik kerap disebut *spoiler* kerap mengganggu proses perdamaian. Motif para *spoiler* ini beragam, mulai dari yang sepele atau sederhana hingga yang kompleks. Motif sederhana misalnya ketidaksetujuan dengan poin-poin tertentu dalam nota perdamaian hingga motif menjaga agar konflik terus berlanjut. Konflik harus berlanjut dikarenakan para *spoiler* tersebut tetap dapat memperoleh keuntungan dari situasi konflik yang ada, baik untuk tujuan politis maupun alasan ekonomis.

Di level internasional, program bina damai meliputi banyak dimensi yang mencakup berbagai upaya penghentian konflik kekerasan, perang, pertikaian, dan program-program penanggulangan konflik agar tak terulang kembali. Pada prinsipnya *peacebuilding* dimaksudkan untuk mengurangi kekerasan baik kekerasan langsung, kekerasan struktural, maupun kekerasan budaya. Termasuk dalam aktivitas *peacebuilding* adalah kegiatan menghilangkan trauma (*trauma healing*) pascakonflik berlangsung.

*“Peacebuilding is multidimensional and it includes the full range of activities from post-war reconstruction to preventive measures. Peacebuilding encompasses all activities which aim to eliminate or mitigate direct, structural and cultural violence. Peace-*

---

<sup>7</sup>Danesh, Roshan. “Youth and Peacebuilding.” *Encyclopedia of Peace Education*. Charlotte: Information Age Publishing. Retrieved October 21 (2008): 1-5.

*building and conflict transformation can only be possible if diverse needs, interests and expectations are addressed, and if sincere and future-oriented processes of healing and reconciliation take place.*

Menarik untuk dicatat bahwa aktivitas atau program bina damai (*peacebuilding*) berkait erat dengan upaya mewujudkan perdamaian yang integral. Perdamaian integral meliputi kondisi damai yang tidak didefinisikan semata-mata sebagai ketiadaan kekerasan dan perang,<sup>8</sup> melainkan sebuah kondisi di mana keadilan dapat ditegakkan, hak asasi manusia dihormati, dan masyarakat bebas dari diskriminasi.

Sebagaimana diungkap oleh John Paul Lederach, pengertian *peacebuilding* dipahami sebagai suatu proses dan pendekatan terus-menerus yang meliputi dan memperkuat aspek-aspek psikologis, spiritual, sosial, ekonomi, dan politik yang meminimalisasi kekerasan langsung (*direct violence*) ataupun struktural (*structural violence*). Di sini, Lederach menekankan bahwa proses transformasi konflik merupakan program menyeluruh dan komprehensif. Dalam bukunya "*A Handbook of International Peacebuilding: Into The Eye Of The Storm*", Lederach memberikan penjelasan komprehensif bahwa *peacebuilding* "*is more than post-agreement reconstruction*" and "*is understood as comprehensive concept that encompasses, generates, and sustains the full array of processes, approaches, and stages in time or a condition. It is a dynamic social construct*".<sup>9</sup>

Berbagai kegiatan *peacebuilding* di atas sebagian besar bergerak di level internasional. Sebagai upaya normalisasi pascakonflik, sejatinya *peacebuilding* dapat dilaksanakan di berbagai level; mulai level internasional hingga level lokal. Murithi menyebut tiga level *peacebuilding*: (1) *macro level peacebuilding* (international peacebuilding), (2) *meso-level peacebuilding*, dan (3) *local and grassroots peacebuilding*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Seperti diketahui sebagian orang mendefinisikan perdamaian sebagai damai "negatif" dan "positif". Pengertian pertama merujuk pada tidak adanya perang atau konflik kekerasan. Sedangkan pengertian kedua, damai positif, merujuk pada suasana sejahtera, berlangsungnya kebebasan dan terjaminnya keadilan. Lebih jauh mengenai penjelasan arti damai silakan lihat Betty A. Reardon, *Comprehensive Peace Education; Education for Global Responsibility* (New York, Columbia University: Teacher College Press, 1988), 11-38.

<sup>9</sup>Penjelasan lebih lengkap mengenai hal ini dapat dibaca di <http://www.peacebuildinginitiative.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=1764>.

<sup>10</sup>Lihat Tim Murthi, *The Ethics of Peacebuilding* (Edinburg: Edinburg

Untuk level yang disebut terakhir, level lokal atau *grassroots level*, kegiatan bina damai dapat dilakukan oleh warga masyarakat atau komunitas tertentu termasuk kelompok pemuda. Prakarsa perdamaian sebagai bagian dari *peacebuilding* akan sangat bergantung pada aktor-aktor lokal untuk mengimplementasikannya secara terus menerus. Tanpa keterlibatan aktor-aktor lokal, program bina damai tampaknya sulit dijamin keberlangsungannya. Dukungan pemerintah dan semua pihak sangat diperlukan. Selain untuk mencegah munculnya konflik kekerasan yang berulang di berbagai daerah, program bina damai akan membantu pemerintah mewujudkan integrasi dan harmoni sosial secara lebih luas. Salah satu segmen masyarakat yang sejatinya merupakan segmen penting dalam program bina damai, tetapi luput dari perhatian pemerintah adalah generasi muda.

### C. Generasi Muda dan Gerakan Bina Damai

Melakukan kajian mengenai keterlibatan generasi muda dalam resolusi konflik dan upaya bina damai bukanlah perkara gampang. Setidaknya ada beberapa hal mengapa kajian seperti ini tidak mudah. Pertama, kegiatan bina damai yang dilakukan generasi muda kurang terdokumentasi secara baik. Kedua, masih kuatnya paradigma yang melihat kelompok remaja atau pemuda hanya sebatas korban konflik. Ketiga, masih munculnya stigma negatif terhadap remaja bahwa mereka masih belum sepenuhnya siap terlibat dalam program bina damai. Bahkan, sebagian orang berpendapat pemuda justru menjadi biang konflik, kerusuhan dan sejenisnya.

Pemuda sebagaimana kelompok masyarakat yang lain seperti anak-anak dan wanita merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Mereka kerap menjadi korban dari serangkaian konflik kekerasan, baik kekerasan langsung, budaya, maupun kekerasan struktural. Kenyataan tersebut sebagaimana dicatat oleh Siobhán McEvoy-Levy, *“Young people (and women) tend to be the shock absorbers of social change and are profoundly affected by the different forms of violence -direct, cultural and structural (Galtung 1969)- that persist and evolve in the post-accord period”*.<sup>11</sup>

---

University Press 1990), 7-8.

<sup>11</sup>Siobhán McEvoy-Levy, “Youth as Social and Political Agents: Issues in Post-Settlement Peace Building”, Kroc Institute Occasional Paper #21:OP:2 December 2001. Lihat juga McEvoy-Levy, Siobhán. “Children, youth and peacebuilding.” *Critical*

Kalangan remaja sebagai korban konflik kekerasan di berbagai belahan dunia tersebut masih ditambah dengan stigma negatif yang mereka terima. Remaja dianggap belum banyak berperan dalam kegiatan bina damai. Pandangan umum yang mengemuka, anak-anak korban konflik punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan yang sama saat mereka menginjak remaja dan dewasa. Levy secara rinci mencatat beberapa pandangan yang umum mengenai remaja dalam situasi konflik kekerasan dan perang.

1. *Youth have in many cases been active agents during armed struggle and their agency creates special and diverse needs in the post-war period.*
2. *Youth are often the primary producers of violence in the post-accord period – from political dissident violence to crime - and they are intrinsic to the success of new law and order measures*
3. *Youth are also the victims of much post-accord violence – direct assaults and displacement as well as structural violence - which while it may not fatally impact the peace process will shape attitudes and behavior over the long-term.*<sup>12</sup>

Pandangan semacam ini menyebabkan kalangan remaja atau pemuda kerap dipandang sebelah mata dalam program bina damai. Lebih lanjut, Siobhán McEvoy-Levy menyatakan, “*Youth are underestimated as positive agents of change and key actors in peace-building, both by policy-makers and academics*”.<sup>13</sup>

Akibat dari kurang diperhatikan potensi yang dimiliki remaja ini, banyak kebijakan pemerintah tidak melibatkan remaja dalam program bina damai. Sebagian besar pengambil kebijakan (*policy makers*) lebih tertarik memandang kelompok remaja sebagai sebuah persoalan daripada potensi penting dalam kerja bina damai.. Citra negatif yang dimiliki remaja seperti *trouble makers*, pembuat onar, dan pembuat kegaduhan merupakan sebagian stigma negatif yang disandang kelompok remaja.

---

*Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice and Pedagogy* (2011): 159-176.

<sup>12</sup>Siobhán McEvoy-Levy, “Youth as Social and Political Agents: Issues in Post-Settlement Peace Building”, Kroc Institute Occasional Paper #21:OP:2 December (2001): 8-16.

<sup>13</sup>Celina Del Felice and Andria Wisler “The Unexplored Power and Potential of Youth as Peace-builders” *Journal of Peace Conflict & Development* Issue 11 (2007)

Padahal, sebagaimana kita ketahui tidak semua remaja akibat korban konflik atau mereka yang bergaul dengan kelompok korban konflik memiliki kecenderungan yang sama, membuat konflik kekerasan. Sebagian justru tergugah untuk mengembangkan program bina damai, menghilangkan trauma psikis, dan aktif mengampanyekan perlunya perdamaian. Sebagian remaja bahkan terlibat aktif dalam komunitas membangun saling pengertian dan mencoba memahami berbagai perbedaan. Semua mereka lakukan, selain untuk mengobati luka dan menghapus dendam juga sebagai upaya serius merajut harmoni di antara sesama. Paparan berikut berisi pengalaman berharga atau *best practices* berkaitan dengan *peacebuilding* yang dikembangkan oleh kelompok remaja atau pemuda.

Sujibto dalam penelitiannya melaporkan beberapa kegiatan menarik yang dilakukan komunitas *Peace Generation* (PisGen) di Yogyakarta. Kelompok yang semua pengurus dan anggotanya ini terdiri dari anak-anak muda secara kreatif melakukan gerakan bina damai sebagai berikut.

1. *Service for Selves*. *Service for selves* merupakan salah satu kegiatan khas yang dikembangkan oleh komunitas PisGen. Melalui aktivitas seperti *gathering*, *training*, diskusi, dan kegiatan-kegiatan sejenis, *service for selves* dirancang untuk meningkatkan kapasitas anggota dan calon anggota. “Cara seperti ini dilakukan PisGen untuk mempersiapkan aktor-aktor perdamaian (*peacemakers*) yang mempunyai kemampuan dan *skill* dalam memfasilitasi suatu kegiatan sosial, menjadi partisipator aktif di lingkungan sosial, menjadi *social conductor* untuk kegiatan sosial dengan membawa nilai-nilai perdamaian dengan cara nir-kekerasan”.
2. *Service for Others*. Kegiatan berikutnya setelah kultur perdamaian telah terbangun di kalangan anggota adalah pelayanan untuk orang lain (*service for others*). “Program ini menjadi media *peacebuilding* yang bertujuan untuk menyebarkan pendidikan perdamaian untuk pemuda”. Yang menarik dari kegiatan ini adalah konsep memperlakukan pemuda atau orang lain sebagai subjek bukan semata objek. Mereka diajak secara bersama-sama

mengembangkan prinsip-prinsip perdamaian dalam pergaulan sehari-hari. Memilih cara-cara nirkekerasan dalam mengatasi konflik.

3. *Peace Camp*. Program kemah perdamaian merupakan gabungan antara program pertama dan kedua. "*Peace camp* adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan regenerasi anggota PisGen ke depan. Hingga tahun 2011, acara ini sudah berjalan selama 7 kali dan mempunyai keserupaan konsep, yaitu "*ngecamp*" di suatu tempat terfokus dan jauh dari keramaian. Melalui kegiatan kemah seperti ini, kedekatan antara anggota lama dan baru dapat terjalin secara lebih kuat. Kekuatan persahabatan antara peserta kemah akan menjadi modal yang baik bagi mereka untuk mengimplementasikan nilai-nilai perdamaian, persahabatan, dan kekeluargaan di kehidupan sehari-hari sekaligus memperkuat jejaring antar aktor perdamaian.<sup>14</sup>

Sebagian besar kegiatan yang dilakukan anak-anak muda Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas *peace generation* di atas berkaitan dengan penyadaran prinsip-prinsip perdamaian di kalangan remaja. Lembaga yang lain bergerak di bidang kontraradikalisme. Sebagaimana diketahui, fenomena radikalisme keagamaan yang tak jarang dibarengi dengan aktivitas teror sangat meresahkan masyarakat. Unsur kekerasan sangat kental mengiringi kelompok-kelompok garis keras tersebut.

Untuk mengurangi dan menangkal dampak radikalisme keagamaan, banyak pesantren telah mengembangkan program bina damai. Dalam upaya menangkal gerakan radikalisme dan terorisme pesantren terlibat aktif membentengi santri dari ideologi radikal.<sup>15</sup> Salah satu pesantren yang terlibat aktif adalah pesantren Al-Qadir Magelang Jawa Tengah. Melalui peran penting kiai dalam membangun dialog partisipatif dengan masyarakat luar pesantren dengan aksi-aksi sosialnya, Pesantren ini mampu merumuskan strategi kontraradikalisme.<sup>16</sup> Pesantren-pesantren yang melakukan

---

<sup>14</sup>Sujibto, "Spirit Peacebuilding.

<sup>15</sup>Rahman Mantu., "Bina-Damai dalam Komunitas Pesantren: Sebuah Upaya Counter-Radikalisme." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23.1 (2015): 131-150.

<sup>16</sup>*Ibid.*

hal demikian sangat banyak jumlahnya. Banyaknya pesantren yang terlibat dalam program kontraradikalisme dan aktif mengembangkan budaya damai merupakan salah satu bukti bahwa lembaga pendidikan informal umat Muslim sebagai agen-agen bina damai.

Di samping aktivitas praktis promosi perdamaian, sejumlah lembaga juga telah mengembangkan kajian bina damai secara lebih terstruktur, salah satunya Yayasan Paramadina. Melalui Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, lembaga ini terus berusaha memperkuat toleransi dan bina damai, baik intra maupun antaragama. Salah satu program penguatan kapasitas toleransi dan bina damai yang dikembangkan adalah Sekolah Agama dan Bina Damai (SABDA). Menurut para pengelolanya, “Sekolah ini mengajarkan materi-materi tentang sejarah dan ajaran bina damai agama-agama, agama lokal, manajemen dan resolusi konflik, agama dan bina damai, pemolisian konflik keagamaan di Indonesia, pemberdayaan masyarakat untuk kerukunan, peraturan dan undang-undang kehidupan keagamaan di Indonesia”.<sup>17</sup>

Hingga saat ini, telah berdiri lembaga-lembaga yang bergerak di bidang resolusi konflik dan promosi perdamaian, termasuk dari kalangan perguruan tinggi. Banyak kampus di Yogyakarta, Bandung, Semarang, Jakarta, Surabaya, maupun kampus-kampus besar lainnya di luar pulau Jawa telah memiliki kepedulian pada upaya resolusi konflik dan sosialisasi bina damai nirkekerasan. Menyebut di antaranya adalah Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Lembaga ini aktif menyelenggarakan program Pelatihan Dasar Penanganan Konflik. Dalam situsnya, secara jelas tertulis, “Program ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengertian dan pemahaman dasar konflik, cara-cara menganalisa

---

<sup>17</sup>Kegiatan perdana SABDA dilangsung pada awal Juni 2015. PUSAD Paramadina bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta membuka kelas SABDA bagi anggota majelis-majelis agama di DKI Jakarta, mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Keuskupan Agung Jakarta (KAJ), Parisada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al Washliyah, Mathlaul Anwar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Lembaga Dewan Dakwah Indonesia (LDII). Kegiatan berlangsung selama lima hari, Dikutip dari laman <http://paramadina.or.id/2015/11/20/sekolah-agama-bina-damai-ii-mengelola-konflik-dengan-damai/> diakses tanggal 22 desember 2016.

konflik, dan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan ketika berhadapan dengan situasi yang terkait dengan konflik".<sup>18</sup> Bahkan, di UGM juga telah dibuka Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK).<sup>19</sup>

Demikian halnya dengan sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) yang telah terlibat lama dalam kegiatan mediasi konflik dan bina damai. Beberapa kampus itu antara lain di UIN Walisongo Semarang terdapat Walisongo Mediation Center (WMC), di UIN Ar Raniry Aceh telah berdiri CCRPS di IAIN Pontianak terdapat CAIREU dan di IAIN Mataram telah berdiri Mataram Mediation Center (MMC) sejak tahun 2006. Pusat-pusat kajian di perguruan tinggi tersebut telah banyak mengembangkan riset, Training, serta advokasi di bidang resolusi konflik dan bina damai.

Pusat studi lain yang aktif dalam bidang promosi perdamaian adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dan *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC). Kedua institusi ini berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lembaga pertama aktif di bidang penelitian, pelatihan dan publikasi. Kegiatan terbaru yang sedang dijalankan PPIM antara lain *Counter Violence Extremism* (CVE). Sedangkan kegiatan CSRC yang berkaitan dengan *peacebuilding* antara lain program *Pesantren for Peace*<sup>20</sup>.

Program sekolah perdamaian yang dijalankan yayasan Paramadina dan lembaga-lembaga lain yang memiliki program serupa merupakan hal strategis dalam mengawal kegiatan program bina damai. Program bina damai hendaknya dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia. Munculnya tindak kekerasan dan amuk massa oleh sebagian kelompok disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak pihak mengambil jalan pintas dalam menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya. Hal ini sering diperparah dengan

---

<sup>18</sup><http://csps.ugm.ac.id/pelatihan/pelatihan-penanganan-konflik-dasar/> dikutip tanggal 6 Januari 2017.

<sup>19</sup><http://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/prodi/id/18> dikutip tanggal 7 Januari 2017.

<sup>20</sup>Lebih lengkap mengenai ragam aktivitas dan program yang ditawarkan oleh pesantren for peace, silakan kunjungi <http://pesantrenforpeace.com/publikasi/berita/item/247-csrc-uin-jakarta-pesantren-strategis-memasyarakatkan-ham.html>



belum efektifnya penegakan hukum di masyarakat. Aparat penegak hukum masih kerap melakukan diskriminasi alias tebang pilih yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap institusi resmi ini. Kasus-kasus main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kejahatan adalah sebagian contoh kasat mata tentang rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

#### **D. Tantangan Program *Peacebuilding* di Indonesia**

Dari paparan di atas, terlihat bahwa aktivitas atau program *peacebuliding* telah banyak dilakukan di negeri ini. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan oleh agen-agen *civil society* seperti NGO, Perguruan tinggi, pondok pesantren, kelompok komunitas perdamaian. Lembaga-lembaga ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, dan kesadaran hak-hak asasi manusia. Namun, tampaknya program-program bina damai tersebut belum memberi pengaruh signifikan bagi upaya merajut harmoni di masyarakat. Berbagai konflik kekerasan masih terus saja terjadi. Dari berbagai penelusuran sejumlah literatur, terutama sumber-sumber yang ditulis oleh para pegiat perdamaian, didapati sejumlah tantangan belum efektifnya kegiatan *peacebuilding*. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Amin Tohari dan kawan-kawan. Dalam buku yang berjudul *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia* disebutkan sejumlah tantangan mengapa konflik di Indonesia masih terus berlangsung, meskipun banyak institusi sosial yang bergerak dibidang *peacebuilding*.

*Pertama*, masih tingginya eskalasi konflik dalam banyak hal didorong oleh “akumulasi dengan penjarahan” (*accumulation by dispossession*) yang dilakukan oleh kekuatan kapital. Seperti dicatat oleh Amin Tohari dkk, “...cara bagaimana kapital terus berakumulasi tersebut pada gilirannya menyebabkan terjadinya konflik sumber daya alam dan konflik ekonomi, bahkan di ruang-ruang perkotaan sekalipun. Namun, dalam kasus-kasus konflik sumber daya alam dan konflik ekonomi, akumulasi dengan penjarahan bekerja secara langsung, dalam pengertian ia langsung mereproduksi kekerasan dan konflik”.

*Kedua*, masih kuatnya komunalisme di kalangan masyarakat dan sengaja dipelihara bahkan pada saat tertentu sengaja diperkuat dengan membangkitkan sentimen etnis dan agama. Dengan meminjam bahasa Amin Tohari dkk, peningkatan konflik juga diakibatkan

oleh semakin maraknya jaringan klientilisme, komunalisme, dan pengerahan identitas etnik dan agama yang nondemokratis dan cenderung pada kekerasan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktivitas klientilisme ini ditopang oleh suatu praktik “ekonomi gelap” dengan jalan menjarah sumber-sumber keuangan negara. Caranya dengan memanfaatkan jaringan patronase untuk kepentingan anggota jaringan tersebut. Untuk memperkuat klientilisme sejumlah cara dilakukan, misalnya, dengan memperkuat identitas komunal seperti identitas etnik, agama, dan kekerabatan.

*Ketiga*, lemahnya kapasitas institusional negara. Lemahnya kapasitas institusional negara dalam mencegah, mengelola dan mentransformasi konflik inilah mendorong peningkatan konflik. Kelemahan ini juga ditandai oleh masih banyaknya kebijakan-kebijakan negara yang diskriminatif dan abai terhadap kelompok-kelompok preman, geng-geng kriminal, dan kelompok lain yang meresahkan masyarakat.

*Keempat*, lemahnya kapasitas institusional masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah belum maksimalnya peran organisasi masyarakat sipil dalam mengajak masyarakat mengembangkan budaya kewargaan (*civic culture*). Kondisi seperti ini pada gilirannya juga ikut berpengaruh pada rendahnya tradisi dan budaya kewargaan yang demokratis.<sup>21</sup> Tidak heran bila kemudian apabila terjadi pertentangan dan konflik, masyarakat menyelesaikannya melalui cara-cara kekerasan.

Dari berbagai alasan di atas, wajar bila konflik dan kekerasan sosial masih sering terjadi meskipun banyak lembaga aktif dan peduli mempromosikan perdamaian. Kekuatan usaha yang dibangun oleh lembaga-lembaga pegiat perdamaian ini kalah kuat dibanding faktor eksternal yang melingkupi masyarakat.

Kondisi di atas ditambah dengan belum adanya pola manajemen konflik secara komprehensif. Penangan konflik masih sebatas penghentian konflik. Dalam menangani konflik, program yang dikembangkan pemerintah sebagian besar berhenti pada tahap *peacekeeping* dan *peacemaking*, belum mengarah pada program *peacebuilding*. Upaya pencegahan konflik dan penciptaan harmoni

---

<sup>21</sup>Amien Tohari et.al., *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011), 227-229.

dan integrasi pascakonflik tidak berjalan secara berkelanjutan. Ketika konflik kekerasan telah berhenti sebetulnya tidak ada jaminan kalau konflik tidak berulang kembali. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya *state apparatus* yang tidak sensitif terhadap konflik dan belum adanya sistem pencegahan dini konflik (*early warning system*) yang sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, berbagai organisasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan peduli dalam program bina damai belum mengembangkan *networking* yang memungkinkan kerja bina damai dapat berjalan secara efektif. Selama ini kegiatan bina damai lebih banyak dilakukan secara parsial, sendiri-sendiri tanpa ada kerja sama yang cukup oleh semua aktivis bina damai. Melihat banyaknya organisasi bina damai yang ada di negeri ini baik dari kalangan Non-Government Organization (NGO), FBO (*faith based organization*), Perguruan Tinggi maupun elemen *civil society organization* (CSO) lainnya, maka sudah waktunya mereka mengembangkan kerja sama saling bahu-membahu mengembangkan *peacebuilding* secara lebih efektif. Evaluasi dan pembagian fokus kegiatan dan wilayah sasaran perlu segera dirembuk secara bersama-sama. Targetnya adalah agar agenda-agenda program bina damai dapat berjalan secara lebih terprogram, terarah, dan berkelanjutan. []

### 3. KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK PADA MASYARAKAT PLURAL DI KOTA MATARAM

BAGIAN ini berisi penjelasan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan konflik sosial yang berlangsung di kota Mataram dan daerah lain di wilayah Pulau Lombok. Konflik sosial yang dimaksud terutama berkaitan dengan ketegangan antar warga yang sempat terjadi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Penjelasan meliputi latar penyebab, bentuk, dan pola umum penyelesaian konflik. Pengkajian seperti ini penting dilakukan sebagai upaya mempelajari *trend/kecenderungan* dan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya itu, di bagian ini juga dielaborasi sejumlah persoalan yang terkategori sebagai potensi konflik. Kajian mengenai potensi konflik sangat berguna sebagai bagian dari upaya siaga dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi munculnya bencana sosial khususnya konflik.

#### **A. Konflik dan Potensi Konflik di Mataram dan Wilayah Lombok**

Sebagai kota multikultur yang dinamis, kota Mataram tak lepas dari beragam persoalan yang menyangkut interaksi antarwarga, antarkomunitas, antaretnis, dan lain-lain. Mengkaji persoalan konflik di kota Mataram, perlu dikaitkan dengan berbagai persoalan konflik sosial yang juga terjadi di wilayah lain di Pulau Lombok. Mengingat sebagian konflik yang terjadi di ibu kota provinsi NTB ini melibatkan pihak-pihak yang datang dari luar daerah Mataram. Sebagai contoh

kasus kerusuhan tahun 2000 tidak sepenuhnya dilakukan oleh warga kota Mataram. Pada saat itu disinyalir terdapat keterlibatan warga lain dari luar kota Mataram, seperti dari Lombok Timur. Demikian halnya konflik sosial yang pernah terjadi di Jempong Mataram, misalnya, juga melibatkan warga dari wilayah Lombok Barat. Oleh karenanya, penting untuk dilihat sejumlah kejadian ketegangan atau konflik sosial yang terjadi di wilayah lain di pulau Lombok.

Konflik kekerasan yang terjadi di Lombok kerap melibatkan massa dalam jumlah yang tak sedikit. Pertentangan individu kerap merembet menjadi konflik komunal dengan frekuensi dan intensitas konflik yang meningkat. Beberapa konflik yang terjadi dalam dua dekade terakhir bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti konflik keagamaan, konflik antarkampung, konflik politik dan ekonomi, serta konflik budaya.

### *1. Konflik Antarkampung*

Konflik dan kerusuhan sosial yang melibatkan warga pernah terjadi beberapa kali, diantaranya konflik antara warga desa Karang Genteng dan Patemon. Lokasi kedua desa bersebelahan. Kedua desa ini berada di wilayah Kota Mataram. Tidak dapat diketahui secara pasti penyebabnya, karena konflik terus berulang. Konflik telah mulai sejak tahun 1988. Korban yang jatuh di salah satu pihak menyebabkan dendam yang sulit diurai. Sebagian pihak menyatakan bahwa konflik dipicu oleh perebutan lokasi makam akibat pemekaran wilayah perkotaan tahun 1978. Sampai tahun 2000-an, wilayah Karang Genteng terkategori rawan konflik. Bukan hanya dengan desa Patemon, warga Karang Genteng juga pernah terlibat kerusuhan dengan warga desa di sekitarnya seperti Pagutan Presak dan Bajur.

Termasuk konflik antarkampung adalah konflik yang terjadi di bagian selatan wilayah Lombok Tengah. Konflik terjadi antara pemuda dari desa Ketara dengan warga Tanak Beak, antara warga Ketara dengan warga desa Sengkol. Konflik terkadang dipicu oleh persoalan sepele seperti saling ejek antara pemuda saat berkendara sepeda motor, perkelahian saat pertunjukan musik dan sebagainya.

### *2. Konflik Ekonomi dan Politik*

Salah satu kasus konflik bernuansa ekonomi antara lain konflik antara petani pemilik lahan di sekitar Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) dengan PT. Angkasa Pura. Konflik

disebabkan oleh proses pembebasan lahan milik petani oleh pihak PT. Angkasa Pura yang dianggap tidak adil. Masyarakat menolak biaya ganti rugi tanah yang dianggap terlalu kecil. Beruntung menjelang tenggat pembangunan bandara, persoalan tersebut telah berakhir. Kini bandara internasional kebanggaan masyarakat NTB ini telah selesai dibangun dan telah dapat beroperasi secara lancar.

Adapun contoh konflik bernuansa politis yang pernah terjadi di Lombok antara lain protes pegawai negeri sipil (PNS) terhadap kebijakan Bupati Lombok Timur. Kala itu sebagian besar PNS menolak Peraturan Daerah (PERDA) No.9, Tahun 2002. Salah satu isi peraturan daerah tersebut adalah kebijakan pembayaran zakat oleh PNS kepada Badan Amil Zakat dan Sedekah (Bazda) Lombok Timur.

### 3. *Konflik Bernuansa Agama*

Di awal tahun 2000, konflik bernuansa agama meletus di Mataram. Konflik ini bermula dari kegiatan tablig akbar di lapangan umum kota Mataram yang digagas sejumlah ormas Islam Lombok. Acara yang dikemas dalam bentuk pengajian umum ini dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas umat muslim NTB terhadap saudara Muslim di Maluku dan Ambon yang kala itu sedang terlibat konflik dengan umat Kristen. Para penceramah yang tidak hanya datang dari Tuan Guru di Lombok tetapi juga dari luar kota Mataram menghimbau agar umat Islam memberi simpati dan dukungan terhadap saudara-saudara muslim yang sedang "dizalimi" di Maluku dan Ambon. Usai kegiatan tablig akbar, jamaah pengajian yang telah terbakar emosinya kemudian bergerak menuju beberapa gereja dan melakukan penyerangan dan pembakaran. Aktivitas berikutnya diikuti dengan *sweeping* beberapa rumah orang Cina dan melakukan perusakan. Sejumlah gereja terbakar dan banyak warga Tiong Hoa terpaksa harus eksodus dari Mataram.

Konflik bernuansa keagamaan juga terjadi di internal agama Islam, tepatnya konflik internal organisasi keagamaan. Konflik organisasi keagamaan juga terjadi di Lombok, yakni konflik di tubuh Nahdlatul Wathan (NW), sebuah organisasi keagamaan terbesar di provinsi NTB. Konflik terjadi karena adanya perpecahan di tubuh NW yang kemudian menghasilkan dua kepengurusan di tubuh NW, yakni NW Anjani (para pengurus berpusat di desa Anjani) yang dipimpin oleh Hj. Raehanun dan NW Pancor (berpusat di Pancor) yang dipimpin oleh Rahun. Kedua tokoh ini adalah putri TGKH

Muhammad Zaenuddin Abdul Majid yang merupakan pendiri Nahdlatul Wathan. Konflik kedua kubu ini berlangsung cukup lama dan di tingkat grass root konflik ini sampai memakan korban jiwa. Namun, yang menggembirakan, sekarang ini kedua kubu di bawah inisiasi Gubernur NTB, Muhamad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang), yang nota bene merupakan cucu dari Maulana Syaikh pendiri NW sedang mengupayakan islah (perdamaian).

Kasus konflik yang kerap berulang dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara tuntas adalah kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah.<sup>1</sup>

Sebagaimana konflik yang terjadi di daerah lain seperti di Parung Bogor, konflik yang melibatkan warga dengan Ahmadiyah juga terjadi di pulau Lombok. Hingga kini warga Ahmadiyah yang menjadi korban masih mengungsi di wisma Transito Mataram. Selama bertahun-tahun lebih mereka menghuni wisma penampungan yang kurang layak huni mendorong mereka kembali ke rumah di Ketapang Lombok Barat. Akan tetapi, sesampai di rumah mereka, massa kembali merusak rumah yang telah lama mereka tinggalkan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Nopember 2010. Hingga saat ini nasib warga Ahmadiyah masih belum jelas. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberi solusi berupa ‘transmigrasi’ bagi warga Ahmadi ke pulau tersendiri. Namun, tawaran ini ditolak oleh sejumlah warga mengingat langkah ini hanya akan mengisolasi mereka.

Salah satu penyebab konflik adalah perbedaan keyakinan. Keyakinan Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dianggap menodai agama Islam. Konflik massa dengan warga Ahmadiyah berlangsung berkali-kali dan terjadi tidak hanya di wilayah Lombok Barat, tetapi juga di Lombok Timur.

Persoalan ketegangan antara umat Islam mayoritas dengan pengikut Ahmadiyah hingga hari ini masih menjadi problem pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram. Meskipun

---

<sup>1</sup>Dari catatan sejarah, aliran Ahmadiyah datang ke Indonesia tahun 1924 atau 1925. Para penganut Ahmadiyah di Indonesia berhimpun dalam dua organisasi, yaitu (1) pengikut Ahmadiyah Lahore tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), yang memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai *mujaddid* (pembaharu), (2) pengikut Ahmadiyah Qadian yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Masih Mau'ud, Imam Mahdi, dan Isa bin Maryam.

berkali-kali dialog digelar, musyawarah dilakukan, namun persoalan masih mengalami kebuntuan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 telah mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Terdapat tujuh butir keputusan ini, yaitu:

1. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pemerintah.
2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dibubarkan oleh pengadilan dan melalui proses pengadilan.
3. Ahmadiyah dikategorikan sebagai agama di luar Islam.
4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam.
5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI.
6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, ormas-ormas Islam dan Pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan *'take and give'*.
7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya.

Kajian mengenai konflik yang melibatkan warga Ahmadiyah mungkin tidak perlu panjang lebar diuraikan. Satu hal yang penting untuk disampaikan bahwa dalam konflik yang terus berulang tersebut wanita dan anak-anak adalah kelompok rentan akibat kekerasan. Anak-anak yang menjadi pengungsi selama lebih dari 8 tahun kini telah tumbuh menjadi remaja. Perasaan trauma akibat konflik sosial sepatutnya menjadi perhatian semua pihak.

Kekerasan tidak hanya menimpa mereka yang dianggap menyimpang (*heterodoks*), seperti Ahmadiyah, sebagian anggota masyarakat juga menyerang anggota kelompok Salafi. Kelompok keagamaan yang menekankan pada kegiatan purifikasi agama ini telah beberapa kali mendapatkan resistensi dari masyarakat. Penyebab konflik antara lain adalah kritik Salafi atas tradisi keberagaman masyarakat Lombok yang dianggap *bid'ah* (*heterodoks*), jauh dari kemurnian Islam. Praktek-praktek keagamaan masyarakat Muslim



yang dianggap bid'ah oleh kelompok puritanis antara lain pembacaan *talkin* dalam prosesi penguburan jenazah dan pembacaan tahlil yang dilakukan pada upacara mendoakan orang yang sudah meninggal.

Tercatat kekerasan terjadi beberapa kali di sejumlah tempat seperti di Gelogor kecamatan Sekotong Tengah, di dusun Beroro desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar, desa Sesela kecamatan Gunung Sari dan di dusun Mesanggok desa Gapuk kecamatan Gerung semuanya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, sebelumnya kekerasan juga terjadi terhadap pengikut aliran Wahabi di kecamatan Masbagik Lombok Timur. Kasus-kasus seperti ini hingga kini masih potensial menjadi konflik sosial bila tiap-tiap kelompok tidak bisa menahan diri.

Dari dua kasus (kasus Ahmadiyah dan Salafi) di atas menarik untuk ditelaah. Pada kasus pertama, masyarakat menganggap bahwa Ahmadiyah sebagai kelompok yang meyimang karena jauh dari ortodoksi. Sementara kasus kedua, warga Muslim arus utama kurang bisa menerima bila praktek tradisi keagamaan mereka dianggap bidah dan jauh dari orotodoksi.

Masih berkaitan dengan kasus konflik keagamaan, di Lombok Tengah juga pernah antara Warga Desa Grunung Praya dengan Pimpinan dan pengikut *Tarekat Siratal Mustaqim*. Masyarakat menilai para pengikut tarekat ini telah melakukan penyimpangan terhadap *aqidah islamiyah*. Keadaan memburuk ketika terdengar rumor adanya dugaan praktek mesum yang dilakukan pimpinan tarekat terhadap beberapa pengikut wanita.

Kasus konflik bernuansa agama berikutnya yang melibatkan umat Islam dengan umat non-Muslim misalnya konflik antara warga Muslim dengan warga Hindu. Konflik komunal antara warga Muslim Karang Taliwang dengan warga Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu Kecamatan Cakranegara berlangsung beberapa kali. Kasus kerusuhan pernah terjadi di antaranya pada tahun-tahun 1980-an, dan tahun 2000. Pada umumnya konflik bermula dari perkelahian antarpemuda, kemudian melibatkan warga dalam jumlah besar dari kedua kampung.

Pada tahun 1980-an sempat terjadi *mesiat* (perang) yang melibatkan komunitas Hindu dan Muslim. Salah satu penyebabnya adalah persoalan pembangunan tempat ibadah yang saling berdekatan. Pembangunan masjid yang berdekatan dengan pura, sementara pura

telah lama berdiri.<sup>2</sup> Nuansa keagamaan dalam kerusuhan antara warga Muslim dari Karang Taliwang dengan komunitas Hindu dari kampung Tohpati dan Sindu juga kembali menguat. Konflik yang terjadi di tahun 2000, misalnya, dipicu oleh ketersinggungan warga Bali di Tohpati yang sedang merayakan Nyepi yang merasa terganggu oleh suara pembacaan *sholawat* dalam kegiatan *selakaran*<sup>3</sup> yang diselenggarakan warga Muslim Karang Taliwang. Tradisi pembacaan *selakaran* ini dimaksudkan untuk menyambut kedatangan warga Karang Taliwang yang baru pulang menunaikan ibadah haji.<sup>4</sup> Untungnya, konflik dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas menjadi kerusuhan terbuka.

Selain konflik insidental seperti ini, kasus perkawinan berbeda agama merupakan kasus yang potensial dalam menyulut konflik. Kerap dijumpai remaja putri Karang Taliwang yang Muslim diambil oleh pemuda Hindu dari kampung Bagi Rati. Terhadap persoalan seperti ini, masyarakat Karang Taliwang akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan kembali gadis yang telah dibawa pemuda Hindu tadi. Hanya saja belum pernah terdengar kasus sebaliknya, pemuda Muslim mengambil gadis Hindu. Akibat ketegangan seperti ini, akhir-akhir ini banyak warga pendatang Hindu yang bermukim di Bagi Rati, permukiman baru di bagian utara Karang Taliwang, menginginkan pemisahan diri dari Karang Taliwang. Namun, keinginan ini tampaknya belum tercapai karena adanya ketidaksetujuan dari warga Hindu lama (orang-orang tua) yang menyatakan bahwa generasi pendatang di Bagi Rati kurang mengerti sejarah kampung mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Israil dkk., "Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Desember (2004): 1-16

<sup>3</sup>*Selakaran* adalah kegiatan membaca *salawat* atau syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad seperti pembacaan *barzanji*. Kegiatan ini sering dilakukan masyarakat Islam Lombok pada momen-momen tertentu seperti saat acara *kurisan* (potong rambut untuk bayi), khitanan dan mengantar atau menyambut jamaah haji. Di sebagian lokasi, seperti di wilayah Karang Baru Mataram, tradisi *selakaran* aktif dilakukan secara reguler, sekali seminggu.

<sup>4</sup>Lihat Israil dkk., "Dinamika Pluralisme Agama...", 11; lihat juga "Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama Di Nusa Tenggara Barat" Penelitian oleh Tim Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang dan Diklat, Tahun 2006.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Nahwi tanggal 11 Juli 2016.

Ketegangan antara warga Hindu dan Muslim kembali muncul di penghujung tahun 2012. Konflik melibatkan dua kampung yang berada di dekat Karang Taliwang, yakni antara warga Tohpati yang mayoritas Hindu dengan warga Karang Mas-Mas yang mayoritas Muslim. Konflik komunal ini dipicu oleh perkelahian antara pemuda dari kedua kampung yang saling berdekatan ini pada Rabu Malam 19 Desember 2012.<sup>6</sup>

Terdapat beragam versi mengenai penyebab dan kronologi kerusuhan yang menelan satu korban jiwa dan sejumlah orang luka-luka ini. Versi pertama, konflik dipicu oleh pemuda mabuk dari desa Tohpati yang diingatkan oleh pemuda dari Karang Mas-Mas. Pemuda mabuk tersebut selanjutnya diusir dari lingkungan Karang Mas-Mas dan bahkan dikejar hingga lingkungan Tohpati. Tidak terima dengan tindakan tersebut, kawan-kawan pemuda yang mabuk tadi menyerang pemuda Karang Mas-Mas. Terjadilah penusukan senjata tajam yang menyebabkan terbunuhnya pemuda Karang Mas-Mas yang bernama Sulaiman. Buntut kejadian ini terjadi pembakaran dua rumah warga milik umat Hindu. Versi kedua adalah Kesaksian seorang Polisi dari Resort Mataram yang ikut mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). Pemuda dari lingkungan Karang Mas-Mas, yang hendak menuju rumahnya melewati kerumunan pemuda Tohpati yang sedang mabuk. Pemuda yang diketahui bernama Sulaiman yang saat itu mengendarai sepeda motor diolok-olok oleh anak yang mabuk tersebut. Karena kesal, Sulaiman memanggil teman-temannya dari Karang Mas-Mas sehingga terjadilah perkelahian.

Akibat perkelahian itu, Sulaiman, pemuda Karang Mas-Mas, tewas terkena sabetan pedang oleh pemuda dari lingkungan Tohpati. Korban yang masih duduk di bangku kelas III salah satu SMU di Kota Mataram ini sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong. Buntut dari perkelahian ini, Kamis malam, 20 Desember 2012 konflik kembali pecah. “Satu rumah warga dibakar, 3 anggota terkena lemparan batu”, kata Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko.<sup>7</sup>

Mengantisipasi konflik susulan, lebih dari 400 personel polisi dari Polresta Mataram yang di-*back-up* dari Polda NTB bekerja keras

---

<sup>6</sup>Dikutip dari “Bentrok antar Pemuda, Satu Tewas”, Berita Harian Pagi *Lombok Post*, 20 Desember 2012.

<sup>7</sup>Harian Pagi *Lombok Post*, 22 Desember 2012.

mengamankan lokasi kejadian. Hingga awal tahun 2013, sejumlah polisi terus disiagakan di sejumlah ujung jalan tempat terjadinya kerusuhan. Menurut penuturan pihak kepolisian, pelaku perkelahian yang mengakibatkan kematian Sulaiman juga sudah diamankan di Mapolresta Mataram. Kondisi lokasi kerusuhan berangsur normal. Sejumlah pihak yang terlibat konflik mulai dapat menahan diri. Warga dapat kembali beraktivitas secara normal. Namun, kondisi ini ternyata tidak berlangsung lama. Tiga bulan setelah terjadinya konflik antarkampung, kerusuhan kembali pecah. Tepat tanggal 7 Maret 2013, warga Hindu dari Tohpati dan Karang Mas-Mas kembali terlibat bentrokan. Bentrokan kali ini mengakibatkan meninggalnya warga Hindu yang bernama I Made Ardiyana (45 tahun), warga Tohpati, Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram. I Made Ardiyana adalah kakak dari salah satu pelaku penusukan yang menyebabkan meninggalnya Sulaiman. Ardiyana terkena sabetan pedang di lehernya dan ia akhirnya meninggal di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB.<sup>8</sup>

Melihat para pelaku dan korban meninggal dalam kerusuhan di atas, peristiwa ini masih terkait dengan peristiwa sebelumnya. Menurut saya, terdapat motif balas dendam dari pihak Muslim Karang Mas-Mas terhadap warga Hindu dari Tohpati. Analisis seperti ini dibenarkan oleh pihak Polda NTB yang menyatakan bahwa konflik antarkampung itu diduga kuat merupakan kelanjutan dari konflik serupa yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2012.<sup>9</sup>

Menurut penuturan Sigit, anggota polisi dari Jawa Timur yang telah bertugas di Mataram selama lebih dari 20 tahun, bahwa situasi konflik komunal masih sering terjadi. Pemicunya perkelahian antarpemuda akibat menenggak minuman keras.<sup>10</sup> Hanya saja, menurut hemat saya, perkelahian pemuda yang kemudian menyulut

---

<sup>8</sup>Dikutip dari berita "Polisi Sita Bom Molotov pada Konflik Antarkampung di Mataram". <http://www.antaramataram.com/berita/?rubrik=2&cid=24287> diakses tanggal 19 Juli 2016

<sup>9</sup>Kepala Bidang Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein menyatakan bahwa konflik antarkampung itu diduga kuat merupakan kelanjutan dari konflik serupa yang terjadi 19 Desember 2012. dikutip dari Dikutip dari harian *Bali Post*. "Di Mataram Konflik Antarkampung, Made Ardiyana Tewas" lihat selengkapnya di laman <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detail%20berita&kid=33&cid=74540> (diakses tanggal 9 Maret 2016).

<sup>10</sup>Wawancara dengan Sigit, tanggal 29 Juli 2016.

konflik komunal ini hanyalah pemicu (*trigger*), bukan penyebab mendasar konflik (*root of conflict*). Perkelahian antarpemuda sejatinya hanyalah puncak dari gunung es dari problem relasi antarkomunitas berbeda etnis dan agama ini. Terdapat beberapa persoalan yang ikut mempengaruhi relasi sosial tersebut.

Sejumlah konflik yang terjadi belakangan juga menjadi salah satu bukti betapa persoalan perkelahian antarpemuda masih merupakan potensial konflik. Ketegangan komunitas Hindu dengan komunitas Muslim di penghujung tahun 2013. Konflik antara warga kampung Tohpati yang mayoritas Hindu dengan warga kampung Karang Mas-mas, juga dipicu oleh perkelahian anak-anak muda.

Selain dipicu oleh gesekan antarpemuda, konflik sosial yang pernah terjadi kadang berkaitan dengan persoalan yang terjadi secara nasional. Artinya, sebagian kasus konflik berhubungan dengan kejadian di tempat lain yang lokasinya sangat jauh dari Kota Mataram.

## **B. Respons Masyarakat terhadap Konflik dan Potensi Konflik**

Menanggapi berbagai kasus konflik yang pernah terjadi di Kota Mataram dan wilayah lain di pulau Lombok, beberapa informan memberikan pandangan yang beragam. Dari perspektif responden, secara umum kondisi Mataram dan wilayah Lombok relatif aman. Hampir semua responden menyatakan demikian. Bila ada sedikit ketegangan di antara warga sifatnya sementara. Ketegangan tidak berlarut-larut sehingga memantik kerusuhan sosial yang lebih luas.

Seperti dinyatakan oleh Junias tokoh Kristen kota Mataram, “Di Mataram Lombok ini cukup aman, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri kalau ada masalah cepat ditangani”.<sup>11</sup> Keberadaan aparat keamanan terutama dari kepolisian yang tampak siaga merupakan salah satu faktor yang memungkinkan Mataram berlangsung secara aman konflik.

Hanya saja, mengenai keamanan kota, beberapa informan menyatakan bahwa potensi konflik masih saja ada. Salah seorang informan dari umat Kristen menyatakan “Kalau di permukaan nampaknya aman-aman saja tapi tidak tahu kalau di bawah permukaan. Kalau dalam agama kami, hubungan kami dengan warga

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Junius, tanggal 23 Agustus 2016

agama lain, aman saja. Prinsip kami Yesus itu turun ke bumi untuk semua orang”<sup>12</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Jayadi, salah seorang aktivis LSM. Pemuda yang akrab disapa Jay ini menyatakan, “Dalam skala permukaan keamanan warga di Kota Mataram dapat dikategorikan baik. Namun, jika dilihat lebih dalam rasa aman itu bisa dipertanyakan. Terbukti ketika persoalan yang sangat sepele dapat menimbulkan konflik dalam skala besar dan massif. Warga begitu mudah terpancing dan tersulut emosinya. Hal ini menandakan bahwa warga Mataram masih terusik rasa keamanannya dan belum menyadari bahwa hidup berdampingan itu adalah baik”.

Sementara itu, beberapa responden menyatakan bahwa ketegangan atau kerusuhan yang bernuansa SARA relatif jarang terjadi di kota Mataram, tetapi yang ada adalah ketegangan di antara pemuda. Seorang pastor Katolik, Rd Yohanes Kadek Ariana, Ss, M. Pd, menyatakan,

“konflik yang pernah ada di Kota Mataram setahu saya hanya konflik antarkampung. Seperti konflik Monjok Karang Taliwang, Petemon Karang Genteng. Mungkin yang menjadi faktornya adalah dendam lama. Hal itu sama sekali bukan konflik antar agama.”

Lalu bagaimana dengan konflik yang pernah terjadi di awal tahun 2000? Apakah itu bukan konflik bernuansa SARA? Mengingat massa yang terlibat dalam kerusuhan yang mengerikan di Mataram kala itu melibatkan simbol-simbol agama. Banyak gereja dibakar. Banyak warga non-Muslim terutama kaum Kristiani yang terpaksa eksodus ke luar Mataram. Terhadap pernyataan semacam ini tokoh muda Katolik ini menyatakan hal berikut.

“Menurut saya, kerusuhan yang pernah terjadi antaragama adalah kerusuhan pada tanggal 17 Januari 2000. Kami banyak belajar dari itu. Saya rasa itu imbas dari kerusuhan yang terjadi di Ambon saat itu. Semoga tidak rusuh-rusuh lagi. Itu tidak baik untuk semua. Sampai saat ini, Puji Tuhan, kondisinya relatif aman. Kalau ada konflik sosial, itu ya konflik antar kampung itu. Kalau (konflik) ekonomi dan politik tidak terlalu nampak.”

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Maruli Girsang, tokoh umat Kristen, tanggal 6 Agustus 2016.

Menurut Junias, kerusuhan sosial yang sering terjadi sebetulnya bukan masalah agama, melainkan kesalahpahaman antarindividu. Ketegangan antarindividu harus segera diselesaikan sehingga tidak potensial menjadi konflik yang melibatkan warga secara lebih luas. Dalam menanggapi kasus kerusuhan sosial yang terjadi di awal tahun 2000, lebih lanjut ia menjelaskan sebagai berikut.

“Kerusuhan atau konflik yang terjadi pada 17 Januari 2000 itu kan imbas dari Ambon, Poso. Itu karena ada pihak-pihak yang memprovokasi dan pemahaman masyarakat masih awam dan terjadilah seperti itu. Gereja yang pertama dibakar adalah gereja kami ini, baru setelah itu gereja-gereja yang lain. Umat kami banyak eksodus, keluar dari Lombok. Ada yang ke Bali, ke Jawa seperti itu. Kami pun belajar dari itu semua, membina kerukunan antar Agama. Kami mulai dari tetangga-tetangga terdekat kami. Kami sering berbagi, seperti halnya di momen hari Idul Adha kami memberikan seekor kambing untuk dijadikan hewan kurban. Kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri, sumbangan kasih dan pembagian Sembako (sembilan bahan pokok).”

Demikianlah, konflik terkadang memberi pengalaman berharga bagi warga kota. Keamanan bersama menjadi tanggung jawab semua warga. Trauma konflik atau kerusuhan sosial sedemikain membekas, sehingga semua umat berupaya untuk saling menjaga kedamaian sosial dan saling membangun harmoni.

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa kondisi keamanan Kota Mataram bersifat dinamis. Namun, pemerintah, sebagai institusi resmi yang diberi otoritas untuk menjaga tertib sosial (*social order*), tetap diminta untuk waspada. Pemerintah harus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi termasuk mengelola hal-hal krusial yang potensial menjadi konflik. Dari penuturan banyak informan, dapat dinyatakan bahwa masih banyak persoalan yang masih potensial menjadi konflik. Khusus di Kota Mataram, berikut ini beberapa permasalahan yang potensial menjadi konflik manakala pemerintah daerah tidak mengantisipasinya secara baik.

1. Pengelolaan sampah warga; pengelolaan sampah tampaknya sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dan tata kelola yang baik dan merata di semua kelurahan, sangat potensial menjadi konflik antarwarga. Keterbatasan fasilitas publik untuk menampung sampah rumah

tangga sering kali menimbulkan persoalan antarwarga, antarkampung. Ketegangan antara warga Monjok dengan Warga dari kampung Karang Taliwang beberapa bulan yang lalu adalah salah contoh ketegangan yang dipicu persoalan tempat pembuangan sampah.

2. Persoalan pemakaman umum; menyempitnya lahan untuk fasilitas pemakaman akibat pembangunan perumahan yang merata di semua kecamatan di Kota Mataram, juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota. Kasus persoalan pemakaman yang kurang jelas sering menjadi pemicu konflik komunal antar kampung yang saling berdekatan. Sebagai contoh kasus Karang Genteng dan Petemon, Gubug Mamben dan Sekarbela.
3. Perebutan lahan parkir; perebutan antar kelompok pengelola parkir di sekitar pusat perbelanjaan, juga merupakan persoalan yang kadang-kadang muncul. Pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan dan hotel di wilayah Kota Mataram diharapkan dapat memberi tambahan pendapatan asli daerah terutama dari sektor perdagangan dan pariwisata. Hanya saja di sejumlah titik pertokoan dan hotel ini kerap terjadi perebutan pengelolaan lahan parkir. Beberapa kelompok pemuda sering kali terlibat gesekan untuk memperebutkan pengelolaan lahan parkir tersebut. Pemerintah kota semestinya membuat aturan sekaligus mengontrol implementasi aturan perparkiran tersebut. Bila tidak ada pengaturan dan ketegasan dari pemerintah, dapat berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak sehat antarkelompok warga.
4. Pengawasan terhadap perumahan-perumahan eksklusif yang memungkinkan kelompok-kelompok tertentu menjadikannya sebagai tempat melakukan aktivitas yang rawan menimbulkan masalah. Munculnya beberapa kawasan elit yang dibangun para pengembang dan terkesan tertutup juga potensial menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial seperti ini memang tidak terungkap secara langsung. Hanya saja, sering terjadi atau muncul berbagai isu miring mengenai kondisi warga yang ada di kompleks perumahan elit. Rendahnya atau kurangnya



komunikasi antara warga di suatu kompleks dengan masyarakat sekitar perlu mendapat perhatian serius. Relasi sosial antarwarga yang mulai menyempit yang dibarengi dengan pembentukan lokasi permukiman yang dikhususkan bagi kelompok dan kalangan tertentu.

5. Lembaga pendidikan keagamaan yang tertutup; meskipun tidak banyak, saat ini sudah mulai berkembang pesantren yang tampaknya berbeda dengan pengajaran dan tradisi masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya pesantren yang berkecenderungan tertutup dan tidak menjalin hubungan yang terbuka dengan masyarakat di sekitar juga potensial menimbulkan ketegangan. Perbedaan paham keagamaan yang dikembangkan pesantren tertentu dengan kalangan *mainstream* biasa menjadi pemicu ketegangan.
6. Perdagangan dan peredaran minuman keras; persoalan perdagangan miras dan bahkan narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Mataram. Di kota Mataram terdapat setidaknya dua kategori minuman keras. Minuman keras yang dibuat oleh masyarakat secara tradisional, biasanya oleh masyarakat Hindu, dan miras yang dibuat oleh pabrik. Penggunaan kedua jenis minuman keras ini perlu dilakukan pengawasan secara serius dan ketat oleh aparat keamanan. Maruli Girsang membenarkan bahwa penyalahgunaan miras kerap menjadi pemicu perkelahian antar pemuda. “potensi yang paling jelas selama ini adalah SARA, yang saya tekankan di sini adalah suku dan ras apalagi suku antar kampung itu yang paling banyak daripada antaragama *ndak* keliatan, kurangnya pendidikan minum-minuman keras yang terlalu bebas karena ketika orang mabuk akal sehatnya hilang dan cepat sekali orang terpancing”.<sup>13</sup>
7. Tata kelola dan manajerial pedagang kaki lima yang belum maksimal. Persoalan potensial konflik berikutnya adalah penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima di satu sisi positif karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Maruli Girsang, tokoh Kristen, tanggal 6 Agustus 2016

Banyaknya pedagang kaki lima baik di siang maupun malam hari menjadi salah satu pendorong menggeliatnya perekonomian warga kota dan dapat mengurangi tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda. Terbatasnya lapangan kerja yang ada di kota Mataram dapat sedikit terbantu dengan hadirnya pedagang kaki lima. Hanya saja, keberadaan mereka perlu diatur disediakan pembinaan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) agar dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan antara para pedagang dengan warga dan pemerintah daerah.

8. Perkawinan beda agama; salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim adalah perkawinan berbeda etnis dan agama. Perkawinan beda etnis pada umumnya bukan menjadi persoalan yang berarti. Biasa terjadi di masyarakat adanya perkawinan silang antara etnis Sasak dengan etnis Bima, etnis Sasak dengan Jawa, etnis Sasak dengan Bali. Akan tetapi, pada kasus pernikahan beda agama, sejumlah persoalan sering kali muncul dan sangat potensial menimbulkan konflik. Hal ini terutama terjadi ketika salah satu dari calon mempelai harus mengikuti agama pasangannya. Pada hakikatnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tidak dikenal perkawinan beda agama. Persoalan sering muncul terutama ketika calon mempelai wanita yang beragama Islam “karena kuatnya tradisi patriarki” mengharuskannya pindah ke agama Hindu. Sebaliknya, jika pemuda Sasak-Muslim hendak menyunting gadis Bali yang beragama Hindu, biasanya tidak menjadi persoalan. Karena sesuai dengan tradisi, calon mempelai wanita akan mengikuti agama calon mempelai pria. Sang gadis akan dengan sukarela mengikuti agama calon suaminya yaitu melakukan konversi ke dalam Islam.
9. Pembangunan rumah ibadah; Persoalan pembangunan rumah ibadah merupakan persoalan sensitif yang sering mengancam harmoni masyarakat. Pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas kerap kali memerlukan persetujuan yang tak mudah dari komunitas sekitar. Jika komunitas warga sekitar tidak menghendaki, persoalan

rumah ibadah dapat dipastikan akan gagal. Hal ini juga berlaku bagi sejumlah pura yang jauh dari pemeluk (*pengempon*) yang banyak dirusak massa. Sayangnya, pola-pola penolakan keberadaan rumah ibadah ini sering dilakukan atas dasar aturan-aturan baru yang dikeluarkan pemerintah seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya diatur tentang pembangunan tempat ibadah. Sikap keberatan akan hadirnya rumah ibadah milik agama lain tidak hanya terdapat pada komunitas Muslim, tetapi juga Hindu. Kenyataan ini merupakan salah satu sinyal bahwa komunalisme di kalangan masyarakat ternyata terbilang tinggi. Kasus-kasus kesulitan membangun tempat ibadah baru, atau mulai munculnya gugatan atas keberadaan rumah ibadah yang telah ada, bahkan sejak ratusan tahun dengan dalih regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah serta mudahnya warga mendukung anggota kelompoknya merupakan beberapa indikator masih kuatnya komunalisme ini.

10. Penguatan politik identitas dan kontestasi simbol agama di ruang publik; identitas etnis dan sentimen keagamaan sangat mudah dibangkitkan untuk menciptakan polarisasi dengan batas-batas identitas yang jelas di masyarakat sehingga memungkinkan sebagian politisi menikmati keuntungan. Perbedaan identitas baik secara etnis maupun agama sebetulnya bukan merupakan faktor penyebab (*independent variabel*) terjadinya konflik, melainkan variabel pembangkit sentimen (*intervening variable*). Dalam kontestasi simbol agama di ruang publik—sekalipun belum sepenuhnya memicu munculnya konflik—jika polanya semakin menguat dan memunculkan diskriminasi terhadap satu kelompok agama bahkan pengabaian hak-hak minoritas, hal ini juga akan berpotensi menjadi konflik.

### C. Pola-pola Resolusi Konflik

Pola penanganan konflik biasanya dilakukan dengan penerjunan sejumlah aparat kepolisian dibantu anggota TNI dari Koramil. Selanjutnya aparat keamanan bersama perwakilan pemerintah daerah dan sejumlah tokoh agama memanggil para pihak

yang bertikai untuk melakukan dialog dan mencapai kesepakatan agar konflik dihentikan. Langkah *peace keeping* semacam ini untuk menjaga agar kekerasan berhenti dan korban di kedua belah pihak tidak terus berlanjut. Proses penyelidikan dan penindakan terhadap mereka yang menjadi pelaku biasanya tidak diteruskan secara tuntas. Sehingga proses penegakan hukum harus berhenti. Untuk sementara waktu pola semacam ini efektif, tetapi tidak menjamin bahwa konflik tidak akan terjadi lagi. Buktinya, beberapa tahun berikutnya konflik yang sama kembali terulang.

Kecenderungan umum yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani kerusuhan atau bentrokan yang melibatkan komunitas Hindu dan Muslim adalah penghentian kerusuhan. Ketika kerusuhan terjadi di masyarakat, prosedur pertama yang ditempuh pemerintah adalah dengan menerjunkan aparat kepolisian, termasuk Polisi Pamong Praja (Pol PP) ke lokasi bentrokan maupun berjaga di rumah sakit tempat korban dirawat. Jika keadaan di lapangan masih kurang terkendali, pihak aparat kepolisian tersebut akan dibantu oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), biasanya dari Batalion 742 Satya Wirayudha. Dalam kajian mengenai resolusi konflik, langkah yang ditempuh pemerintah daerah ini dapat dikategorikan sebagai langkah *peace keeping*.

Sebagaimana pada kasus kerusuhan yang pernah terjadi antara warga Muslim Karang Tapen dengan warga Hindu di sebelahnya, Karang Jasi dan Karang Lelede tahun 2002 silam, sebanyak 150 personel aparat kepolisian dari Resort Lombok Barat (sekarang di kota Mataram telah terdapat polisi resor kota atau disingkat Polresta) diterjunkan di perempatan dan di sekitar pasar Karang Lelede, tempat kerusuhan berlangsung. Langkah ini diambil pihak aparat keamanan selain untuk menghentikan bentrok antara dua kampung yang hanya dipisahkan oleh jalan raya ini, juga dimaksudkan agar kerusuhan susulan tak terjadi lagi.<sup>14</sup> Beberapa hari aparat keamanan berjaga di lokasi yang terletak di belakang Mataram Mall ini.

Pengalaman menarik yang perlu diungkap pada tahap penghentian konflik adalah soal penempatan aparat keamanan. Dalam menempatkan aparat keamanan di lokasi konflik, pihak

---

<sup>14</sup>Dikutip dari berita *Liputan Enam* edisi 6 Mei 2002, selengkapnya silahkan lihat <http://news.liputan6.com/read/33667/perkelahian-antarkampung-di-mataram-dua-warga-cedera> (dikutip tanggal 17 Juli 2016).

kepolisian perlu dan penting untuk mempertimbangkan sensitivitas masyarakat. Penempatan aparat keamanan yang tidak tepat sering menimbulkan persoalan dan protes dari masyarakat. Sebagaimana terjadi saat pengamanan kerusuhan di lokasi tersebut, banyak pemuda dari Karang Tapen yang memprotes keberadaan polisi yang hanya terkonsentrasi di wilayah Karang Tapen. Buchori, salah seorang aktivis remaja masjid dari Karang Tapen dengan lantang berteriak kepada para polisi agar mereka tidak hanya berada di kampungnya. Menurut Buchori, keberadaan polisi yang hanya ditempatkan di satu lokasi seperti itu mengesankan bahwa sumber keributan hanyalah pemuda Karang Tapen. Merespons protes warga ini, polisi akhirnya membagi personel di dua wilayah yang bertikai, di Karang Tapen dan Karang Jasi dan Karang Lelede.

Model pengiriman aparat keamanan ini juga dilakukan di tempat kerusuhan lain. Pada kasus kerusuhan antara warga muslim Nyangget dengan warga Hindu Saksari, sejumlah aparat kepolisian juga segera diterjunkan di lokasi kerusuhan. Mereka berjaga di beberapa titik di kampung yang terlibat dalam bentrokan. Di ujung kampung tepatnya di jalan-jalan utama yang menghubungkan dengan kampung lain diblokir dengan penjagaan ketat aparat keamanan. Hal ini dimaksudkan selain sebagai antisipasi kerusuhan susulan, juga untuk menghalangi masuknya warga dari kampung lain yang berniat membantu kampung tersebut.

Selain melokalisasi kampung-kampung yang terlibat bentrokan, polisi biasanya juga akan menyisir rumah-rumah warga untuk mengumpulkan senjata-senjata tajam yang digunakan massa dalam bentrokan. Senjata tajam yang umum digunakan warga sangat beragam seperti bambu runcing, tombak, senjata rakitan, kelewang, dan badik.<sup>15</sup> Tindakan mengumpulkan senjata tajam kadang juga tak berlangsung secara baik. Sebagian warga secara sembunyi-sembunyi masih saja menyimpan senjata tajam tersebut dengan berbagai alasan.

Menurut penelusuran penulis, meskipun telah dilakukan penyisiran, di rumah-rumah warga sebenarnya masih banyak senjata tajam

---

<sup>15</sup>Dalam salah satu kegiatan *sweeping* senjata tajam yang dilakukan pihak kepolisian, beberapa botol yang hendak digunakan sebagai bom molotov juga ikut disita. Selengkapnya lihat berita *Bali Post* berjudul "Dua Kampung Di-*sweeping*": Tujuh Warga Diamankan, Puluhan Sjam Disita", dikutip dari <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/9/14/nusatenggara.html> (diakses tanggal 6 Agustus 2016).

seperti kelewang, badik, dan tombak. Para warga baik dari komunitas Hindu maupun Muslim beralasan, alat-alat ini sebagai antisipasi kalau suatu saat kerusuhan kembali terjadi. “*Kan* tidak ada jaminan kalau tidak perang lagi. Ini untuk jaga-jaga. Namanya provokator *kan* banyak”, demikian kata Buchori dan Budiman yang menceritakan kepada penulis mengapa di sudut belakang rumahnya masih berdiri tombak.<sup>16</sup> Penyerahan senjata tajam secara sukarela belum sepenuhnya berhasil.

Pihak Polres dan pemerintah daerah juga menginisiasi untuk mempertemukan perwakilan kelompok yang bertikai untuk mengadakan dialog. Sejumlah tokoh masyarakat dan agama dari kedua komunitas diundang untuk berunding mempelajari penyebab kerusuhan dan upaya-upaya jangka pendek mengakhiri kerusuhan.

Dalam banyak kasus kerusuhan, pengakuan hukum kurang maksimal diberlakukan. Penangkapan aktor-aktor yang terlibat kerusuhan tidak pernah secara serius dilakukan kepolisian. Dalam kerusuhan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, polisi menghadapi kesulitan dalam menangkap pelaku. Beberapa kali kasus kerusuhan seperti di Karang Taliwan, Karang Tapen, dan Sindu, serta kasus perusakan pura Sangkareang Narmada, polisi gagal menangkap pelaku dan menggiringnya ke penjara. Hal ini sulit dilakukan mengingat selain alasan bukti yang tidak cukup, biasanya massa dari kedua belah pihak akan berjuang mati-matian membebaskan rekannya yang ditangkap polisi. Inilah sebagian faktor yang menyebabkan tindakan polisi dirasa kurang efektif dan belum bisa menimbulkan efek jera di masyarakat. Komunalisme masih kuat di masyarakat. Jika terjadi penangkapan, warga akan berusaha untuk sebisa mungkin membela anggota kelompok dan menghalang-halangi penangkapan tersebut.

Pada kasus pembakaran pura Sangkareang di Narmada, misalnya, aparat kepolisian tidak berhasil memproses secara hukum pelaku perusakan dan pembakaran. Lambannya pihak kepolisian dalam menindak pelaku menimbulkan gelombang protes dari mahasiswa. Salah satu demonstrasi besar adalah ketika 500 orang, sebagian besar mahasiswa menggelar aksi di depan Polda NTB, memprotes cara polisi yang dirasa lamban dalam memproses pelaku.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Observasi dan Wawancara dengan Buchori dan Budiman bulan Juli 2016.

<sup>17</sup>Demonstrasi ini merupakan aksi gabungan dari tujuh elemen pemuda dan mahasiswa yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram,

Untuk mengantisipasi kerusuhan yang setiap saat bisa meletus, pihak pemerintah juga membangun fasilitas pengamanan. Beberapa fasilitas pengamanan di antaranya pos polisi dan tembok pembatas. Fasilitas pengamanan seperti itu didirikan di tempat-tempat yang kerap terjadi konflik yang melibatkan warga dalam jumlah besar. Pembangunan pos polisi misalnya dapat dilihat di samping perempatan Karang Taliwang – Tohpati, di perempatan Karang Tapan, dan di perempatan pasar Karang Lelede. Sedangkan pembangunan tembok keliling dapat disaksikan di kawasan Nyangget Saksari. Tembok setinggi dua meter lebih ini memisahkan antara kampung Nyangget dan Saksari. Langkah serupa juga pernah ditempuh pemerintah kota Mataram ketika kesulitan mengantisipasi kerusuhan warga yang kerap berlangsung antara dua kampung yang bersebelahan seperti di Karang Genteng dan Petemon kawasan Pagutan.<sup>18</sup>

Program pembangunan tembok pembatas merupakan salah satu kebijakan pemerintah kota di bawah kepemimpinan walikota Mataram kala itu, H.M. Ruslan. Jika dikritisi secara cermat, sebetulnya pembangunan tembok pemisah seperti di atas jelas kontraproduktif bagi upaya integrasi sosial secara lebih baik. Dengan membangun tembok pembatas, kerusuhan memang dapat diminimalisasi, tetapi langkah semacam ini jelas tidak memberi kontribusi bagi upaya pembentukan integrasi sosial di waktu selanjutnya. Dampak jangka panjang yang muncul adalah menguatnya soliditas kelompok yang justru akan memperkuat komunalisme. Komunalisme dengan sendirinya akan tambah subur di kampung-kampung yang dipisahkan oleh tembok-tembok pembatas semacam ini. Dengan kata lain, melakukan segregasi pada komunitas-komunitas yang sedang berkonflik hanya akan menghasilkan konflik yang lebih destruktif di waktu yang lain.

Idealnya, daripada membangun tembok pembatas, lebih baik membangun fasilitas *public spaces* yang memungkinkan kedua kelompok dapat berinteraksi secara sehat. *Public spaces* dapat berupa

---

Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UNRAM, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Mataram, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH Indonesia) NTB dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAH Mataram yang terhimpun dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram.

<sup>18</sup>Sumber “Rentetan Amuk di Pulau Lombok”, *Koran Tempo*, Sabtu, 31 Januari 2004.

sarana olah raga, taman kota, pasar, sekolah, panggung budaya, dan lainnya yang memungkinkan warga dapat bebas berinteraksi secara sehat. Program walikota membangun tembok yang memisahkan dua kampung yang bertikai ini berbeda dengan kebijakan pemimpin sebelumnya, H. Lalu Mujitahid.

Pada masa kepemimpinan Mujitahid, pemerintah kota Mataram juga sering menghadapi persoalan bentrokan antara kampung Bali Hindu dan kampung Muslim seperti di kawasan Pesongoran. Kondisi pemukiman penduduk yang tersegregasi secara etnis dan agama, menyuburkan sentimen etnis dan agama. Persolan sepele sering menjadi pemicu munculnya kerusuhan yang melibatkan massa lebih besar. Untuk menanggulangi kasus-kasus bentrokan dan mengurangi menguatnya sentimen etnis dan agama, saat itu Mujitahid mengeluarkan kebijakan pembangunan komunitas yang warganya heterogen. Salah satu wujud dari kebijakan ini adalah dikeluarkannya izin pembangunan kompleks perumahan Pagutan Permai yang lokasinya tidak jauh dari Karang Genteng, Peresak, dan Pesongoran.<sup>19</sup>

Setelah kerusuhan mulai berhenti, dan keadaan mulai kondusif, selanjutnya kepala daerah atau pimpinan aparat keamanan akan memanggil pihak-pihak yang bertikai untuk berdialog. Dialog dilakukan di tempat yang disepakati sebagai tempat netral. Seperti di kantor balai desa, kantor kecamatan atau kantor walikota Mataram. Tokoh agama seperti tuan guru dan pedande atau pengurus Parisada ditunjuk untuk mewakili pihak-pihak yang bertikai. Usai beberapa dialog selanjutnya dibuat kesepakatan damai. Langkah ini dapat disebut sebagai tahapan *peace making*. Sampai tahap ini, persoalan penyelesaian konflik telah dianggap tuntas.

Dari beberapa kali kasus konflik, ketika surat perjanjian damai telah ditandatangani oleh perwakilan dari kedua belah pihak, pertikaian dianggap selesai. Pemerintah daerah akan menyatakan bahwa persoalan pertikaian antar kampung telah selesai. Aparat keamanan juga akan menyatakan kondisi di lapangan telah kondusif, aman, dan terkendali. Selanjutnya, masyarakat dihimbau untuk tenang.

Pada saat para pihak telah merasa bahwa persoalan telah selesai, biasanya langkah-langkah tindak lanjut menjadi terabaikan. Pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) merasa bahwa tugas

---

<sup>19</sup>Sumber "Rentetan Amuk di Pulau Lombok", *Koran Tempo*, Sabtu, 31 Januari 2004.

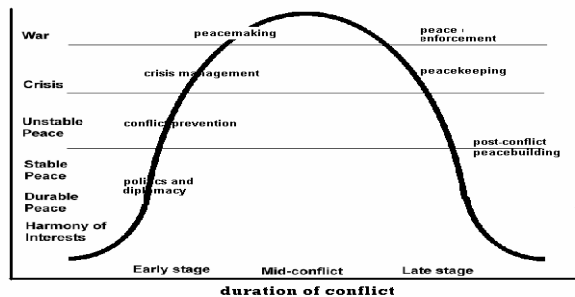


mengendalikan situasi telah dijalankan. Tugas mendamaikan pihak yang bertikai juga sudah dilaksanakan. Apabila merunut tahapan resolusi konflik yang ideal, sebetulnya masih banyak proses lanjutan yang seharusnya dikembangkan, yakni upaya bina damai (*peace building*). Sayangnya, pemerintah daerah belum mengembangkan program-program bina damai yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, persoalan konflik telah dianggap selesai. Padahal, tidak ada jaminan bahwa kalau sebuah konflik berakhir, tak akan lagi muncul konflik berikutnya di waktu yang lain. Kondisi berakhirnya pertikaian bukan berarti akhir dari konflik besar yang suatu saat bisa muncul.

Fakta bahwa konflik terus berulang, meskipun warga telah membuat surat perjanjian perdamaian semestinya menjadikan pemerintah daerah mengembangkan usaha yang dapat dikategorikan sebagai *peace building*. Tepatnya, langkah-langkah strategis dan berkelanjutan yang memungkinkan warga dapat cepat membaur dan merajut tali persaudaraan yang lebih sejati. Ketika ada pihak-pihak kurang bertanggung jawab -lazimnya disebut provokator- yang kembali membangkitkan sentimen etnis, warga dengan sendirinya mampu membentengi diri dan tidak terpengaruh oleh provokasi tersebut.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa dalam hal manajemen atau resolusi konflik, pemerintah daerah Mataram masih sebatas melakukan *peace keeping and making*, belum mengembangkan program penciptaan perdamaian (*peacebuilding*) yang lebih *sustainable*. Paparan gambar berikut menunjukkan sampai di tingkat mana upaya resolusi konflik telah dilaksanakan.

**Gambar 3.1**  
**Kurva Konflik Lund<sup>20</sup>**



<sup>20</sup>Tim ProPatria Institute, *Post-Conflict Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual* (Jakarta: ProPatria Institute, 2009), 2.

Dengan menggunakan analisis kurva konflik Michael Lund, terlihat bahwa upaya resolusi konflik yang dilakukan pemerintah kota masih terfokus pada *peace keeping* dan *peace making*. Sementara agenda lanjutan berupa *peace building* belum banyak menjadi perhatian pemerintah kota maupun propinsi. Akibatnya, konflik dapat kembali terulang, hanya karena dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang remeh (*trivial*).

Pola penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah seperti di atas bukan pola penanganan konflik yang komprehensif. Seorang aktivis perdamaian, Jayadi, menyatakan hal berikut.

“Model penanganan dan antisipasi dini konflik tidak dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, banyak bernuansa seremonial. Di samping itu, isu perdamaian tidak dijadikan sebagai satu program strategis dalam kebijakan pembangunan daerah. Isu perdamaian dan keberagaman masih berkuat pada visi dan misi saja namun dukungan perencanaan program dan anggaran belum banyak berpihak pada isu ini”.<sup>21</sup>

Untuk jangka panjang usaha manajemen konflik tidak cukup jika hanya sebatas penghentian konflik, negosiasi pascakerusuhan, melainkan harus diikuti dengan program membangun komunikasi, kerja sama dan mengembangkan sikap saling respek antara kelompok suku dan agama yang berbeda. Aktivitas penghentian konflik idealnya di-*follow up*-i dengan pencegahan konflik (*conflict prevention*). Pencegahan konflik dapat dilakukan manakala pemerintah dan masyarakat memiliki kesadaran untuk mengembangkan sistem sosial untuk antisipasi dini atau yang lazim disebut *social early warning system*.

#### **D. Transformasi Konflik dan Program Bina Damai**

Seperti diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Dinamika konflik mengikuti dinamika interaksi antar manusia. Konflik sesekali terhenti (*pause*), tetapi tidak ada jaminan bahwa konflik yang sama tidak terulang lagi.

Pemerintah, secara nasional, sebetulnya telah menyediakan landasan hukum bagi upaya penanganan atau manajemen konflik.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Jay, aktivis bina damai Lakpesdam NU Mataram, tanggal 5 September 2016.

Manajemen konflik meliputi pencegahan sebelum konflik terjadi penanganan dan penyelesaian konflik tetapi tampaknya belum ada cetak biru mengenai transformasi konflik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial disebutkan bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Jadi dalam UU ini (pasal 4) secara eksplisit disebutkan 3 tahapan penanganan konflik, yaitu pencegahan<sup>22</sup>, penghentian<sup>23</sup> dan pemulihan<sup>24</sup>.

Dalam perspektif teoretis, tidak semua konflik sosial bersifat negatif. Konflik dapat diarahkan atau ditransformasikan menjadi sesuatu yang positif dan mendorong dinamika masyarakat. Yang diperlukan adalah manajemen konflik dan penguatan sistem siaga dini.

Masih dalam UU yang sama secara jelas disebutkan tentang sistem siaga dini. Pada pasal 11 tentang tugas membangun sistem peringatan dini dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun cara-cara yang bisa ditempuh, antara lain: (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk konteks Mataram, tugas pengembangan sistem siaga dini ini tampaknya belum berjalan secara maksimal. Sebagai contoh, belum tersedianya data mengenai daerah-daerah yang rawan konflik. Belum ada data yang akurat mengenai hal ini. Pemerintah kota melalui SKPD<sup>25</sup> terkait, perlu membuat program pemetaan kawasan

---

<sup>22</sup>Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

<sup>23</sup>Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

<sup>24</sup>Pemulihan pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

<sup>25</sup>SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. SKPD adalah

rawan konflik. Hal ini penting dilakukan agar pemerintah kota dapat secepat mungkin mengantisipasi dan meminimalisasi konflik.

Belum adanya pola transformasi konflik dan sistem siaga dini juga dirasakan para aktivis perdamaian. Jay salah seorang aktivis dari Lakpesdam NU secara panjang lebar memberi catatan, mengenai hal ini.

“Kalau peran pemerintah menurut saya, masih pada sebatas menyelesaikan konflik ketika konflik terjadi, namun aktivitas tanggap dini sebagai satu hal yang penting tidak banyak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga konflik di Mataram terus terjadi dan siklusnya dari tahun ke tahun terus berubah”.<sup>26</sup>

Belum adanya program tanggap dini atas potensi konflik menyebabkan banyak persoalan belum tertangani secara tuntas. Belum lagi ditambah banyak aparat pemerintah belum memiliki *sense of crisis* yang memadai. Berbagai gejolak dan ketegangan tidak segera diantisipasi. Akibatnya, apabila terjadi konflik sosial, semua pihak merasa kelabakan. Pemerintah seharusnya menggandeng berbagai pihak untuk secara bersama-sama mengembangkan sistem siaga dini ini. Masih menurut Jay, pemerintah kurang melibatkan pihak luar seperti NGO dan agen *civil society* lainnya.

Selain itu, pemerintah juga dinilai kurang memanfaatkan berbagai kearifan lokal yang sejatinya dimiliki masyarakat dan sangat potensial untuk dijadikan salah satu mekanisme resolusi konflik. “Tidak banyak menggandeng pihak luar (seperti LSM) dan kampus. Tidak mengembangkan penanganan konflik berbasis kearifan lokal, lebih banyak menggunakan pendekatan konvensional dan intervensi aparat keamanan”, demikian kritik Jay.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Kota Mataram mulai mengembangkan sistem tanggap dini untuk mengantisipasi bencana sosial terutama kerusuhan, ketegangan dan konflik sosial. Program pengembangan tanggap dini secara simultan dapat dilakukan dengan

---

perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah agar berjalan secara baik.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Jay, aktivis bina damai Lakpesdam NU Mataram, tanggal 5 September 2016

<sup>27</sup>Wawancara dengan Jay, aktivis bina damai Lakpesdam NU Mataram, tanggal 5 September 2016

mengembangkan upaya bina damai. Berikut ini beberapa agenda yang tampaknya mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah daerah.

1. Meningkatkan atau memperbanyak aktivitas dan kegiatan bina damai dengan melibatkan semua kelompok secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan. Seperti disinggung di bagian lain tulisan ini, sebetulnya banyak komunitas anak muda yang peduli dengan program bina damai (*peace building*). Komunitas-komunitas ini perlu dikoordinasi sehingga mereka dapat lebih bersinergi mengembangkan program bina damai. Secara kelembagaan Kesbangpol Kota Mataram sebagai *leading sector* pembinaan harmoni sosial, bersama instansi pemerintahan terkait diharapkan bekerja sama dengan LSM, perguruan tinggi, ormas kepemudaan dalam menyusun dan mengembangkan program bina damai secara sinergis dan berkelanjutan.
2. Mengintensifkan kegiatan antisipasi dini konflik (*early warning conflict*) baik secara konvensional maupun berbasis informasi dan teknologi. Saat ini, kecanggihan teknologi informasi dapat dijadikan sarana yang efektif untuk membangun sistem siaga dini. Pemerintah daerah, lembaga penyiaran, aparat keamanan harus bekerja secara terpadu membuat sistem *data base* peta konflik di kota Mataram. Penyiapan data yang akurat sangat diperlukan agar pimpinan daerah dapat mengambil tindakan cepat apabila terdapat sinyal-sinyal akan terjadinya konflik. Sistem informasi ini akan dapat terbangun dengan baik bila elemen *civil society* seperti kalangan perguruan tinggi, insan pers dilibatkan.
3. Mendorong interaksi positif antarwarga dan penyediaan ruang (*public spaces*). Interaksi yang positif dapat terjalin dalam relasi keseharian antar warga maupun melalui asosiasi formal. Interaksi antar warga dalam kehidupan sehari-hari dijalankan melalui sistem keakraban warga sekaligus melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mataram. Kegiatan gotong royong warga kota yang mulai menurun perlu dihidupkan kembali. Gotong royong membersihkan lingkungan perumahan saat ini jarang dilakukan oleh warga masyarakat. Di beberapa tempat peran menjaga kebersihan lingkungan kota seperti perbaikan saluran air

dan sarana jalan telah dikerjakan oleh dinas kebersihan dan tata kota. Model pengelolaan kebersihan kota ini memang membuat warga merasa nyaman dan senang. Warga masyarakat merasa pemerintah kota telah menjalankan tugasnya dalam merawat dan menjaga kebersihan. Akan tetapi, di sisi lain, pola-pola gotong royong antarwarga mulai mengalami penurunan. Kondisi semacam ini jelas kontra produktif bagi upaya meningkatkan partisipasi warga dalam kebersihan kota dan lingkungan perumahan masing-masing. Kegiatan gotong royong semacam ini selain memiliki fungsi merawat kesetiakawanan dan harmoni sosial, juga menjadi sarana komunikasi efektif antarwarga termasuk mengenali berbagai keganjilan di masyarakat.

Masih termasuk bagian dari upaya mendorong interaksi warga multikultur adalah mengurangi munculnya permukiman eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Eksklusivitas ini dapat berupa pengelompokan berdasar status sosial, bisa berupa kesamaan agama atau etnis tertentu. Salah seorang aktivis perdamaian memberikan saran untuk hal ini.

“Untuk kegiatan bina damai, sebaiknya pemerintah membuka dan memberikan akses kepada masyarakat untuk membina dan menjalin hubungan yang setara, sejalan, dan harmonis. Mengantisipasi munculnya pengelompokan pemukiman, tempat ibadah dan aktivitas yang menghambat terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghargai antar warga. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang inklusif bagi semua kelompok masyarakat”.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir di Kota Mataram dan sekitarnya mulai muncul *trend* pengembangan pemukiman yang eksklusif berdasarkan kesamaan agama tertentu dan status sosial penghuni, sebagai contoh pemukiman muslim dan kawasan elit. Pada pemukiman muslim misalnya anggota warga masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut semuanya muslim. Homogenitas agama merupakan syarat bagi seseorang untuk memiliki rumah di

kawasan seperti ini. Kecenderungan membuat pemukiman muslim, sebetulnya telah menjadi *trend* di banyak kota-kota besar seperti di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor Bandung dan Surabaya. Para investor jeli memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menarik konsumen terutama pasangan keluarga muslim kelas menengah kota. Di beberapa tempat, penjualan *cluster* pemukiman muslim mendapat respons positif dari pasar.

Pada saat ini memang keberadaan pemukiman yang mengelompok berdasar agama ini belum merupakan persoalan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, menurut penulis, permukiman homogen semacam ini kurang mendukung program integrasi sosial pada masyarakat plural seperti Kota Mataram. Mengembangkan pemukiman eksklusif semacam ini seolah mengembangkan budaya kantong (*enclave culture*). Orang dari agama tertentu mengelompok dan membuat kantong. Mereka merasa aman dan nyaman tinggal dengan anggota yang seiman dan seagama. Model pemukiman ini rasanya problematik terutama menyangkut pengembangan integrasi sosial pada masyarakat multikultur. Diperlukan penelitian tersendiri untuk menganalisa *trend* pemukiman seperti ini. Pemerintah daerah semestinya memberi izin dan memfasilitasi pemukiman yang anggota warganya berasal dari beragam latar belakang. Dengan demikian, proses integrasi dengan kelompok masyarakat multikultur memperoleh tantangannya. Hal yang tak jauh berbeda adalah keberadaan pemukiman eksklusif kelompok *the have* (orang-orang kaya). Model pemukiman yang disebut kedua ini tampaknya juga kontraproduktif bagi peleburan dan pembauran antarwarga. Warga tersekat oleh pagar pembatas pemukiman sehingga ada jarak sosial.

4. Menghidupkan kembali kearifan lokal yang mulai tergerus oleh modernitas. Seperti diketahui di masyarakat Kota Mataram terdapat sejumlah kearifan lokal yang apabila direvitalisasi akan berkontribusi bagi peningkatan integrasi dan harmoni antarwarga. Contoh kearifan lokal itu antara lain petuah-petuah lama dan tradisi saling. Tradisi atau

budaya *saling kunjung*, *saling besilak* (saling mengundang), *saling ayoin* (saling membantu), *saling belangar* (saling melayat bila ada warga yang meninggal) hendaknya didorong untuk terus dikembangkan. Di samping itu, sangat perlu ditambah penyediaan ruang publik termasuk ruang terbuka hijau seperti taman kota yang asri, sarana seni, dan olah raga yang memungkinkan warga dapat berinteraksi secara natural dalam mengembangkan integrasi sosial.

Keberadaan *public spaces* memiliki dampak positif baik dari sisi ekonomi, budaya maupun politik. Dari sisi ekonomi misalnya, keberadaan taman kota yang di dalamnya disediakan sarana pedagang kaki lima akan mendukung bagi meningkatnya *income* masyarakat. Sedangkan dari sisi budaya, keberadaan sarana seni atau balai budaya memungkinkan warga dari lintas etnis dan agama dapat mengembangkan budaya mereka sekaligus melestarikannya. Kesempatan menampilkan ciri khas atau keunikan budaya masing-masing pada gilirannya akan membuat warga kota merasa difasilitasi dihargai kebudayaannya. Pentas musik lintas etnis yang pernah digelar di pantai Ampenan, misalnya, sangat baik untuk mengenalkan keragaman dan keunikan budaya masyarakat kota Mataram. Even-even nasional yang sering digelar di Kota Mataram adalah sebagian *moment* yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman budaya masyarakat. Bila warga telah terbiasa melihat keragaman budaya dan tradisi lain, mereka dengan sendirinya menghargai dan menghormati budaya orang lain.[]





## 4. SUARA PERDAMAIAN ANAK-ANAK MUDA

MEMPERTIMBANGKAN peran generasi muda dalam mengupayakan perdamaian dan harmoni sosial di Kota Mataram merupakan hal yang menarik. Kawula atau generasi muda biasanya sangat jarang dilibatkan dalam proses perdamaian dan penciptaan harmoni di masyarakat. Alih-alih dilibatkan, sebagian kalangan malah menuduh para pemuda sebagai sumber masalah. Tuduhan semacam ini tidak selamanya salah; mengingat, banyak pelaku kerusuhan, dalam kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar seperti pawai, pertunjukan musik, adalah para pemuda. Energi dan tenaga yang berlebih ditambah kondisi psikologis usia remaja yang masih labil dianggap sebagai pemicu mudahnya terjadi kerusuhan di kalangan remaja.

Tetapi di sisi lain, taksedikit komunitas anak muda yang peduli dengan program bina damai. Mereka aktif mempromosikan perlunya hidup damai, saling menghargai dan membuat program kreatif mempromosikan hak asasi manusia dan bekerja sama dengan pemuda lain yang berbeda latar belakang agama dan etnisnya. Dengan demikian, segmen anak muda potensial menjadi aktor kerusuhan, sekaligus potensial pula menjadi agen bina damai. Paparan berikut merupakan temuan menarik yang menjawab sejumlah rumusan masalah yang dipaparkan di bagian awal buku ini.

### A. Peran Pemuda dalam Program Bina Damai

Dalam penanganan konflik di Kota Mataram dan di tempat lain di wilayah Pulau Lombok, peran pemuda kurang banyak terekspos. Selama ini peran-peran penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan oleh kelompok tua. Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik sebagian besar didominasi orang-orang yang tergolong senior (tua). Sebagaimana dipaparkan oleh Maruli Girsang, salah seorang tokoh agama Kristen yang menyatakan, “Yang banyak terlibat menyelesaikan masalah yang saya lihat adalah pemerintah aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau pemuda belum saya lihat. Terus terang ada (keterlibatan pemuda, pen), tapi belum maksimal”.<sup>1</sup>

Kurang maksimalnya peran pemuda dalam program resolusi konflik, di antaranya disebabkan oleh banyaknya tokoh masyarakat yang masih menyangsikan kemampuan para pemuda. Kalangan muda dianggap masih kurang matang dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Mereka dianggap masih minim pengalaman dan masih rendah jam terbangnya. Salah seorang anak muda menyatakan bahwa selama ini pemuda belum terlibat dalam penanganan konflik karena masih dianggap kurang kompeten. “Saya sendiri belum pernah terlibat. Peran pemuda sangat minim. Kita masih dianggap sebelah mata dan sering dibilang sok tahu”<sup>2</sup> Padahal, kalau pemuda dilibatkan, mereka dapat menjadi kader potensial bina damai. Informan lain, Sugiartina, pemuda Budha menyatakan, “Menurut saya, peran pemuda sangat penting dalam penanganan konflik. Karena dari sejak muda dia mau dilibatkan dalam menangani konflik, mereka lebih bertanggung jawab dan bersama pemuda lainnya menghindari terjadinya konflik”.<sup>3</sup>

Dalam menangani konflik, pihak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan para pemangku kepentingan lebih banyak mengundang kalangan tua dalam melakukan dialog, mediasi, negosiasi, dan juru damai. Sedangkan pihak pemuda nyaris tidak terdengar perannya. Alih-alih terlibat dalam proses penyelesaian konflik, generasi muda malah dituduh sebagai biang pemicu konflik. Aktor konflik lebih banyak dilakukan pemuda. Pernyataan sejumlah

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Maruli Girsang, tokoh Kristen, tanggal 6 Agustus 2016.

<sup>2</sup>I Nyoman Mahendra, wawancara tanggal 23 Juni 2016.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Sugiartina, tanggal 22 Juli 2016.

informan berkaitan dengan kerusuhan yang pernah terjadi di kota Mataram mengindikasikan bahwa pemuda lebih banyak menjadi aktor konflik ketimbang penyelesaian konflik. Berkaitan dengan hal tersebut, Drs. Benecditus Haro. M.Pd menyatakan: “Berkaitan dengan konflik dan potensi konflik, menurut saya kalau masalah SARA tidak terlalu kuat. Yang sering terjadi memang antarpemuda yang berimbas juga ke konflik antar kampung, yaitu antarkelompok pemuda itu”.

Banyak kalangan menilai bahwa remaja, secara psikologis, merupakan kelompok yang masih labil. Ego pemuda dan emosi yang masih belum terkendali menjadi salah satu faktor penyulut terjadinya ketegangan atau gesekan di kalangan remaja. Persoalan-persoalan yang sebetulnya sepele, bisa menjadi pemicu pada konflik sosial secara luas. Pedanda Gde Made Pidada menyatakan, “Namanya juga anak muda. Darah muda, mudah tersinggung. Apalagi kalau diikuti dengan meminum minuman keras. Itulah penyebab konflik antarkawula muda”.

Tokoh lain, dari kalangan Budha, Sariman, juga menganggap bahwa perkelahian antarpemuda sering menjadi pemicu pada kerusuhan berskala besar. “Penyebab konflik adalah gesekan antar pemuda. Karena generasi muda pada saat ini masih minim SDM, tidak mampu mengontrol diri dan pemuda kita saat ini terlalu menuruti egonya”. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Surya Damai Zai, wiraswasta dari kalangan Kristen. Bu Surya menjelaskan, “Generasi muda itu memiliki semangat yang menggebu-gebu. Mereka masih belum stabil emosionalnya. Hal ini, menurut saya, rawan menimbulkan konflik”

Pernyataan sedikit berbeda disampaikan Rd Yohanes Kadek Ariana, Ss, M. Pd, tokoh agama Kristen. Ketika ditanya apakah pemuda atau generasi muda potensial menyebabkan konflik?, ia menyatakan sebagai berikut:

“Nah tergantung, kalau saya melihatnya anak muda itu tidak ada wahana untuk ber-ekspresi. Mereka tidak mempunyai tempat. Ini kan bisa memicu terjadinya konflik. Kalau orang nganggur gak ada kerjaan, cari kerjaanlah. Apalagi ada yang kasih minuman, narkoba atau sudah kebut-kebutan yang gak ada kerjaan. Hal-hal ini kan bisa menyebabkan konflik. Belum lagi ditambah rendahnya pendidikan juga.”

Menurut pendeta di atas, faktor banyaknya waktu luang di antara anak muda potensial menyebabkan hal-hal yang kurang baik. Guna memaksimalkan potensi mereka, disarankan agar pemerintah memikirkan media penyaluran potensi pemuda. Potensi pemuda yang beragam perlu disalurkan ke hal-hal yang positif. Memberi kesibukan pada pemuda dengan aktivitas positif diharapkan akan mengurangi kriminalitas dan berbagai tindakan penyimpangan sosial lainnya.

Kurang dilibatkannya pemuda juga menjadi catatan. Sariman, umat Buddha yang menjadi PNS di Kemenag Kanwil Agama. Menurutnya, “Generasi muda harus ikut serta dalam menangani konflik, tapi saya lihat masih kurang dilibatkan dalam penanganan konflik sosial”.

Keikutsertaan generasi muda dalam resolusi konflik dan kerja bina damai sangat diperlukan. Kelompok muda, oleh sebagian informan, dinilai mempunyai potensi untuk menjalin kerja sama secara lebih intens. Bila dibandingkan dengan kelompok orang tua, potensi ini tampaknya lebih besar. Rd Yohanes Kadek Ariana, Ss, M. Pd, menyatakan:

“Puji Tuhan. Seingat saya, tokoh-tokoh muda Muslim, Hindu, Kristen sering melakukan kerjasama. Kalau antar OKP, mereka sering komunikasi. Teman-teman PMKRI dengan HMI, PMII, KMHDI dan lain-lain saling mengundang, bila ada kegiatan kepemudaan. Jadi bisa dikatakan pelibatan generasi muda dalam penanganan konflik itu bisa terlihat dari hubungan harmonis antar OKP dari masing-masing Agama. Menurut saya, peluang untuk berubah itu, kan dari anak muda. Kalau orang tua agak susah”

Terdapat optimisme dari sebagian kalangan tentang potensi bina damai yang bisa dikembangkan oleh kawula muda. Generasi muda dianggap memiliki pola pemikiran, pengalaman yang baru dalam upaya membangun relasi yang lebih baik dengan sesama warga lainnya. Kebiasaan bergaul, berinteraksi dengan berbagai kalangan yang berbeda latar belakang agama dan etnis memungkinkan mereka dapat lebih memahami keragaman. Perbedaan agama atau latar belakang etnis bukan merupakan halangan untuk saling bertegur sapa, berkomunikasi, dan merajut kerjasama. Pola pemikiran yang terbuka bebas dari *interest* politik dan kepentingan birokrasi memungkinkan pemuda potensial merajut harmoni di antara mereka.

Hal senada disampaikan Drs. Benecditus Haro, M.Pd. Tokoh Katolik ini menyatakan, “Peran generasi muda dalam promosi perdamaian memang mempunyai wadah atau tempat, seperti halnya kalau di Katolik ada PMKRI, *temen-temen* yang di agama lain seperti Islam ada HMI, PMII, Hindu KMHDI dan lain sebagainya”, demikian tambah Benecditus Haro. Keberadaan organisasi kepemudaan merupakan modal bagi upaya mengembangkan bina damai.

Dalam konteks ini keberadaan organisasi kepemudaan baik organisasi kepemudaan yang anggotanya berasal dari satu agama yang sama, maupun perkumpulan pemuda lintas agama dan etnis seperti KNPI, memiliki beberapa manfaat. Organisasi kepemudaan merupakan wadah bertemunya pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kehadiran organisasi ini mampu menjadi katalisator bagi berbaurnya anggota yang sangat plural. Organisasi kepemudaan menjadi wahana mengembangkan interaksi dan komunikasi secara lebih aktif, baik organisasi yang anggotanya homogen maupun asosiasi atau forum komunikasi dengan anggota yang lebih beragam, keduanya merupakan langkah maju untuk berdialog dan bekerja sama untuk menginisiasi berkembangnya program bina damai.

Bertolak dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa sejatinya geliat untuk senantiasa mengupayakan bina damai di Kota Mataram, menjadi perhatian sebagian kalangan. Secara ideal, mereka menyatakan bahwa pemuda semestinya dilibatkan dalam program-program bina damai. Baik kalangan tua maupun kalangan muda setuju apabila program penguatan kedamaian dan integrasi sosial itu melibatkan semua elemen masyarakat.

Para pemuda perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan pola bina damai berdasarkan ragam kreativitas mereka masing-masing. Pelaku tindak kekerasan yang terjadi di Kota Mataram yang sebagian besar kalangan muda tidak menjadi penghalang agar mereka, para pemuda terlibat dalam program bina damai dan integrasi sosial. Berbagai program pengembangan bina damai yang tidak melibatkan pemuda justru kontraproduktif bagi keberlangsungan program dalam jangka panjang. Keterlibatan pemuda dalam program bina damai dan integrasi sosial akan menambah ragam dan variasi kegiatan bina damai.

## **B. Ragam dan Inisiasi Program Bina Damai**

Di antara sedikit informasi mengenai keterlibatan pemuda dalam program bina damai, terdapat beberapa kelompok komunitas pemuda yang punya kepedulian tinggi dalam merawat, dan mempromosikan perdamaian. Perdamaian yang dikampanyekan meliputi perdamaian antarwarga di internal agama, etnis maupun antarwarga yang berbeda etnis dan agama.

Beragam kegiatan yang dilakukan aktivis kepemudaan dalam rangka mengembangkan bina damai di Kota Mataram dan di wilayah Lombok. Mereka secara aktif melakukan kampanye perdamaian dengan beragam bentuk kegiatan dan media. Setidaknya ada tiga jenis organisasi yang biasa digunakan oleh para aktivis kepemudaan ini dalam mengembangkan usaha bina damai, yaitu melalui:

1. organisasi internal keagamaan;
2. organisasi non keagamaan;
3. kerja sama dan pembentukan forum antar organisasi kepemudaan.

Berikut ini dipaparkan beberapa program yang pernah dilakukan para pemuda yang berkaitan dengan upaya membangun bina damai.

Melalui organisasi internal keagamaan. Yang dimaksud melalui organisasi internal keagamaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dan dimotori para pemuda yang berafiliasi dalam organisasi keagamaan tertentu, seperti kepemudaan yang ada dalam NU, Muhammadiyah maupun NW. Anak-anak muda NU, misalnya, melalui Lakpesdam telah melakukan serangkaian kegiatan yang secara khusus berkaitan dengan promosi perdamaian. Seperti diungkapkan Jayadi, koordinator kegiatan bina damai Lakpesdam NU, selama ini ia dan anggotanya telah membuat program seperti:

1. belajar keberagaman antar komunitas;
2. studi toleransi dan kunjungan rumah ibadah;
3. pembentukan kader damai untuk kader pesantren dan ulama muda bekerjasama dengan pondok pesantren;
4. lomba film pendek keberagaman bagi pelajar dan mahasiswa;
5. *talkshow* dan iklan film keberagaman di media televisi lokal;

6. kampanye melalui poster dan stiker;
7. diskusi rutin bersama komunitas lintas agama dan budaya;
8. mengaktifkan kearifan lokal seperti *saling jango, saling pesi-laq, nyelaloq ngupi* (ngopi bareng);
9. olahraga bersama antar komunitas.

Untuk yang disebut terakhir, kegiatan olah raga tampaknya paling banyak diminati kalangan muda. Aktivitas olah raga bersama merupakan media yang efektif membangun hubungan baik di antara pemuda lintas etnis dan agama. Sebagaimana disampaikan Junius, “Kalau masalah mempromosikan perdamaian, Saya setuju lewat olah raga. Saya kadang main *futsal* bersama. Di situ (olah raga *futsal*, pen), kami banyak temannya, bukan hanya satu agama saja. Ada kawan Hindu, Kristen, Islam, dan Budha”.

Dalam olah raga, sebagaimana kegiatan seni budaya, para pemuda dapat larut berbaur tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Komunikasi di antara anggota klub dapat berjalan mengalir tanpa beban dan prasangka keagamaan atau keetnisan. Kegiatan olah raga inilah yang melibatkan pemuda dari berbagai latar belakang agama, selain akan meningkatkan komunikasi dan menghilangkan sekat psikologis di kalangan remaja, juga bermanfaat untuk menyalurkan energi berlebih yang dimiliki pemuda. Melalui cara-cara yang positif, para pemuda terlibat secara emosional, sehingga mereduksi tindakan-tindakan negatif. Semangat sportivitas dan kebersamaan yang ada dalam olah raga memberi pengaruh positif bagi mencairnya sekat-sekat psikologis maupun hambatan yang bersifat primordialistik lainnya antarpemuda.

Berbeda dengan Junius, yang menggunakan olah raga sebagai media komunikasi, sebagian pemuda kerap memanfaatkan momentum perayaan hari besar agama untuk mengundang kawan, relasi, dan tetangga yang berbeda agama. Saparindi (Pemuda Budha) menyatakan:

”Kami tidak rutin melakukan aksi perdamaian. Tapi kami promosikan di setiap perkumpulan, baik Komunitas Budhis Nusa Tenggara Barat maupun di komunitas lain. Teman-teman Hikmah Budhis dalam rangka melakukan open house pada saat perayaan hari Waisak juga sering mengundang pemuka dan tokoh-tokoh agama lain.”



Secara personal, aktivis pemuda ini juga sering memberi pengertian kepada teman-teman di sekitarnya agar saling menghargai dan menghormati. Seperti yang dilakukan Ardos Wedo, mahasiswa Katolik, ketika ditanya apa yang ia lakukan untuk mengembangkan kedamaian. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini menyatakan:

“Itu sudah menjadi kewajiban bagi kami yang harus kami jaga. Di setiap pergaulan kami dengan teman-teman agama lain kami mendahulukan itu yaitu kenyamanan dulu. Secara pribadi pesan perdamaian ini saya sampaikan sewaktu saya menjadi ketua panitia di acara keakraban HMJ di UMM. Kebetulan saat itu, saya dipercaya oleh Kaprodi dan Dekan. Mereka (mahasiswa yang lain) meresponnya sangat baik.”

Di luar organisasi kepemudaan yang berbasis agama, beberapa kawula muda mengadakan komunikasi dan bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan menolak tindakan diskriminatif. Sebagai contoh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Forum Remaja Lintas Iman (FORELI). Forum ini dibentuk dan diinisiasi oleh para pemuda yang ada di LSM Nusatenggara Centre (NC). Salah satu tujuan pembentukan forum yang dibentuk tahun 2006 ini dimaksudkan sebagai wadah bergabungnya aktivis pemuda berbasis keagamaan. Anggota forum tersebut berasal dari remaja masjid, Hikmah Budhi, perwakilan remaja gereja, dan KMHDI. Salah satu program yang pernah dilakukan kala itu antara lain dialog remaja lintas iman dengan tema-tema yang beragam.

Tema-tema yang diusung dalam dialog tidak menyinggung persoalan keyakinan atau aqidah masing-masing pemeluk agama, seperti peran remaja dalam penyelamatan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, remaja dan bahaya NAZA (narkoba dan zat adiktif lainnya). Pelajaran penting (*lesson learned*) yang dapat dipetik dari kesempatan dialog tersebut, para pemuda disadarkan bahwa terdapat musuh bersama yang dihadapi oleh semua agama seperti persoalan kemiskinan, kebodohan, penyelamatan lingkungan, bahaya narkoba dan zat *addictive* lainnya. Selain diskusi bersama, FORELI juga menggelar *game-game* kekompakan (*building team*). Lomba terompah kebersamaan, tarik tambang lintas iman adalah sebagian contoh kegiatan membangun kebersamaan dan kekompakan di antara kawula muda. Usai menggelar *game*, kegiatan

diakhiri dengan kerja bakti bersih pantai seperti kegiatan yang pernah dilakukan di pantai Kerandangan beberapa tahun silam.

Berbagai kegiatan yang ditawarkan FORELI saat itu mendapat sambutan positif dari peserta dialog lintas iman. Mereka merasa kesempatan bertemu dengan kawan-kawan dengan latar belakang keagamaan, merupakan momentum yang sangat menarik. Dari situ mereka, sekalipun tidak berdialog tentang keyakinan dan akidah agama lain, tetapi mereka dapat saling memahami dan melupakan perbedaan dan menggantikannya dengan kerja sama untuk meretas problem kemanusiaan yang dihadapi semua agama. Hanya saja, kegiatan FORELI ini berlangsung dalam beberapa tahun saja. Banyak aktivis kepemudaan yang kemudian tidak bisa melanjutkan bergabung dengan FORELI dengan berbagai alasan seperti kuliah di luar kota Mataram, bekerja ke negeri lain, dan menikah.

Meskipun demikian, NC pada tahun-tahun berikutnya tetap menggelar berbagai program yang berkaitan untuk mempromosikan harmoni, integrasi, dan bina damai di kalangan remaja. Salah satunya adalah kegiatan rutin kemah kebangsaan. Sesuai data profil NC, organisasi ini telah mengelat kemah kebangsaan remaja lintas iman. Kegiatan kemah kebangsaan lintas iman biasanya digelar pada bulan Agustus bertepatan dengan momentum perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga tahun ini, LSM yang berada di Jalan Pariwisata ini masih rutin menggelar kemah kebangsaan. Partner kerja datang dari pemerintah, sekolah maupun pihak swasta.

Selain kemah kebangsaan, lembaga swadaya masyarakat yang anggotanya sebagian besar kalangan pemuda ini, juga menggelar pelatihan, workshop seminar dengan tema yang beragam, seperti remaja dan tantangan radikalisme keagamaan, memupuk nasionalisme di kalangan remaja, dan mewaspadaai paham radikalisme dan jihad yang salah.

Momentum lain yang dapat dicatat sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi di antara pemuda lintas agama adalah terbentuknya aliansi kebangsaan menolak perusakan tempat ibadah dan diskriminasi agama. Setelah kasus perusakan pura Sangkareang, sejumlah elemen mahasiswa Muslim dan Hindu di Kota Mataram menggelar demonstrasi selama sehari-hari. Aliansi yang menamakan diri Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram ini menuntut pemerintah menjamin kebebasan beragama dan mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku perusakan rumah ibadah yakni

perusakan pura.<sup>4</sup> Sekitar 500-an orang yang merupakan gabungan dari tujuh elemen pemuda dan mahasiswa: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UNRAM, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Mataram, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH Indonesia) NTB, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAH Mataram yang terhimpun dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram, meminta kasus itu diselesaikan dengan baik. Mereka menuntut agar tetap menghormati keberadaan Pura Sangkareang yang sudah menjadi warisan umat Hindu di Lombok Barat.

Keberadaan aliansi semacam ini, sekalipun sifatnya insidental, menunjukkan mulai bangkitnya kekuatan baru dari kalangan muda tentang perlunya kembali merajut ikatan kebangsaan yang mulai tergerus. Bentuk aliansi kepemudaan lintas etnis dan agama ini seolah menyadarkan semua pemangku kepentingan bahwa semua kelompok anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup, beragama, dan berkeyakinan.

Selain melalui organisasi kepemudaan yang dimiliki ormas keagamaan, kelompok pemuda peduli perdamaian juga mengadakan komunikasi dan aliansi dengan melibatkan komunitas yang lebih luas. Salah satunya adalah Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (AKAPELA). Dengan diinisiasi oleh aktivis LBH Apik Mataram, AKAPELA memfasilitasi bertemunya kelompok pemuda lain dari berbagai etnis dan agama. Sesuai namanya, asosiasi ini hendak menyatukan berbagai kekuatan kepemudaan untuk bersama-sama menggiatkan kampanye toleransi, saling menghargai dan menciptakan kedamaian warga utamanya di kalangan remaja. Salah satu tujuan pembentukan AKAPELA untuk mengembangkan paham pluralisme dan menghargai perbedaan sebagai “Rahmat Tuhan”.<sup>5</sup> Pemuda lintas agama juga diharapkan sebagai ujung tombak dalam

---

<sup>4</sup>Peristiwa perusakan Pura ini terjadi di awal tahun 2008 tepatnya hari Selasa, 15 Januari di malam hari. Ratusan massa menyerbu, merusak dan membakar bangunan di lingkungan Pura Sangkareang di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

<sup>5</sup><http://www.infolombok.net/aliansi-kerukunan-antar-pemuda-lintas-agama-akapela-ntb-gelar-halal-bihalal/> (diakses tanggal 5 Agustus 2016).

rangka penghapusan kekerasan berbasis agama dan gender maupun kekerasan yang mengatasmakan agama tertentu. Tidak hanya di kota Mataram, asosiasi ini juga dibentuk di wilayah lain seperti di KLU, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Berbagai kegiatan telah dilakukan, di antaranya dialog reguler yang melibatkan pemuda lintas agama seperti dialog yang mengusung tema “Agama yang anti kekerasan.” Dialog yang digelar di Lombok Utara ini dihadiri 40 perwakilan pemuda, mahasiswa dan pelajar lintas agama, anggota karang taruna, dan tokoh masyarakat. Dialog bertujuan agar pemahaman pemuda lintas agama dan organisasi kemahasiswaan mendapatkan pemahaman tentang ajaran agama yang damai, egaliter, adil gender, serta anti kekerasan.<sup>6</sup>

Selain acara dialog rutin tentang peran pemuda sebagai agen anti kekerasan, dalam beberapa kesempatan hari besar agama, AKAPELA juga menggelar acara yang mempertemukan semua unsur kepemudaan lintas agama. Salah satunya, misalnya, acara *halal bi halal dengan* mengundang pemuda yang nonmuslim untuk berpartisipasi.<sup>7</sup> Halal bi halal adalah tradisi tahunan yang merupakan rangkaian dari idul fitri. Dilakukan oleh umat Islam selepas puasa bulan Ramadhan.

Masih berkaitan dengan pembentukan asosiasi pemuda lintas agama atau lintas iman, pada pertengahan tahun 2012, atas inisiatif Kementerian Agama di Mataram telah terbentuk FORMULA NTB (Forum Pemuda Lintas Agama). Forum ini diharapkan bisa menjadi wadah diskusi dan *silaturahmi* antara pemuda lintas agama.<sup>8</sup>

Sampai saat ini program-program riil yang dikembangkan oleh FORMULA belum banyak terdengar. Pembentukan forum yang sangat tergesa-gesa, dan merupakan bagian dari workshop, merupakan salah penyebab belum maksimalnya peran FORMULA. Anggota forum yang berasal dari berbagai latar belakang tampaknya belum memiliki semangat dan visi yang sama tentang pengembangan

---

<sup>6</sup><http://www.lombokpost.net/2015/10/09/akapela-ntb-gelar-dialog-pemuda-lintas-agama/> (diakses tanggal 7 Agustus 2016).

<sup>7</sup><http://www.infolombok.net/aliansi-kerukunan-antar-pemuda-lintas-agama-akapela-ntb-gelar-halal-bihalal/> Minggu, (24/Agustus/2014). (diakses 26 Agustus 2016.)

<sup>8</sup><http://www.mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/1169-formula-ntb-terbentuk-sebagai-wadah-silaturahmi-pemuda-lintas-agama#> (diakses tanggal 6 Agustus 2016).

program bina damai. Meskipun demikian, ini kehadiran asosiasi semacam ini menjadi salah satu pertanda positif berkembangnya kesadaran pemuda untuk tidak hanya mengembangkan sikap toleran dengan agama lain, tetapi juga kebutuhan untuk mengembangkan kerjasama dengan agama lain.

Keberadaan forum lintas agama di kalangan pemuda semacam ini penting bukan hanya saja saat terjadi konflik, tetapi juga sebagai wahana untuk mengurangi gesekan dan mengantisipasi munculnya konflik yang berkepanjangan. Keberadaan organisasi atau asosiasi lintas agama ini berfungsi menetralisasi rumor, isu-isu negatif yang dihembuskan oleh para provokator. Seperti halnya ketika terjadi kerusuhan di Tolikarra, Papua. Para pemuda yang tergabung dalam Formula segera mengadakan rapat dan dialog dengan mengundang tokoh-tokoh agama. Tujuannya agar kasus kerusuhan atau konflik bernuansa agama yang terjadi di tempat lain tidak diikuti dengan aksi serupa di Mataram.

Lazim terjadi, pada saat terjadi kasus kerusuhan bernuansa agama, berkembang isu-isu negatif yang kalau tidak dikelola secara baik akan menjadi kontra produktif bagi penciptaan harmoni antarumat beragama di Mataram. Pada kasus-kasus konflik bernuansa agama, biasanya sering memunculkan solidaritas mekanis di kalangan pemuda, meskipun kasus konfliknya berada jauh di luar Mataram. Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa memungkinkan semua peristiwa termasuk konflik menyebar dengan cepat di masyarakat. Situasi semacam ini terkategori rawan atau potensial membangkitkan solidaritas umat, sehingga gampang dimanipulasi dan diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **C. Kendala Program Bina Damai**

Kegiatan pengembangan bina damai bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketekunan, kesungguhan semua pihak untuk mengembangkannya. Kerja bina damai juga bukan merupakan kerja instan, sekali jadi dan *fixed for all conditions*. Satu kegiatan mungkin cocok dan diminati, tetapi pada kondisi tertentu belum ada jaminan bahwa program atau kegiatan tersebut dapat berlangsung terus menerus. Oleh karenanya, perlu diidentifikasi sejumlah kendala atau hambatan yang dihadapi oleh para aktivis bina damai. Paparan berikut berisi rangkuman penuturan para informan mengenai kendala dalam pengembangan kegiatan dan kultur bina damai di kalangan pemuda.

1. Kurangnya perhatian pemerintah. Program bina damai bagi pemerintah daerah masih belum dianggap program prioritas. Banyak pimpinan atau pejabat daerah hanya terfokus pada penanganan konflik. Artinya, mereka baru bergerak apabila telah terbukti ada konflik. Sementara dalam kondisi damai perhatian terhadap hal ini kurang maksimal diberikan. “Dukungan pemerintah yang masih kurang dan belum menganggap aktivitas bina damai sebagai kegiatan yang baik dalam rangka perawatan semangat perdamaian dan kebersamaan antarwarga/komunitas”, demikian ungkap Jay, aktivis bina damai dari Lakpesdam NU Kota Mataram. Menurutnya program bina damai masih belum menjadi isu yang seksi bagi banyak pimpinan daerah.
2. Program bina damai lebih banyak bersifat sementara (*ad hoc*). Masih belum adanya perhatian secara serius terhadap program bina damai menyebabkan banyak program berlangsung secara *ad hoc*. Inisiasi program bina damai lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil LSM dan beberapa program insidental pemerintah. Belum ada program bina damai yang berlangsung dalam jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainable*).
3. Masih bergantung pada pihak pendonor (*funding*). Banyak kegiatan promosi perdamaian lebih banyak dimungkinkan karena adanya bantuan dana dari pendonor (*funding*). Akibatnya, apabila *project* seperti ini berakhir, program selanjutnya juga berakhir. Problem ketergantungan pada beberapa *funding agency* muncul karena anggaran yang disediakan untuk program bina damai masih kecil. Banyak LSM mengeluhkan pemerintah tidak cukup banyak menyediakan *back up* dana bagi program pengembangan bina damai dan integrasi sosial.
4. Ketidaksiapan kader pengganti sehingga banyak program asosiasi yang terhenti. Aktivis yang harus berpindah kerja atau belajar ke luar kota menjadi alasan berhentinya program bina damai. Sebagai contoh pada kasus Forum Remaja Lintas Iman yang pernah dibentuk oleh Yayasan Nusatenggara Center. Forum ini pernah dengan sangat baik melakukan pertemuan kelompok pemuda lintas iman, di tahun 2006. Beragam kegiatan seperti dialog, bakti

sosial, *talk show* di televisi lokal terpaksa harus berhenti karena banyak kader bina damai yang pindah keluar kota, sementara kader yang lain belum siap. Ada pengurus Foreli kawin, kuliah, kerja ke daerah lain.

5. Belum berkembangnya sifat keterbukaan di masyarakat. Keraguan dan kegamangan untuk membuat semacam asosiasi kerja bersama dengan kelompok yang berbeda latar belakang agama dan etnis di sebagian pemuda juga menjadi kendala tersendiri. Kondisi semacam ini berkaitan dengan kedewasaan dalam memandang perbedaan. Sikap *tasamuh* (toleransi) dan kematangan dalam bersosialisasi terkadang memunculkan semacam tembok pembatas. Secara umum, upaya bina damai di Kota Mataram belum sepenuhnya terkoordinasi secara baik. Sebagian kelompok kerap berjalan sendiri-sendiri dalam mengampanyekan program bina damai. Perlu dikembangkan pola-pola komunikasi dan interaksi yang sehat antarkelompok pemuda sehingga interaksi dan komunikasi dapat berlangsung secara cair.
6. Banyak kegiatan bina damai belum terkoordinasi dengan baik. Menurut pengakuan aktivis perdamaian, selama ini mereka mengembangkan kinerja bina damai secara sendiri-sendiri. Koordinasi antar lembaga atau asosiasi belum berlangsung secara maksimal. Dampaknya, banyak program berjalan kurang maksimal.

Berbagai kendala yang dihadapi sebagian besar asosiasi kepemudaan lintas agama, berdampak pada kelangsungan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan. Banyak kegiatan hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu tidak muncul lagi.

Saran bentuk kegiatan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antarpemuda lintas agama adalah dengan membuat program konkret seperti gotong royong membersihkan sarana ibadah. Benedictus Haro menjelaskan, “Program antarpemuda beragama seperti gotong royong, saling membantu sama lain, contohnya pemuda dari umat Katolik membuat program satu Minggu sekali itu membantu membersihkan masjid yang lokasinya dekat dengan mereka. Begitu pun sebaliknya, umat muslim membantu membersihkan gereja.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Drs. Benedictus Haro. M.Pd, 5 Juli 2016.

Senada dengan Haro, I Made Suharsimi, aktivis AKAPELA dari komunitas agama Hindu menyatakan, “Harus menumbuhkan gotong royong supaya muncul *chemistry* (kedekatan) di antara pemuda beda agama seperti saling bantu-membantu di masing-masing kegiatan agama”.<sup>10</sup>

Sementara itu Maruli Girsang menyarankan agar pemuda yang dilibatkan dalam program resolusi konflik dibekali dengan pemahaman agama yang toleran, menghargai perbedaan dan mengutamakan dialog. Dialog dan diskusi merupakan aktivitas yang menarik karena memungkinkan para pemuda dapat saling mengenal dan berlatih menyikapi persoalan konflik secara lebih dewasa. Lebih lanjut ia menyatakan:

“Saya melihat apa yang dilakukan sekarang sudah bagus. Saya sering melihat ada diskusi dan komunikasi lintas agama. Umpamanya terjadi kasus seperti kasus di Ambon atau di mana ada konflik antar agama. Bila terjadi kasus kayak begitu, ya.. kita di sini harus segera bertemu, berdiskusi untuk membahasnya. Harus netral. Jangan juga terlalu berpihak. Kita juga harus melihat akar permasalahannya supaya hal yang terjadi di sana, tidak terjadi di sini...”<sup>11</sup>

Hal senada disampaikan Ardu Wedo, pemuda Katolik ini menyatakan:

“Kalau menurut saya kuatkan barisan di tingkat pemuda. Setelah itu selalu didiskusikan setiap isu yang muncul. Apalagi bila isunya menyangkut masalah agama. Masalah agama itu sangat sensitif. Yang penting, ayok menghormati perbedaan umat beragama. Membuka diri untuk bisa menerima orang lain. Itu hal yang paling penting dan mendasar”.<sup>12</sup>

Saran dari Yohanes Kadek:

“orang muda kan generasi penerus, Indonesia ini kan beragam, macem-macem, dan Indonesia ini ada karena pemuda. Setiap pemuda harus mempunyai jiwa nasionalisme dalam keterlibatan masalah perdamaian demi

<sup>10</sup>Wawancara dengan I Made Suharsimi, aktivis AKAPELA, 15 Juli 2016.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Maruli Girsang tanggal 6 Agustus 2016.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ardu Wedo, pemuda Katolik, tanggal 8 Agustus 2016.



terciptanya kemaslahatan bersama, atau dalam bahasa kami BONUM KOMUNE yang artinya kebaikan bersama”.<sup>13</sup>

Dari berbagai pendapat pandangan beberapa tokoh di atas, sejatinya masyarakat memiliki kepedulian terhadap pengembangan bina damai di kalangan pemuda. Demikian halnya dengan para pemuda yang berpandangan bahwa mereka perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkreasi dalam program pengembangan bina damai di kota Mataram.[]

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Rd. Yohanes Kadek Ariana, Ss, M. Pd (Pastor, dosen), tanggal 7 Agustus 2016..

## 5. PENUTUP

BERBAGAI pandangan masyarakat tentang konflik, upaya-upaya penanganan, serta pelibatan generasi muda telah disajikan di bab-bab sebelumnya. Sejumlah analisa mengenai peran generasi muda dalam bina damai juga sudah diberikan. Di bagian akhir buku ini disajikan beberapa kesimpulan mengenai tiga hal; peran pemuda dalam upaya bina damai, ragam bentuk dan jenis kegiatan serta kendala-kendala yang dihadapi generasi muda dalam mengembangkan *peace building*.

Secara umum komunitas pemuda termasuk pemuda lintas iman masih belum berperan secara maksimal dalam program bina damai (*peace building*) dalam arti sesungguhnya. Program bina damai adalah program menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan penuh kedamaian. Kondisi damai yang dimaksud adalah sebuah kondisi yang di dalamnya keadilan dapat ditegakkan, hak-hak asasi manusia dihargai, dan diskriminasi sosial dieliminasi. Jadi bukan damai yang dimaknai ketiadaan konflik sosial semata. Apabila terjadi ketegangan dan konflik, warga memiliki kapasitas untuk mengelola konflik sosial tersebut sehingga tidak berkembang menjadi konflik kekerasan (*violence conflict*). Dengan demikian, program bina damai tidak berlangsung secara insidental, melainkan berlangsung secara berkesinambungan (*sustainable*).

Ada beberapa penyebab mengapa pemuda belum terlibat secara maksimal dalam program bina damai, antara lain karena

kurangnya perhatian pemerintah. Sebagai bagian dari upaya menjaga dan merawat harmoni sosial, kegiatan bina damai belum menjadi isu penting pemerintah. Pemerintah masih belum menjadikan program bina damai sebagai program prioritas. Pemerintah lebih banyak berkonsentrasi pada upaya penghentian konflik. Bila terjadi ketegangan, konflik atau kerusuhan sosial, upaya yang dilakukan pemerintah lebih terfokus pada penghentian konflik dan belum dilanjutkan pada upaya pengembangan bina damai. Upaya pertama yang dilakukan adalah penerjunan aparat keamanan, melakukan dialog pihak-pihak yang bersengketa. Setelah perjanjian atau kesepakatan damai telah tercapai, persoalan dianggap selesai. Padahal, kondisi seperti ini masih tergolong rawan. Kondisi bisa berbalik dari anti klimaks ke munculnya konflik baru akibat ketidakpuasan beberapa kelompok yang kurang setuju dengan kesepakatan damai. Akibat belum dijadikannya program bina damai sebagai program prioritas, tidak banyak kegiatan atau anggaran yang disediakan untuk program tersebut. Selain itu, belum maksimalnya peran pemuda juga karena masih berkembang anggapan bahwa pemuda belum memiliki cukup pengalaman dalam melakukan mediasi dan bina damai di antara kelompok mereka sendiri.

Di antara minimnya perhatian pemerintah terhadap program pengembangan bina damai tersebut, sebagian pemuda memiliki idealisme yang mendorong mereka untuk memulai kegiatan bina damai. Dalam mengembangkan program bina damai, para pemuda biasanya tergabung dalam asosiasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi ekstra kampus, asosiasi lintas iman. Asosiasi lintas iman yang aktif mengembangkan bina damai di Kota Mataram antara lain Aliansi Kerukunan Antar Pemuda Lintas Agama (AKAPELA), Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA NTB) dan Forum Remaja Lintas Iman (FORELI). Sedangkan pegiat bina damai dari organisasi kepemudaan berbasis keagamaan antara lain Lakpesdam NU Kota Mataram. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga mempunyai perhatian terhadap kegiatan bina damai antara lain Nusatenggara Centre (NC) Mataram dan Somasi.

Ragam bentuk dan jenis program yang dikembangkan oleh aktivis bina damai meliputi dialog pemuda lintas iman, belajar keberagaman antarkomunitas dan kunjungan ke rumah ibadah, bakti sosial, pembentukan kader damai, kampanye melalui poster dan stiker, dan olahraga bersama antarkomunitas pemuda.

Adapun kendala yang dihadapi para pegiat bina damai dalam mengembangkan programnya antara lain kurangnya perhatian pemerintah, program bina damai lebih banyak bersifat sementara (*ad hoc*), masih bergantung pada pihak pendonor (*funding*), ketidaksiapan kader pengganti sehingga banyak program asosiasi yang terhenti, belum berkembangnya keterbukaan dan sifat inklusif di masyarakat, dan belum adanya koordinasi antar pegiat program bina damai.

Untuk mengatasi kendala di atas, terdapat sejumlah rekomendasi untuk pemerintah daerah maupun masyarakat secara umum. Pemerintah daerah hendaknya memberi perhatian dan kepedulian yang serius tentang perlunya pengembangan program bina damai di masyarakat. Program bina damai bukanlah program instan yang berlangsung sesaat ketika konflik terjadi dan berhenti kala konflik terlihat usai, melainkan harus diupayakan secara terprogram, dan berkelanjutan. Dibutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan yang cukup agar program bina damai dapat berlangsung dengan maksimal sehingga harmoni sosial dapat terawat secara baik.

Rekomendasi untuk para tokoh agama dan masyarakat, hendaknya memberi kesempatan kepada generasi muda agar mereka terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam bina damai. Menuduh kelompok pemuda sebagai biang kerusuhan tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan terus menyudutkan pemuda. Melibatkan pemuda dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bina damai akan berkontribusi positif bagi penciptaan generasi yang peduli damai dan siap menolak kekerasan. Sebagai tambahan, di tangan kawula muda, biasanya program bina damai dapat dikemas secara kreatif dan menyenangkan.

Agar program bina damai dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien, para pegiat program bina damai dan semua pihak termasuk kalangan perguruan tinggi perlu melakukan koordinasi dan kerja sama. Perguruan tinggi wajib berperan serta menyediakan data bagi pengembangan program bina damai dan penguatan sistem siaga dini untukantisipasi bencana sosial.

Studi lanjutan mengenai pemuda dan aktivitas bina damai penting terus dikembangkan. Model penelitian partisipatif perlu dipilih sehingga memberi kontribusi nyata bukan hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang studi perdamaian, melainkan juga mendorong perguruan tinggi terlibat aktif memberi advokasi terhadap kelompok muda dalam mengembangkan integrasi sosial dan kedamaian di masyarakat.[]



## BIBLIOGRAFI

- Abubakar, Irfan, “Menuju Paradigma Peace Building Pascakonflik Kekerasan”, *Jurnal Tashwirul Afkar*, No 22 (2007): 26-40.
- Achmad, Nur, ed., *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Berents, Helents & Siobhan McEvoy-Levy, “Theorising youth and everyday peace(building)”, *Peacebuilding*, 3:2 (2015): 115-125 diakses tanggal 05 Maret 2016.
- Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (New York: Cambridge University Press, 2004)
- Brannen, Julia, ed. *Mixing Methods: Qualitative and Quantitative Research*, (Vermont: Asghate Publishing Company, 1992).
- Budiwanti, Erni, “Pluralism Collapses: A Study of The Jamaah Ahmadiyah Indonesia and its Persecution,” ARI Working Paper No. 117, National University of Singapore, May 2009.
- \_\_\_\_\_, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000).

- Burhanuddin, Jajat dan Arif Subhan, eds., *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusakan Sosial* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM, 2000).
- Burrowes, Robert J. *The Strategy of Nonviolent Defense: A Gandhian Approach*. SUNY Press, 1996.
- Cederroth, Sven, *The Spell of The Ancestors and The Power of Mekkah, A Sasak Community on Lombok*, (Goteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1981).
- Coppel, CA. ed. *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution* (London: Routledge, 2005).
- Cortright, David, *Peace: A History of Movements and Ideas* (New York: Cambridge University Press, 2008).
- Coser, Lewis, *The Function of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1965).
- Dahrendorf, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959).
- Del Felice, Celina, and Andria Wisler. "The Unexplored Power and Potential of Youth as Peace-builders." *Journal of Peace Conflict and Development* 11 (2007).
- Deutsch, Morton, *The Resolution of Conflict* (New Haven: Yale University Press, 1973).
- Dian Yanuardy, "How 'Routine' is Routine Violence ? Memahami Proses-proses yang Kompleks dari Kekerasan Rutin" dalam Amien Tohari et.al.,ed., *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011): 55-88.
- Faizah, *Dakwah Salafiyah di Lombok (Suatu Kajian Komunikasi antar Budaya)*, Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Hamdi, Saipul, *Nahdlatul Wathan: Agama Konflik Komunal dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014)
- <http://www.radarlombok.co.id/warga-monjok-dan-karang-taliwang-bentrok.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2016
- Jamil, Muhsin, ed. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007).

- Kingsley, Jeremy J., "Peacemakers or Peace-Breakers? Provincial Elections and Religious Leadership in Lombok, Indonesia", *Indonesia* 93 (Apr 2012): 53-82.
- \_\_\_\_\_, *Tuan Guru, Community and Conflict in Lombok, Indonesia*, Ph.D thesis (Melbourn: The University of Melbourn, 2010).
- Lesmana, Hendra, *Active Non-Violence Movement (Studi Gerakan Wacana Peace Generation Yogyakarta Terhadap Kekerasan di Indonesia)*, Tesis Prodi Agama dan Filsafat UIN Yogyakarta, 2015.
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta, LkiS, 2005).
- Mantu, Rahman. "Bina-Damai Dalam Komunitas Pesantren: Sebuah Upaya Counter-Radikalisme." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 23.1 (2015): 131-150.
- McLaughlin, Karrie dan Ari Perdana, "Conflict and Dispute Resolution in Indonesia Information from the 2006 Governance and Decentralization Survey," *Indonesian Social Development Paper* No. 16 (2010) edisi online dapat dilihat di [www.conflictanddevelopment.org](http://www.conflictanddevelopment.org).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mukhtar, Fathurrahman, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pesantren Organisasi Nahdlatul Wathan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Murthi, Tim, *The Ethics of Peacebuilding* (Edinburg: Edinburg University Press 1990).
- Narayan, Deepa "Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty." dalam Sunder Ramaswamy, ed., *Social Capital and Economic Development: Well-being in Developing Countries* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2002).



- Ningrum, Denis Setyo. *Keberagaman dan Problem Integrasi Pemuda (Studi Kasus di Komunitas Peace Generation Yogyakarta)*. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Panggabean, Samsu Rizal dan Ihsan Ali-Fauzi, “Dari Riset Perang ke Riset Bina Damai” dalam Samsu Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi, *Polisi, Masyarakat dan Konflik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2011).
- Patulny, Roger V. dan Gunnar Lind Haase Swendsen, “Exploring the Social Capital Grid: Bonding, Bridging, Qualitative, Quantitative”, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol.27. No.1/2 (2007): 32-57.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse and Hugh Mial, *Contemporary Conflict Resolution. The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts* (Cambridge: Polity Press, 2006).
- Reardon, Betty A., *Comprehensive Peace Education; Educationg for Global Responsibility* (New York, Columbia University: Teacher College Press, 1988).
- Rothman, J. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992).
- Rozi Syafuan, et.al., *Kekerasan Komunal: Anantomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Rumadi, “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara” dalam Ahmad Suaedy, et.al., ed., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).
- Siobhán, McEvoy-Levy, *Youth as Social and Political Agents: Issues in Post-settlement Peace Building*. Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, 2001.
- \_\_\_\_\_, “Children, youth and peacebuilding.” *Critical Issues in Peace and Conflict Studies: Theory, Practice and Pedagogy* (2011): 159-176.
- Suaedy, Ahmad, et.al., ed., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

- Sujibto, B.J., "Spirit Peacebuilding Melalui Komunitas Pemuda di Yogyakarta." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10.1 (2016).
- Suprpto, *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim* (Jakarta: Prenada Kencana, 2013).
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, "Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia". Microcon Research Working Paper 7, July 2008.
- Thomas, R. Murray, *Blending Qualitatif and Quantitatif Research Methods in Theses and Dissertation* (California: Corwin Press, Inc A Sage Publications Company, 2003).
- Tim ProPatria Institute, *Post-Conflict Peacebuilding: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual* (Jakarta: ProPatria Institute, 2009)
- Tohari, Amien, et.al., *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2011).
- van Klinken, Gerry, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).
- Varshney, Ashutosh, et.al., "Pattern of Collective Violence in Indonesia (1990-2003)", UNSFIR (United Nation Support Facility for Indonesian Recovery) Jakarta: Report UNSFIR, 2004.
- Vendley, Williem, "Kekuatan Agama-agama untuk Perdamaian" dalam Elza Peldi Taher, ed., *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009).
- Zada, Khamami, *Prakarsa Perdamaian Pengalaman dari berbagai Konflik Sosial* (Jakarta: PP Lakpesdam NU & European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR), 2008).
- Zaenuri, L. Ahmad, "Konflik Jemaat Ahmadiyah dengan Masyarakat Non Ahmadiyah (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara Barat)" Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.[]



# INDEKS

## A

Ahmadiyah x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
asosiasi x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
awik-awik x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

## B

Bertrand; Jacques x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
bonding x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
bridging x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
budaya x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
Budha x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
Budiwanti; Erni x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

## C

Cakranegara x, 4, 47, 71, 74,

80, 81

counter violence x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

CSRC x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

## D

diskriminasi x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

## E

early warning system x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

## F

FKDM 1–106

FORELI x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

FORMULA x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**G**

Galtung; Johan x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Gandhi; Mahatma x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 generasi muda x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**H**

Hindu x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 HMI x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 HMJ x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 human rights x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**I**

identitas x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 IMM x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Islam x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**J**

Jakarta x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 JARIK x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**K**

Katolik x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 kekerasan x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 kekerasan politik x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 kerusuhan x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Kesbangpoldagri 1  
 ketegangan x, 4, 47, 71, 74, 80,

81

Kingsley; Jeremy x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 KMHDI x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 KNPI x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 komunalisme x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 konflik x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 kontestasi x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Kristen x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**L**

LBH x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Lederach; Paul x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 LSM x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**M**

Muhammadiyah x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 multikultur x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**N**

NU x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 NW x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 nyepi x, 4, 47, 71, 74, 80, 81

**P**

peacebuilding x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 peace keeping x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 peace making x, 4, 47, 71, 74,

80, 81  
 peace studies x, 4, 47, 71, 74,  
 80, 81  
 pemukiman x, 4, 47, 71, 74,  
 80, 81  
 perguruan tinggi x, 4, 47, 71,  
 74, 80, 81  
 perlawanan x, 4, 47, 71, 74, 80,  
 81  
 pisgen x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 PMII x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 PMKRI x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 polisi x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 PPIM x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 pura x, 4, 47, 71, 74, 80, 81  
 Putnam; Robert D. x, 4, 47,  
 71, 74, 80, 81

## R

resolusi konflik x, 4, 47, 71, 74,  
 80, 81  
 root of conflict x, 4, 47, 71, 74,  
 80, 81  
 ruang publik x, 4, 47, 71, 74,  
 80, 81

## T

Tuan Guru Bajang (TGB) x, 4,  
 47, 71, 74, 80, 81

## V

Varshney; Ashutosh x, 4, 47,  
 71, 74, 80, 81



## BIODATA PENULIS

SUPRAPTO adalah dosen IAIN Mataram. Ia merampungkan pendidikan doktornya pada tahun 2013 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat *cumlaude*. Selain sebagai dosen, pria kelahiran Madiun pada tanggal 20 Juli 1972 ini, sejak dua tahun lalu, ditunjuk sebagai Direktur Mataram Mediation Center (MMC) IAIN Mataram.

Karya-karyanya sebagian besar berkaitan dengan tema-tema *civic culture*, multikulturalisme, radikalisme, interfaith dialog, dan resolusi konflik. Buku-buku yang telah ditulis antara lain *Civic Culture & Pertarungan Identitas* (2013), *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid: Integrasi, Kontestasi dan Resolusi Konflik* (2014), dan *Agama dan Studi Perdamaian* (2016). Selain dalam bentuk buku, karya ilmiah pria yang juga menjadi *research fellow* di Yayasan Nusatenggara Center (NC) Mataram ini juga dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi seperti jurnal internasional *Al-Jamiah* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Studia Islamika*, *Indo-Islamika Jurnal Pascasarjana* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), *Ulumuna Journal for Islamic Studies* (IAIN Mataram), *Analisis* (IAIN Raden Intan Lampung), dan *Jurnal Walisongo* (UIN Walisongo Semarang).

Minatnya pada kajian resolusi konflik dan interfaith dialog telah mengantarkannya memperoleh *grand* dari Belanda untuk mengikuti *Short Course Program on Mediation and Conflict Resolution*



di Wageningen University Netherland pada tahun 2008 dan diundang ke Jepang untuk mengikuti *Southeast Asia Young Moslem Leaders Invitation Program* tahun 2011. Untuk menambah wawasannya di bidang penelitian, selama dua tahun terakhir, Suprpto aktif mengikuti *post-doctoral research*, seperti di Marmara University Istanbul Turki (tahun 2015) dan *short stay program* di Western Sydney University Australia (tahun 2016).[]

Program bina damai nirkekerasan merupakan program penting bagi upaya pengembangan integrasi sosial dan harmoni di masyarakat. Karena itu, program ini bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan semua elemen masyarakat termasuk kelompok remaja atau generasi muda. Sayangnya, program bina damai yang selama ini berlangsung belum sepenuhnya melibatkan kalangan generasi muda. Keterlibatan pemuda dalam program resolusi konflik dan bina damai mungkin ada, tetapi belum maksimal. Itu pun sebagian masih menempatkan remaja atau pemuda sebagai sasaran kegiatan (objek), bukan pelaku (subjek) program. Akibatnya, partisipasi dari kelompok produktif ini masih belum maksimal.

Buku ini dihajatkan untuk mendokumentasikan sebagian kecil suara anak muda mengenai pandangan mereka tentang konflik, kekerasan, dan integrasi sosial. Berbagai inisiasi bina damai yang telah mereka rintis menjadi data menarik yang mengindikasikan mulai banyaknya keterlibatan komunitas-komunitas pemuda dalam mempromosikan perdamaian. Penelitian ini dilakukan di kota Mataram dan wilayah lain di Pulau Lombok. Kota Mataram merupakan kota multikultur yang penuh dinamika: konflik dan integrasi antarwarga yang majemuk. Tidak menutup kemungkinan, bahwa realitas yang sama sangat mungkin ditemukan di berbagai kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai temuan di dalam buku ini sangat mungkin dijadikan bahan perbandingan untuk membaca kondisi daerah-daerah lain di Indonesia.

diterbitkan atas kerja sama:



Mataram Mediation Center  
IAIN Mataram



Onglam Books Publishing

